



# PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN:

**TANTANGAN, STRATEGI, DAN PERAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**Concilianus Laos Mbato**

**PENDIDIKAN INDONESIA  
MASA DEPAN:  
TANTANGAN, STRATEGI, DAN PERAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Concilianus Laos Mbato



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

# PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN:

TANTANGAN, STRATEGI, DAN PERAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Copyright © 2022

Concilianus Laos Mbato

Magister Pendidikan Bahasa Inggris – FKIP UNIVERSITAS SANATA DHARMA

---

Penulis:

**Concilianus Laos Mbato**

Editor:

Albertus Bagus Laksana, S.J.

Tarsisius Sarkim

Alexander Hendra Dwi Asmara, S.J.

Buku elektronik (e-Book):

**ISBN: 978-623-6103-93-7 (PDF)**

EAN: 9-786236-103937

Buku Cetak:

ISBN: 978-623-6103-92-0

EAN: 9-786236-103920

Bidang Pendidikan

Cetakan Pertama, Desember 2022

xiv+161 hlm.; 14,8 x 21 cm.

Ilustrasi sampul: Fajar Sungging

Tata letak: Thoms

PENERBIT:



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

Lantai 1 Gedung Perpustakaan USD

Jl. Affandi (Gejayan) Mrican,

Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 513301, 515253;

Ext.1527/1513; Fax (0274) 562383

e-mail: [publisher@usd.ac.id](mailto:publisher@usd.ac.id)

PENYELENGGARA & KERJA SAMA:



DIES NATALIS KE-67

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

WAKIL REKTOR I

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Gedung Pusat Kampus II Mrican,

Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 513301, 515253;



Sanata Dharma University Press anggota APPTI

(Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

No. Anggota APPTI: 003.028.1.03.2018

---

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penulis & penerbit.

*Dipersembahkan untuk*

***Tuhan Yesus,  
Bunda Maria dari Medali Wasiat,  
St. Ignatius dari Loyola, Pur, Boyd, Vanessa dan Filia***

*Yang sekarang terjadi, sudah terjadi sebelumnya.  
Yang akan ada, sudah lama ada (Pkh 3:15). Hendaklah pinggangmu  
tetap berikat dan pelitamu tetap menyala (Luk. 12:35).*



## PRAKATA

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa sehingga penulisan buku berjudul “Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan dan Strategi serta Peran Universitas Sanata Dharma”, dapat dituntaskan meski dalam keterbatasan waktu. Penulisan buku ini dimulai pada tanggal 4 November 2022 atau 26 hari sebelum *deadline* penyerahan buku kepada penerbit, atas permintaan Wakil Rektor 1, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D. Sebelumnya, proses penulisan telah dimulai pada bulan Juli 2022, dalam bentuk teks Pidato Dies ke 67, Universitas Sanata Dharma, atas penugasan Rektor, Rm. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., dengan tema yang agak berbeda yaitu "Merumuskan Arah dan Agenda Pendidikan Indonesia dan Peran USD di tengah diskusi RUU Sisdiknas". Namun demikian, tema tersebut menjadi kurang relevan lagi dengan tidak berlanjutnya proses perumusan RUU Sisdiknas oleh pemerintah dan DPR.

Proses penulisan hingga penyelesaian buku ini di tengah berbagai kesibukan dan penugasan lain, baik dari kampus maupun pemerintah, memberikan sedikit gambaran kepada pembaca (meski dalam skala kecil) tentang dunia yang kita hidupi kini dan kedepan yaitu *D-Vucad*. Dunia *D-Vucad* merupakan dunia yang ditandai dengan (*Digital*) *Disruption* (disrupsi digital), *volatility* (situasi yang berubah begitu cepat dan tidak terduga), *uncertainty* (ketidakpastian), *ambiguity* (ambiguitas), dan *diversity* (kemajemukan). Banyak peristiwa di dunia terjadi begitu cepat dan menimbulkan ketidakpastian dan

ambiguitas sehingga kita hampir tidak dapat mengantisipasinya. Selain itu, dunia kita juga ditandai dengan *fragmentalisme*, *superfisialitas* dan *instrumentalitas*.

Situasi dunia yang seperti ini juga merambah dunia pendidikan kita, kini dan ke depan. Menyikapi situasi ini, kita sebagai bangsa harus berbenah diri. Buku ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memberikan sumbangan data, pikiran dan gagasan serta strategi demi pendidikan Indonesia ke depan yang lebih berkualitas, berkeadilan dan bermartabat. Untuk itu Bab I buku ini menyajikan secara singkat dunia *D-Vucad*, *fragmentalisme*, *superfisialitas* dan *instrumentalitas*.

Pada Bab II, para pembaca akan menelusuri dua tantangan pendidikan Indonesia ke depan yaitu tantangan dalam konteks nasional dan tantangan dalam konteks global. Tantangan dalam konteks nasional antara lain terkait disparitas yang masih kita hadapi sebagai bangsa, baik menyangkut pemerataan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Kasar, maupun berbagai kesenjangan seperti kesenjangan budaya, kesenjangan guru, kesenjangan digital, maupun konstruksi guru profesional ke depan. Bagian ini diakhiri dengan uraian pencarian jati diri pendidikan Indonesia, yang diawali dengan perjalanan historis perjuangan pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial, pra-kemerdekaan, hingga pasca-kemerdekaan. Pesan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis adalah bahwa kita, sebagai bangsa, secara historis telah mampu melalui berbagai tantangan dan bahwa pendidikan yang kita nikmati sekarang adalah bukti dari kontribusi berbagai elemen masyarakat, baik negeri maupun swasta, pribadi maupun kelompok, yang menembus berbagai sekat primordialisme. Tantangan dalam konteks global menyajikan tiga topik yaitu isu liberalisasi pendidikan, perlunya menaikkan daya saing bangsa, dan persaingan dalam semangat kolaboratif.

Pada Bab IV, pembaca akan menjelajahi tujuh strategi yang dapat digunakan baik oleh pengambil kebijakan pendidikan,

pemerhati pendidikan, maupun berbagai institusi pendidikan serta para pendidik dalam berbagai jenjang pendidikan, dalam menyusun berbagai kebijakan maupun dalam implementasi pada tataran operasional. Ketujuh strategi tersebut adalah belajar dari RUU Sisdiknas, sentralisasi kebijakan dan desentralisasi implementasi, pendidikan antarbudaya dan ekologis, pendidikan inklusif dan non diskriminatif, kurikulum holistik, metakognisi dan regulasi diri, dan profil pendidik Indonesia masa depan.

Bab V secara khusus menyajikan peran Universitas Dharma (USD) dalam perjalanan pendidikan Indonesia, yang diawali dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) sebagai hasil diskusi dengan Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI pada saat itu) tahun 1955 atau 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Peran USD terhadap dunia pendidikan Indonesia pun dimulai. USD sendiri tidak mungkin bisa dipisahkan dari pemikiran dan dedikasi tokoh-tokohnya, khususnya Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara, S.J., seorang Imam Yesuit sekaligus Rektor pertamanya. Pemikiran dan kontribusi Driyarkara, begitu Beliau sering disapa, terhadap dunia pendidikan Indonesia cukup besar tetapi belum banyak dikenal dan digunakan oleh banyak orang, khususnya dalam berbagai dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan pendidikan. Kontribusi Driyarkara terlihat dari pengakuan pemerintah berupa Penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Habibie pada tanggal 13 Agustus tahun 1999 atas jasa-jasa Beliau terhadap Negara Indonesia. Karena itu, membicarakan Indonesia pada pasca-kemerdekaan dan USD menarik kita untuk membicarakan Driyarkara. Meskipun demikian, pembicaraan tentang Driyarkara dalam buku ini sangatlah terbatas mengingat luasnya pemikiran Beliau dan terbatasnya waktu dan kapasitas buku ini.

Membicarakan Sanata Dharma juga menarik kita untuk membicarakan pendidikan Yesuit di seluruh dunia, yang kini berusia hampir 500 tahun, dan menjadi inspirasi dan sekaligus sumber dari berbagai kebijakan pendidikan di USD. Sesungguhnya USD adalah

bagian dari 189 lembaga pendidikan tinggi Yesuit global. Bagian ini menyajikan sekilas pendidikan Yesuit, nilai-nilai dasar pendidikan Yesuit, tujuan dan ciri-ciri pendidikan Yesuit, dan Paradigma Pedagogi Ignasian. Bab V diakhiri dengan diskusi tentang Universitas Sanata Dharma yaitu sejarah singkatnya, nilai dasar, visi misi dan posisi USD dalam dinamika pendidikan Indonesia ke depan.

Bab VI penulis mencoba mengurai beberapa agenda kreatif dan kritis yang bisa dilakukan USD dalam konstelasi pendidikan Indonesia ke depan. Bab VII dimulai dengan tinjauan reflektif terkait sebagian besar isi buku ini dan diakhiri dengan penawaran model metakognitif dalam mengembangkan regulasi diri pembelajar. Model ini terintegrasi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, dan kemudian pemikiran Driyarkara serta berbagai teori metakognisi dan regulasi diri. Model ini dikembangkan oleh penulis tahun 2013 dan dapat digunakan menjadi salah satu alternatif pengembangan pembelajaran ke depan. Selain itu, penulis mendiskusikan relevansi pendidikan berorientasi metakognisi dan regulasi diri baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam mengarungi dunia *D-Vucad* dalam dunia nyata.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Rektor USD, Rm. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk berpidato pada Dies USD ke 67 dengan tema yang sangat sulit ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Wakil Rektor I USD, Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D., yang telah mendorong penulisan buku ini. Tanpa permintaan dan dukungan Beliau, buku ini tidak mungkin akan ditulis. Penulis juga berterima kasih kepada Tim Pidato, dan akhirnya Editor buku ini, yaitu Rm. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., Drs. Tarsisius Sarkim, Ph.D., dan Alexander Hendra Dwi Asmara, S.J., S.S., M.A., Ph.D., atas diskusi hangat, dan ide-ide brilian serta referensi yang diberikan. Terlebih, kehadiran mereka telah membuat penulis percaya bahwa meskipun sulit, buku pidato ini bisa selesai tepat waktu. Penulis juga berterima kasih kepada rekan Markus

Budiraharjo, Ed.D., atas beberapa referensi yang sangat bermanfaat dalam menyikapi beberapa isu dalam buku ini.

Penulis juga bertema kasih kepada dosen PBI dan MPBI USD atas segala bentuk dukungan selama proses penulisan buku ini. Yang tidak kalah pentingnya, penulis berterima kasih kepada isteri saya, Purwati, dan ketiga anak kami, Boyd, Vanessa dan Filia, yang telah dengan senang hati dan penuh dukungan serta pengertian, rela ditinggal berjam-jam karena saya harus mengejar waktu untuk penyelesaian buku ini.

Akhirnya penulis harus meminta maaf kepada pembaca bila menemukan begitu banyak kelemahan dalam buku ini, baik dari segi sistematika, bahasa, isi, data maupun ide. Masukkan pembaca sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi dalam edisi kedua buku ini. Penulis mengajak kita semua untuk bersama-sama dan dengan cara sendiri-sendiri membangun masa depan pendidikan Indonesia yang merata, berkeadilan, multikultural dan bermartabat demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama melalui semangat dialog, sinergi, dan kerja sama yang saling membangun.

Yogyakarta, 5 Desember, 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 <i>Vucad</i> .....	1
1.1.2 Fragmentalis, Superfisialitas dan Instrumentalis ..	6
1.1.3 Tujuan .....	7
BAB II	
TANTANGAN PENDIDIKAN INDONESIA .....	9
2.1 Tantangan Pendidikan dalam Konteks Nasional .....	9
2.1.1 Disparitas Berbagai Aspek .....	9
2.1.1.1 Pemerataan Pembangunan .....	9
2.1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	11
2.1.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	13
2.1.2.4 Kesenjangan Budaya .....	17
2.1.2.5 Kesenjangan Guru .....	21
2.1.2.6 Kesenjangan Digital .....	24
2.1.2.7 Konstruksi Identitas Guru Profesional ....	26
2.1.2.8 Pesan Reflektif .....	29

2.1.2	Pencarian Jati Diri Pendidikan Indonesia .....	29
2.1.2.1	Belajar dari Perjuangan Pendidikan Indonesia Masa Lalu .....	30
2.1.2.2	Mencari Jati Diri Kurikulum Pasca- Kemerdekaan .....	34
2.1.2.3	Kurikulum Dewasa ini .....	36
2.2	Tantangan Pendidikan dalam Konteks Global .....	39
2.2.1	Liberalisasi Pendidikan? .....	39
2.2.2	Menaikkan Daya Saing .....	41
2.2.3	Persaingan dalam Semangat Kolaborasi .....	42
2.3	Pesan Reflektif .....	42
<b>BAB III</b>		
<b>STRATEGI PENDIDIKAN INDONESIA KE DEPAN .....</b>		<b>43</b>
3.1	Belajar dari RUU Sisdiknas .....	43
3.2	Sentralisasi Kebijakan dan Desentralisasi Implementasi .....	46
3.3	Pendidikan Antarbudaya dan Ekologis .....	53
3.4	Pendidikan Inklusif dan Nondiskriminatif .....	58
3.5	Kurikulum Holistik .....	61
3.6	Metakognisi dan Regulasi Diri .....	65
3.6.1	Metakognisi .....	65
3.6.2	Regulasi Diri .....	68
3.7	Profil Pendidik Indonesia Masa Depan .....	75
3.8	Pesan Reflektif .....	79
<b>BAB IV</b>		
<b>PERAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA DALAM KONSTELASI PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN .....</b>		<b>81</b>
4.1	Pengantar .....	81
4.2	Driyarkara .....	82

4.2.1	Konteks Pemikiran Driyarkara Secara Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis .....	83
4.2.2	Driyarkara dan Pemikirannya tentang Pendidikan .....	85
	4.2.2.1 Pendidikan adalah Hak Fundamental dan Realitas .....	85
	4.2.2.2 Pendidikan Keluarga dan Sekolah .....	86
	4.2.2.3 Tiga Belas Dalil Pendidikan Driyarkara .....	88
	4.2.2.4 Pesan Reflektif .....	89
4.3	Pendidikan Yesuit .....	91
	4.3.1 Sekilas Pendidikan Yesuit .....	91
	4.3.2 Nilai-nilai Dasar Pendidikan Yesuit .....	92
	4.3.3 Tujuan dan Ciri-ciri Pendidikan Jesuit .....	98
	4.3.4 Pedagogi Ignasian .....	101
	4.3.4 Pesan Reflektif .....	108
4.4	Universitas Sanata Dharma dan Perannya dalam Pendidikan Indonesia ke Depan .....	109
	4.4.1 Sekilas Universitas Sanata Dharma .....	109
	4.4.2 Nilai-nilai Dasar Pendidikan di USD .....	110
	5.4.3 Visi dan Misi USD .....	112
	4.4.4 Posisi USD dalam Dinamika Pengembangan Pendidikan di Indonesia .....	117
	4.4.4.1 Mitra Pemerintah .....	117
	4.4.4.2 Mitra APTIK dan APTISI .....	118
	4.4.4.3 Mitra Pendidikan Jesuit Sedunia .....	118
	4.4.4.4 Mitra Sekolah .....	118
	4.4.4.5 Mitra Masyarakat .....	118
	4.4.5 Pesan Reflektif .....	119
	4.4.5 Agenda-Agenda Kreatif Pendidikan ke Depan Baik di Lingkungan USD Maupun Jaringan- Jaringan yang Ada .....	120

4.4.5.1	Menjadi Kolaborator Rancangan Arah Pendidikan Indonesia ke Depan .....	120	
4.4.5.2	Mendirikan Pusat Studi Driyarkara .....	120	
4.4.5.3	Mengkaji <i>Standing</i> USD terkait Tri Dharma PT .....	121	
 BAB V			
PENUTUP: MENAWARKAN SEBUAH MODEL PEMBELAJARAN HOLISTIK .....			123
5.1	Sebuah Model Metakognitif untuk Mengembangkan Regulasi Diri Pembelajar .....	123	
5.2	Relevansi Metakognisi dan Regulasi Diri dalam Dunia Pekerjaan .....	130	
5.3	Tinjauan Reflektif .....	134	
REFERENSI .....			139
BIODATA PENULIS .....			161

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 *Vucad*

**D**unia seperti apa yang kita hidupi sekarang? Saya ingin memulai penjelajahan buku ini dengan mengajak kita untuk berefleksi terhadap beberapa peristiwa penting yang terjadi di dunia tempat kita hidup bersama dalam beberapa waktu terakhir ini. Peristiwa terbaru adalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan Facebook (FB). Dilansir dari Harian Kompas (Pertiwi, 2022) bahwa Facebook melakukan PHK terbesar dalam sejarah perusahaan yaitu sebanyak 11.000 karyawan atau 13% di seluruh dunia. Terdapat setidaknya-tidaknya dua alasan utama PHK tersebut dilakukan. Penyebab pertama adalah kesalahan strategi di awal pandemi. Mark Zuckerberg, sang pemilik Meta, memprediksi bahwa orang akan berbondong-bondong bekerja *online* dan bukan *offline* setelah pandemi berakhir sebagai akibat dari kebiasaan kerja yang terbentuk selama pandemi. Maka Meta melakukan investasi besar-besaran pada fitur-fitur dan produk yang mendukung pekerjaan online. Ternyata prediksi ini salah karena perlahan-lahan baik individu maupun perusahaan mulai kembali bekerja *offline*. Pendapatan Metapun menurun sebanyak 4,5% atau (Rp 430,1 triliun). Selain itu Meta menginvestasikan sekitar Rp 232 triliun untuk pembangunan *Reality Labs* yang merupakan bagian penting proyek metaverse.

Investasi ini malah mengalami kerugian lebih dari 6 miliar dollar AS (Rp 89,2 triliun) per Agustus 2022.

Peristiwa kedua adalah pandemi *Covid-19*. Ketika *Covid-19* mulai melanda sebagian negara di dunia pada November 2019, kita mungkin merasa bahwa bencana ini terjadi di negara-negara lain yang begitu jauh dari Indonesia, dan pemerintah pasti akan bisa melakukan antisipasi agar *Covid-19* tidak masuk ke Indonesia, apalagi sampai merenggut nyawa. Setidak-tidaknya terdapat tiga tindakan preventif dilakukan pemerintah untuk masuknya *Covid-19* ke Indonesia yaitu: (1) Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini; (2) penempatan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok; dan (3) pemberian *health alert card* dan Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang (Kemlu, 2020).

Meskipun demikian, masuknya *Covid-19* ke Indonesia tidak bisa dicegah bahkan juga telah merenggut begitu banyak korban termasuk orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita bahkan anggota keluarga kita sendiri. Dampak pandemi *Covid-19* begitu dasyat hingga melanda dunia pendidikan. Kita tentu masih ingat bahwa sejak Maret 2020, lembaga pendidikan ‘terpaksa’ beralih dari pembelajaran tatap muka (luring) menjadi *daring*. Banyak sekolah maupun universitas harus berjibaku untuk mempelajari cara baru dalam menyelenggarakan pendidikan *daring* ini agar proses pembelajaran bisa terjadi.

Meskipun penyebaran *Covid-19* masih terjadi, yang sering juga masih menimbulkan korban jiwa, akhirnya kita patut bersyukur bahwa pemerintah berhasil mengendalikannya melalui vaksin, selain tentunya kesadaran baru masyarakat akan pentingnya tindakan pencegahan penyebaran *Covid-19*, sehingga sejak Agustus 2022,

dunia pendidikan bisa secara perlahan kembali ke pembelajaran *luring*.

Perasaan lega karena keberhasilan dunia kesehatan mengendalikan penyebaran *Covid-19* ternyata belum bisa kita nikmati sepenuhnya. Tanggal 24 Februari 2022, dunia dikejutkan dengan penyerangan Rusia terhadap Ukraina. Banyak di antara kita yang tidak menyangka bahwa peperangan tersebut akan benar-benar terjadi, meskipun Amerika dan negara-negara Barat lainnya telah memberi peringatan serangan Rusia terhadap Ukraina. Bahkan Al Jazeera, melalui peneliti khusus wilayah Ukraina, Kaukasus dan Asia Tengah (Yilmaz, 2022) menegaskan bahwa “Terlepas dari prediksi Barat tentang invasi yang akan segera terjadi, patut dipertanyakan bahwa target mobilisasi militer Rusia yang dimaksud adalah Ukraina”. Hal ini disebabkan karena, masih menurut Yilmaz (2022):

Dalam setiap kasus, pemerintah Rusia memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko di lapangan. Mereka telah membuat analisis biaya-manfaat yang cermat dan menetapkan tujuan yang jelas dan terbatas untuk penggunaan *hard power*. Kebijakan hemat biaya adalah pilihan sadar karena para pembuat keputusan Rusia tahu betul bahwa mereka tidak memiliki sarana untuk mempertahankan perang skala besar. (n.d.)

Namun, seperti yang kita saksikan bersama, Rusia benar-benar menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 atau hanya dua minggu setelah prediksi yang dilakukan Yilmaz. Melalui berbagai media, kita menyaksikan dampak peperangan di Ukraina yang telah merenggut ribuan nyawa baik sipil maupun militer. Begitu banyak bangunan seperti sekolah, perhotelan, rumah sakit hancur. Sanksi ekonomi pun diberlakukan untuk Rusia yang dampaknya bukan saja menimpa Rusia tetapi juga negara-negara pemberi sanksi seperti Inggris dan bahkan negara-negara yang sebetulnya bersikap netral seperti Indonesia.

Bank Dunia (The World Bank, 2022) memberitakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina menghalangi Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi di Negara-negara Eropa dan Asia Tengah: “Perekonomian global terus melemah akibat perang melalui gangguan yang signifikan dalam perdagangan dan guncangan harga pangan dan bahan bakar, yang semuanya berkontribusi terhadap inflasi yang tinggi dan pengetatan berikutnya terhadap kondisi pembiayaan global”. Sindonews (Khalila, 2022) juga memberitakan tiga dampak peperangan terhadap dunia, termasuk Indonesia, yaitu (a) kenaikan harga komoditas energi, (b) kenaikan harga komoditas pangan, dan (c) inflasi.

Selain itu, Sri Mulyani seperti dilansir dari CNBC (Tim Redaksi, 2022) bahwa krisis pangan tahun 2023 akan sangat berat, termasuk bagi Indonesia, sebagai dampak dari peperangan Rusia dan Ukraina karena Ukraina merupakan pemasok terbesar kebutuhan pangan dan pupuk untuk dunia. Lebih lanjut diberitakan bahwa negara-negara maju menyentuh level inflasi tertinggi pada September 2022 dalam 40 tahun yaitu 8,2% (Amerika Serikat) 9,1% (Uni Eropa) 9,9 % (Inggris Raya) meskipun Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III-2022 sebesar 5,72% (Kemenkeu, 2022).

Tiga peristiwa besar yang mengguncang dunia tersebut paling tidak menggambarkan dunia yang kita hidupi dewasa ini, yang sering disebut sebagai *(D)-Vucad* yaitu (*Digital*) *Disruption, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity dan Diversity*). Istilah *(D)-Vucad* pertama kali pertama kali muncul setelah Perang Dingin dengan akronim *Vuca* untuk menggambarkan bentuk baru keterlibatan militer yang tidak dapat diprediksi dan kini merujuk pada pergeseran secara dinamis keadaan yang membuat proyeksi ke depan tidak pasti karena perlu memperhitungkan banyak pengaruh (Shaffer & Zalewski, 2011). Istilah *Vucad* telah berkembang menjadi *D-Vucad* (Woodward, 2017).

Dunia kita dewasa ini ditandai dengan volatilitas (*Volatility*) yaitu hakikat dan dinamika perubahan yang sering begitu cepat dan tidak bisa diprediksi meski pengetahuan tentang hal ini sering tersedia (Bennett & Lemmoine, 2014). Mark Zuckerberg, sang pemilik Meta,

mem-PHK ribuan karyawan dan merugi karena kesalahan strategi akibat proyeksi keliru perilaku manusia pasca-pandemi. Yilmaz, peneliti Al Jazeera-pun, yakin bahwa Rusia tidak akan menyerang Ukraina namun peperangan antara Rusia dan Ukraina benar-benar terjadi dengan segala krisis yang menyertai baik krisis ekonomi, lingkungan maupun kemanusiaan. Meski pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mencegah masuknya *Covid-19* ke Indonesia, penyebaran *Covid-19* tetap terjadi di Indonesia. Bahkan kita mengalami dua tahun lebih yang cukup mencekam akibat pandemi tersebut.

Volatilitas adalah keadaan atau situasi yang berubah begitu cepat dan sering mendahului ketidakpastian. Perubahan dunia yang begitu cepat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*). Kita tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi nanti karena kompleksnya sebuah masalah yang dihadapi dan dunia yang kita tinggali meskipun sebab dan akibatnya diketahui. Dunia dewasa ini juga ditandai dengan ambiguitas. Situasi ambiguitas ditandai dengan tidak adanya hubungan sebab akibat dan orang benar-benar menghadapi sesuatu yang tidak diketahui (Bennett & Lemmoine, 2014). Apakah masih ada yang namanya *the truth* atau semuanya menjadi *relative truths*? Kalau salah satu nilai dasar Universitas Sanata Dharma adalah *Menggali Kebenaran* maka kebenaran apa yang dimaksud? Apakah kebenaran itu sebuah keniscayaan dan pasti ada atau sudah tidak relevan lagi dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini?

Dunia yang kita tinggali dewasa ini juga ditandai dengan disruptsi (*disruption*). Adanya teknologi tentu telah memberikan banyak hal positif dan alternatif cepat pemerolehan informasi dan penyelesaian masalah tetapi bersamaan dengan itu muncul gangguan yang bisa membuat orang tidak dapat fokus pada penyelesaian sebuah tugas dengan efektif dan efisien. Seringkali banyak energi dihabiskan untuk hal-hal yang tidak menjadi tujuan kita. Kemajuan teknologi

pada industri 4.0 telah membuat segala sesuatunya terkoneksi secara digital. Harari (2018) mengingatkan kita bahwa:

Teknologi tidaklah buruk. Jika Anda tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup, teknologi dapat membantu Anda mengerti. Tetapi jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup, maka akan menjadi terlalu mudah bagi teknologi untuk membentuk tujuan Anda dan mengendalikan hidup Anda. Seiring semakin baiknya teknologi dalam memahami manusia, Anda mungkin semakin menemukan diri Anda melayaninya, bukan teknologi melayani Anda (hal. 215).

Menghadapi lingkungan *D-Vucad*, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Para manajer dihimbau untuk memikirkan kembali keterampilan mereka (D'Amato, 2022). Sementara itu, Law & Zentner (2012) menekankan perlunya fleksibilitas model dan strategi yang digunakan dalam merespons disrupsi pasar. Dalam hal ini, teknologi baru perlu dilihat bukan sebagai disrupsi melainkan sebagai kesempatan untuk menciptakan ekonomi baru serta pendekatan dan prinsip industri digital baru (Shvidanenko dkk, 2020). Era disrupsi seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk mempelajari strategi dan inovasi baru seperti halnya *blended learning* pendidikan (Wintarti dkk, 2019).

Menghadapi dunia *Vucad*, baiklah kita merefleksikan beberapa ungkapan berikut. Mengutip Heraclitus, Plato menegaskan bahwa satu-satunya yang konstan dalam hidup adalah perubahan. Benjamin Franklin mengatakan bahwa ketika Anda berhenti berubah, Anda tamat (ArapahoeTim, 2020).

### 1.1.2 Fragmentalis, Superfisialitas dan Instrumentalis

Dunia dewasa ini juga ditandai dengan fragmentalitas, superfisialitas dan instrumentalitas (Sosa, 2022). Globalisasi berbagai sektor kehidupan tidak saja membuat manusia semakin menyatu tetapi semakin terpisah-pisah (fragmentalis). Manusia cenderung kembali ke

‘zaman batu’ di mana orang merasa nyaman bisa berkumpul bersama kelompoknya. Sering terjadi bahwa kelompok homogen memunculkan permusuhan terhadap mereka yang berbeda dari kelompoknya. Selain itu dunia kita sering ditandai dengan superfisialitas atau kedangkalan. Orang cenderung melakukan sesuatu tanpa pemaknaan atau pemikiran yang mendalam dan hanya sekadar untuk memberi kesan yang baik. Hal ini juga terkait dengan tuntutan pekerjaan yang terlalu menekankan *outcomes* (hasil) sehingga mendorong orang untuk lebih berfokus pada pencapaian sesuatu yang berada di luar dirinya (*Instrumentalis*).

Dalam dunia yang ditandai dengan *Vucad* dan fragmentalisme, superfisialitas serta instrumentalitas, dunia pendidikan Indonesia perlu berbenah diri, salah satunya adalah dengan meninjau RUU Sisdiknas, yang meski sempat menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dan DPR, kini redup.

### 1.1.3 Tujuan

- 1) Mengidentifikasi tantangan pendidikan Indonesia ke depan baik dalam konteks nasional maupun global
- 2) Mengidentifikasi strategi-strategi penerapan pendidikan Indonesia masa depan
- 3) Menelaah konsep pendidikan Driyarkara, dan Yesuit, serta peran Universitas Sanata Dharma
- 4) Menawarkan sebuah model pembelajaran holistik



# BAB II

## TANTANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

### 2.1 Tantangan Pendidikan dalam Konteks Nasional

#### 2.1.1 Disparitas Berbagai Aspek

**B**ab ini menyajikan refleksi kritis dan konstruktif mengenai tantangan pendidikan di Indonesia baik internal maupun eksternal. Memajukan pendidikan di Indonesia tidaklah mudah. Isu pemerataan pembangunan masih mendominasi persoalan pendidikan. Saat ini kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur pendidikan belum merata. Selain tentunya kualitas dan distribusi guru dan tantangan budaya termasuk masalah eksklusivisme. Bagian ini akan menyajikan tujuh (topik) yang menunjukkan tantangan pembangunan yang masih dihadapi bangsa Indonesia ke depan termasuk tantangan pendidikan yaitu: (1) pemerataan pembangunan; (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (3) Angka Partisipasi Kasar (APK); (4) Kesenjangan budaya; (5) Kesenjangan Guru; (6) Kesenjangan Digital; (7) Konstruksi Identitas Guru Profesional.

##### 2.1.1.1 Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia yang salah satu pemicunya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Dilansir dari Worldometer (2022) bahwa Indonesia merupakan negara terluas ke-

15 di dunia dengan luas wilayahnya 1.904.569 km persegi dengan 1.811.570 km persegi daratan dengan jumlah penduduk per 2022 sebanyak 280.636.666 juta jiwa.

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terkait kriteria Daerah Tertinggal (Naikpangkat, 2022) adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menetapkan sebanyak 9.449 desa di Indonesia atau 13,20% sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis (Yanuar, 2021). Data dari Kementerian Desa menyebutkan bahwa saat ini terdapat 15.000 desa prioritas, dan 5.000 (7%) desa sangat tertinggal (Kemendesa, n.d.).

Selain masih banyaknya desa tertinggal dan sangat tertinggal, tantangan lain adalah penumpukan Kabupaten-Kabupaten tertinggal di beberapa Provinsi. Data Kabupaten tertinggal terlihat pada tabel 2 berikut ini (Saputra, 22 Maret, 2022).

**Tabel 1:** Kabupaten Tertinggal

	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten Tertinggal</b>	<b>Persen</b>
	Provinsi Papua Barat	8	12,90
	Provinsi Papua	22	35,48
	Provinsi Maluku	6	9,68
	Provinsi Maluku Utara	2	3,23
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	1,61
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	13	20,97
	Provinsi Sulawesi Tengah	3	4,84
	Provinsi Sumatera Utara	4	6,45
	Provinsi Sumatera Barat	1	1,61
	Provinsi Sumatera Selatan	1	1,61
	Provinsi Lampung	1	1,61
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>100,00</b>

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-daerah-daerah-tertinggal-di-indonesia-dalam-stranas-ppdt-2022-2024.html>. Diakses 7 November 2022.

Seperti terlihat pada Tabel di atas bahwa terdapat 62 Kabupaten di 11 provinsi dengan Provinsi Papua menduduki presentasi tertinggi (35,48) dan Nusa Tenggara Timur urutan kedua (20, 97) sebagai daerah tertinggal terhadap total kabupaten tertinggal. Mari kita simak informasi tentang persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

**Tabel 2:** Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal.

	<b>Presentase Penduduk Miskin di Daerh Tertinggal</b>		
Tahun	2019	2020	2021
Kategori Miskin	20,10	26,43	26,68

Sumber: Susenas BPS Data tahun 2015-2019, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Terdapat 122 Daerah Tertinggal) Data tahun 2020, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Terdapat 62 Daerah Tertinggal)

Salah satu hal yang perlu digarisbawahi dari data diatas adalah persentase penduduk miskin yang meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat tujuh permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh anak di daerah 3T sebagai berikut (Mardianto, 2022): 1) Belum tersedianya layanan pendidikan di sebagian wilayah 3T; 2) Minimnya akses layanan Pendidikan; 3) Minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; 4) Distribusi guru yang tidak seimbang; 5) Tidak sesuai antara kebutuhan dan penyediaan guru; 6) Angka partisipasi sekolah yang masih rendah dan 7) Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Tantangan untuk memajukan pendidikan di daerah 3T tentu menjadi semakin besar karena banyaknya wilayah Indonesia yang letaknya sulit terjangkau. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Pangesti (2019) menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara tingkat pendidikan dan kemiskinan yaitu semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan sebaliknya.

### 2.1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan tingkat pembangunan suatu wilayah/negara dan menjelaskan kemampuan masyarakat untuk mengakses hasil pembangunan dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dan terbentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak. *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM tahun 1990 dan mempublikasikan laporan tahunan dalam *Human Development Report* (HDR) (Indeks Pembangunan, 2022). Menarik kita cermati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sebagai berikut (Indeks Pembangunan, 2022).

**Tabel 3:** Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi.

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Aceh	71,90	71,99	72,18
Sumatera Utara	71,74	71,77	72,00
Sumatera Barat	72,39	72,38	72,65
Riau	73,00	72,71	72,94
Jambi	71,26	71,29	71,63
Sumatera Selatan	70,02	70,01	70,24
Bengkulu	71,21	71,40	71,64
Lampung	69,57	69,69	69,90
Kep. Bangka Belitung	71,30	71,47	71,69
Kep. Riau	75,48	75,59	75,79
Dki Jakarta	80,76	80,77	81,11
Jawa Barat	72,03	72,09	72,45
Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16
Di Yogyakarta	79,99	79,97	80,22
Jawa Timur	71,50	71,71	72,14
Banten	72,44	72,45	72,72
Bali	75,38	75,50	75,69
Nusa Tenggara Barat	68,14	68,25	68,65
Nusa Tenggara Timur	65,23	65,19	65,28
Kalimantan Barat	67,65	67,66	67,90
Kalimantan Tengah	70,91	71,05	71,25
Kalimantan Selatan	70,72	70,91	71,28
Kalimantan Timur	76,61	76,24	76,88
Kalimantan Utara	71,15	70,63	71,19

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Sulawesi Utara	72,99	72,93	73,30
Sulawesi Tengah	69,50	69,55	69,79
Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24
Sulawesi Tenggara	71,20	71,45	71,66
Gorontalo	68,49	68,68	69,00
Sulawesi Barat	65,73	66,11	66,36
Maluku	69,45	69,49	69,71
Maluku Utara	68,70	68,49	68,76
Papua Barat	64,70	65,09	65,26
Papua	60,84	60,44	60,62
Indonesia	71,92	71,94	72,29

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>. Diakses 7 November 2022.

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2021, IPM tertinggi terjadi DI Yogyakarta yaitu 80,22 % dan terendah di Papua yaitu 60,62 %. Hal ini berarti masih ada 19,78% warga DI Yogyakarta dan 30,38% warga Papua yang belum bisa memiliki akses terhadap hasil-hasil pembangunan. Untuk tingkat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 72,29, atau mengalami peningkatan 0,35 poin (0,49 persen) dari tahun 2020 yaitu 71,94 atau 28, 16% yang belum bisa menikmati hasil-hasil pembangunan.

IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu sumber data penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih pada tahap memadai yaitu 67,80% (Tingkat Partisipasi, 2020).

### 2.1.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menarik juga kita cermati angka partisipasi kasar (APK) untuk melihat jumlah anak yang sekolah dan kuliah berdasarkan usia, seperti pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 4: Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi**

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar ( A P K )								
	SD/MI/Paket A			SMP/Mts/Paket B			SM/SMK/MA/ Paket C		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Aceh	109,93	108,70	108,10	97,42	97,79	97,74	90,09	90,90	92,63
Sumatera Utara	109,49	108,53	107,85	90,38	91,68	91,87	94,04	94,68	96,75
Sumatera Barat	109,31	108,68	108,66	91,41	92,33	93,24	88,88	90,01	90,38
Riau	106,81	105,89	105,52	93,95	94,89	95,25	84,17	84,61	84,11
Jambi	111,11	109,39	109,48	87,31	88,91	88,96	82,50	83,71	84,47
Sumatera Selatan	113,30	111,58	111,39	86,97	88,78	89,44	80,85	81,73	82,30
Bengkulu	109,98	109,22	109,31	89,50	91,32	92,11	93,80	94,14	93,79
Lampung	107,36	105,93	105,63	91,11	92,56	93,12	85,73	85,84	88,38
Kep. Bangka Belitung	108,44	107,43	107,16	85,34	88,19	88,44	87,11	87,15	86,49
Kep. Riau	107,64	106,31	106,60	92,82	93,97	94,12	86,69	87,53	86,31
Dki Jakarta	104,83	103,43	103,17	91,02	91,74	91,56	74,77	76,87	77,08
Jawa Barat	105,52	104,72	104,57	90,75	91,75	93,33	77,82	78,26	78,10
Jawa Tengah	107,74	106,32	106,40	91,70	93,21	94,00	86,76	86,83	86,65
Di Yogyakarta	106,18	105,96	105,15	95,00	95,44	95,54	89,07	89,30	90,50
Jawa Timur	105,56	104,35	104,52	94,24	96,40	97,17	84,80	85,24	87,55
Banten	107,93	107,24	106,91	91,61	92,76	94,88	72,92	73,35	75,66
Bali	103,52	102,87	103,09	97,26	97,40	98,68	87,96	88,67	89,87
Nusa Tenggara Barat	108,50	107,02	107,23	92,07	93,59	93,72	90,86	91,77	93,75
Nusa Tenggara Timur	114,95	113,40	113,55	87,82	89,85	90,78	84,63	84,70	86,36
Kalimantan Barat	112,58	111,53	111,01	83,26	85,22	85,45	82,49	84,51	85,21
Kalimantan Tengah	110,05	108,49	108,21	88,74	90,61	91,07	82,27	82,29	83,07
Kalimantan Selatan	108,69	107,28	107,14	83,83	86,31	86,04	78,86	79,10	80,77
Kalimantan Timur	106,84	105,75	105,26	91,03	92,17	92,03	94,96	95,23	95,52
Kalimantan Utara	101,17	100,54	99,78	98,25	101,47	100,90	97,91	98,31	96,55
Sulawesi Utara	108,17	106,62	106,56	89,22	90,63	90,45	86,60	86,83	86,17
Sulawesi Tengah	105,13	103,95	103,68	90,63	91,98	93,17	87,35	88,42	88,06
Sulawesi Selatan	108,46	106,99	106,85	84,22	86,23	86,82	86,09	86,44	87,07
Sulawesi Tenggara	109,25	107,97	108,22	85,34	87,10	87,54	86,81	87,74	89,50
Gorontalo	110,88	109,48	108,44	78,95	79,25	79,37	88,64	88,65	87,97
Sulawesi Barat	107,32	106,05	105,09	82,71	84,67	85,27	84,10	84,36	87,81
Maluku	112,19	110,08	110,79	90,40	91,08	90,57	95,29	95,95	95,74
Maluku Utara	109,73	108,71	108,07	86,53	88,28	87,99	93,17	93,44	95,04
Papua Barat	111,24	110,17	111,02	88,49	90,79	90,55	96,41	97,72	97,25
Papua	91,94	91,27	93,07	78,11	81,24	81,68	76,33	76,55	75,05
Indonesia	107,46	106,32	106,20	90,57	92,06	92,80	83,98	84,53	85,23

Sumber: Bps-Ri, Susenas 2003-2017 Source Url: <https://www.bps.go.id/>

Indicator/28/303/1/Angka-Partisipasi-Kasar-A-P-K-,Html . Diakses 10 November 2022.

Data pada tabel di atas menunjukkan APK yang tinggi yaitu 106,20 % untuk usia SD, 92,80 untuk usia SMP dan 85,23 % untuk

usia SMA. Meskipun demikian APK akan terlihat berbeda bila kita melihat data per kabupaten. Misalnya untuk Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan berikut ini (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2022).

**Tabel 5:** APK Kabupaten Tapin

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD [7 - 12 Tahun]	-	114,23	113,90	-	110,93	114,81	-	112,66	114,35
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP [13 - 15 Tahun]	-	86,33	83,37	-	86,14	85,96	-	86,23	84,52
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA [16 - 18 Tahun]	-	75,61	66,59	-	55,56	59,63	-	65,08	63,10

Data pada tabel ini menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang sangat tinggi pada usia SD (114.35%) di tahun 2021, kemudian SLTP (84,52) dan semakin rendah pada usia 17-18 tahun (63.10%) di tahun 2021.

APK Perguruan Tinggi juga sangat rendah seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 6:** APK Perguruan Tinggi

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi		
	2019	2020	2021
Aceh	44,51	44,58	44,65
Sumatera Utara	30,82	31,14	31,10
Sumatera Barat	42,18	43,09	44,25
Riau	33,93	35,07	35,97
Jambi	30,71	31,42	30,74
Sumatera Selatan	25,59	26,41	26,32
Bengkulu	37,63	38,39	38,66
Lampung	21,98	23,08	22,64
Kep, Bangka Belitung	14,27	14,73	15,23

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi		
	2019	2020	2021
Kep. Riau	25,11	26,68	27,59
Dki Jakarta	39,43	40,34	40,05
Jawa Barat	25,15	25,75	25,83
Jawa Tengah	21,80	22,62	23,86
Di Yogyakarta	73,14	74,69	74,90
Jawa Timur	29,20	29,52	29,96
Banten	33,22	33,07	32,51
Bali	35,96	36,46	36,51
Nusa Tenggara Barat	30,70	31,28	32,26
Nusa Tenggara Timur	30,22	31,28	33,27
Kalimantan Barat	24,87	25,36	26,22
Kalimantan Tengah	25,45	25,70	26,46
Kalimantan Selatan	27,04	27,35	27,97
Kalimantan Timur	37,78	39,16	40,21
Kalimantan Utara	23,43	22,71	25,23
Sulawesi Utara	33,86	34,61	34,43
Sulawesi Tengah	38,64	39,32	40,11
Sulawesi Selatan	42,72	42,69	42,35
Sulawesi Tenggara	47,56	47,40	44,77
Gorontalo	36,71	37,74	37,32
Sulawesi Barat	30,85	29,44	30,15
Maluku	47,65	48,62	48,36
Maluku Utara	44,02	43,97	43,63
Papua Barat	34,83	35,30	35,80
Papua	21,08	21,87	20,04
Indonesia	30,28	30,85	31,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Perguruan Tinggi. (2022)

Url: <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html> . Diakses 12 November 2022.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa hanya satu provinsi yang APK nya melebihi 50%, yaitu DI Yogyakarta, yang mencatat APK tertinggi pada tahun 2021 yaitu 74,90 dan Kep. Bangka Belitung terendah pada tahun yang sama yaitu 15,23 %. Secara Nasional APK PT di adalah 31,19%. Dengan kata lain APK kita sangat tinggi pada

usia SD tetapi semakin menurun ketika SMP, SMA dan paling rendah pada usia kuliah.

#### 2.1.2.4 Kesenjangan Budaya

Mari kita merenungkan beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini yang mendemonstrasikan semakin lunturnya budaya Indonesia di kalangan masyarakat. Dilansir Kompas (Andre, 2022) bahwa telah terjadi tawuran geng pelajar di Bekasi yang menyebabkan satu orang tewas kena bacok. Peristiwa lain yang cukup mencemaskan masyarakat terjadi di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu yaitu *Klitih*. Kompas (Arieza, 6 April, 2022) memberitakan bahwa peristiwa *Klitih* terjadi di malam hari, yang menyebabkan korban jiwa akibat sabetan senjata tajam. Yang menarik adalah *Klitih* telah bergeser dari makna aslinya yaitu kegiatan mengisi waktu luang dengan bolak balik menjadi sebuah aktivitas yang cenderung negatif bahkan kriminal serta sering menelan korban jiwa, kata Sosiolog UGM Sunyoto Usman, dan Pranowo, Pakar Bahasa Jawa Universitas Sanata Dharma, seperti dilansir Kompas (Arieza, 6 April, 2022).

Budaya kekerasan sering terjadi pada mereka yang lebih lemah baik di masyarakat maupun di dalam lingkungan, sekolah maupun keluarga. Mengutip KPAI, Yasik (2015) mengungkapkan bahwa di tahun 2012 saja terdapat 2.637 kekerasan terhadap anak di daerah Jabodetabek dengan 157 meninggal dunia. Pertanyaan yang sering mengusik kita adalah mengapa terjadi begitu banyak peristiwa kekerasan di masyarakat yang justru bertentangan dengan nilai-nilai budaya nusantara dan merupakan sumber pembentukan ideologi Pancasila seperti gotong-royong, saling tolong menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama?

Seperti kita ketahui bersama bahwa budaya bangsa Indonesia telah secara lengkap dan padat dirumuskan dalam Pancasila oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Nurimaniar (2011) menegaskan:

Harus diakui, bahwa sebagian bangsa Indonesia telah melupakan Pancasila sebagai dasar Negara kita. Selain itu nilai ketimuran di Indonesia sudah mulai tergerus oleh perkembangan jaman dan lambat laun nilai-nilai barat merasuk dalam kehidupan bangsa Indonesia yang tentunya tidak semuanya sesuai dengan nilai ketimuran. Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua terutama generasi muda sebagai rakyat Indonesia untuk mengembalikan semangat Pancasila yang mulai hilang (hal. 7).

Lebih lanjut, Nurimaniar (2011) menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang belum sepenuhnya dihayati dan diamalkan oleh bangsa Indonesia. Misalnya terkait pengamalan Sila Pertama Pancasila. Pengamalan Pancasila masih mengalami tantangan dengan terjadi pertikaian antar umat beragama atau tindakan anarkis dengan membawa label agama, selain masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, konflik antar etnis maupun suku, rendahnya budaya musyawarah dan masih sulitnya akses pendidikan bagi rakyat kecil. Pusat informasi Kriminal Nasional (Pusiknas, .n.d) menegaskan perlunya perhatian serius semua pihak terkait kekerasan yang masih sering terjadi dalam dunia pendidikan karena akan berdampak pada perkembangan fisik, psikis dan karakter anak. Damanik (2019) menegaskan perlunya kerjasama semua pihak dalam menangani berbagai fenomena kekerasan yang dilakukan pelajar.

Lalu, apa yang menjadi tantangan pembudayaan Indonesia? Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), yang disusun di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017, merumuskan tujuh masalah pokok yang menjadi tantangan pembudayaan Indonesia (Strategi Kebudayaan, 2018, hal. 5-6) yaitu:

- 1) Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang ditandai dengan tindakan diskriminasi dan kekerasan kepada mereka yang lebih lemah dan dari golongan minoritas. Hal ini terjadi karena mudarnya wawasan dan identitas

- kebangsaan dan belum dipeluknya budaya inklusif pada tataran praksis.
- 2) Meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas. Kecepatan modernisasi di Indonesia berbanding lurus dengan kecepatan memudarnya tradisi dan hal ini tidak saja terjadi di kota tetapi juga hingga di desa-desa.
  - 3) Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Berkembangnya teknologi digital memungkinkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dilakukan secara *daring* tanpa interaksi fisik bahkan media informasi sering digunakan untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) dan mempertajam perbedaan bukannya sebagai sarana untuk mempertemukan budaya yang berbeda.
  - 4) Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia. Kebudayaan sering dilihat sebagai sumber pengeluaran dan bukan sebagai modal yang bisa mendorong kemajuan pembangunan. Hal ini terlihat dari minimnya investasi pada bidang kebudayaan yaitu 0,08 % dari total APBN.
  - 5) Belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal akibat eksploitasi sumberdaya alam, dari perkebunan tanaman ekspor sampai pada pertambangan mineral.
  - 6) Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan yang terlihat dari buruknya museum kebudayaan serta pengelolaannya dan minimnya tenaga yang terampil dalam bidang kebudayaan.
  - 7) Desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam layanan kebudayaan

Krisis kebudayaan yang terjadi di Indonesia dewasa ini telah coba direspons oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan yaitu dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar

Pancasila hendaknya dalam pelaksanaannya tidak bersifat formalitas belaka dan terpisah-pisah tetapi harus terintegrasi antara sila-silanya. Misalnya ketika seseorang melaksanakan sila pertama, apakah hal tersebut sudah menjiwai yang bersangkutan dalam hubungannya dengan pengamalan sila-sila yang lain atau sebatas ritual karena kewajiban. Bagaimana nilai-nilai manusia berkebudayaan nampak dalam Profil Pancasila sehingga membentuk insan yang kokoh karakter tetapi terbuka terhadap budaya luar yang berbeda dengan budayanya. Bila tidak hati-hati maka setiap daerah akan semakin mengentalkan budaya lokal padahal seharusnya bersifat *hybrid* dan terbuka.

Tantangan lain yang dihadapi dalam mengimplementasikan Proyek Profil Pelajar Pancasila adalah formalisme yang banyak mempengaruhi praksis pendidikan kita dewasa ini. Bila pengembangan Proyek Profil Pelajar Pancasila jatuh ke dalam formalisme (baca Priyatma, 2022) maka dapat dipastikan bahwa gagasan besar yang mengawali munculnya konsep itu tidak akan menjadi kenyataan.

Pertanyaan lain adalah bagaimana dengan pendidikannya? Kita tentu menyadari beberapa kasus yang terjadi di lingkungan persekolahan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dilakukan oleh pendidik. Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa seorang pendidik di Perguruan Tinggi, apalagi seorang Profesor, justru tidak mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan multikultural tetapi nilai-nilai primordial? Apakah tidak sebaiknya diperlukan Profil Guru dan Dosen Pancasila, misalnya sebagai syarat kenaikan jabatan akademik atau penerimaan sertifikasi? Bukankah hal ini sesuai dengan salah satu semboyan Ki Hadjar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan pimpinan) harus memberi teladan?

Terkait tantangan pendidikan kita dewasa ini, Slattery (2006) menyoroti gejala sekolah kontemporer, yang terlalu sering ditandai dengan kekerasan, kemacetan birokrasi, stagnasi kurikuler, evaluasi

tanpa personalisasi, konflik politik, krisis ekonomi, infrastruktur yang membusuk, kelelahan emosional, demoralisasi dan keputusasaan (hal. 21).

### 2.1.2.5 Kesenjangan Guru

#### 2.1.2.5.1 Kesenjangan Kesejahteraan

Mari kita merefleksikan isu pemerataan dan keadilan serta apresiasi yang sering menjadi kontroversial khususnya terkait tunjangan sertifikasi guru. Kita sering menyaksikan riak-riak kecil dari pada guru honorer yang meminta agar haknya sebagai guru dipenuhi seperti layaknya PNS lainnya. Kita juga menyadari bahwa masih ada cukup banyak *unsung heroes* yang bekerja di daerah pedalaman, mereka-mereka yang harus menempuh medan yang sulit dengan infrastruktur seadanya untuk melayani para siswa yang jauh dari sentuhan teknologi. Mungkin ada begitu banyak orang yang tidak pernah lulus ujian sertifikasi, yang bekerja dengan dedikasi tinggi untuk mengembangkan generasi muda. Mungkin mereka tak pernah punya akses yang memadai terhadap berbagai sumber belajar *online*. Mungkin mereka adalah para guru yang tidak tersentuh berbagai layanan pusat belajar dan pelatihan, dan berbagai pelatihan pengembangan di banyak tersedia di perkotaan. Mungkin mereka memang tidak memiliki waktu untuk memikirkan diri sendiri. Mungkin ada para guru yang mengabdikan puluhan tahun dan akhirnya pensiun tanpa pernah menerima tunjangan sertifikasi. Mungkin mereka adalah pendidik yang tidak bisa memberikan banyak *hard skills* ke para siswanya. Mungkin siswa mereka tidaklah menonjol hasil tesnya. Tetapi para guru ini mungkin telah mengajarkan kehidupan, ilmu tentang kehidupan dan menjadi teladan keuletan, kesederhanaan, dan kekuatan serta motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam segala keterbatasan dalam mencapai cita-cita. Mungkin dari tangan-tangan *unsung heroes* telah lahir orang-orang hebat di negeri ini yang kesuksesannya tidak terlihat instan ketika berada di

sekolah-sekolah mereka tetapi dampaknya justru *long lasting* (jangka panjang).

Saat ini masih banyak guru honorer atau guru yayasan non PNS yang kesejahteraannya cukup memprihatinkan dibandingkan guru PNS atau guru tetap di Yayasan yang cukup besar. Diberitakan oleh Gerry (2021) bahwa ada guru honorer yang sudah enam bulan belum menerima gajinya. Suprijadi (2018) menyatakan bahwa yang membedakan guru PNS dan Non-PNS bukanlah kualifikasi dan beban kerja tetapi kesejahteraan. Kemendikbud memberitakan bahwa 1,6 Juta Guru belum terima penghasilan layak (CNN Indonesia, 2022). Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa banyak guru, termasuk guru muda, yang tetap berpegang teguh dan berkomitmen pada profesinya meski kesejahteraan mereka kurang baik. Hal ini menegaskan lagi hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharismawan dan Mbato (2019) yaitu bahwa guru sulit meninggalkan profesi keguruannya meski mengalami banyak kendala karena mereka telah memutuskan untuk memeluk profesi tersebut sejak mengenyam pendidikan guru di bangku kuliah. Keputusan mereka menjadi guru merupakan keputusan altruistik yaitu karena keinginan untuk melayani orang lain meski mereka tetap membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan dan pemerintah untuk mempertahankan persepsi dan motivasi terhadap profesi keguruan (Lomi & Mbato, 2021). Selain itu, keputusan mereka menjadi guru merupakan sebuah proses konstruksi identitas profesional yang dinamis dan tidak stabil, dan dibentuk oleh tiga faktor yang saling terkait yaitu persepsi diri, lingkungan pendidikan, dan praktik mengajar (Triutami & Mbato, 2021).

Pemerintah dalam Naskah Akademik Sisdiknas Naskah Akademik (2022) sebetulnya telah menyadari betapa UU terkait tunjangan sertifikasi telah menyulitkan pelaksanaan sertifikasi yang berkeadilan. Yang pertama terkait guru PAUD:

Permasalahan kedua, perlakuan terhadap pendidik PAUD tidak konsisten dan tidak setara dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Walaupun pendidik pada PAUD formal diakui sebagai guru, pendidik PAUD nonformal belum diakui secara yuridis formal sebagai guru. Hal ini berdampak pada perbedaan tunjangan: guru PAUD formal berhak mendapatkan sertifikasi guru, sedangkan pendidik PAUD nonformal tidak. (hal. 118).

Terkait sertifikasi dan tunjangan sertifikasi, dijelaskan:

Pengaturan dalam UU Guru dan Dosen yang membatasi pemberian tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik perlu dikaji kembali. Pada hakikatnya, sertifikasi dan tunjangan memiliki tujuan yang berbeda. Sertifikat pendidik yang diperoleh dari penyelesaian PPG merupakan syarat untuk mengajar sebagai guru. Sedangkan tunjangan merupakan bagian dari penghasilan guru. Jika seseorang terlanjur bekerja sebagai guru tanpa sertifikasi, misalnya karena tidak adanya kewajiban sertifikasi sebelum terbitnya UU Guru dan Dosen atau karena keterbatasan kapasitas PPG setiap tahunnya, maka guru tersebut semestinya tetap menerima penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu sertifikasi. Pembatasan pemberian tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam UU Guru dan Dosen menyebabkan tujuan sertifikasi dan tujuan tunjangan keduanya tidak tercapai. (hal. 237-238).

Selanjutnya dijelaskan:

Penghasilan guru mengikuti dua Undang-Undang terkait ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ketenagakerjaan). Artinya, seorang guru aparatur sipil negara tidak perlu menunggu sertifikasi dan perlu langsung menerima tunjangan yang melekat pada gaji

aparatur sipil negara sesuai dengan pengaturan dalam UU ASN. Demikian pula dengan seorang guru pada satuan pendidikan swasta, tidak perlu menunggu sertifikasi dan perlu langsung menerima pengupahan yang layak sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan.

Kita berharap gagasan fundamental terkait sertifikasi yang muncul dalam Naskah Akademik menjadi bahan referensi pengambil kebijakan ke depan demi menciptakan lingkungan pendidikan yang berkeadilan termasuk keadilan finansial.

#### 2.1.2.5.2 Kesenjangan Pemerataan pendidikan

Meskipun Indonesia kini telah memasuki era Industri 4.0 bahkan menuju era Industri 5.0, masih banyak daerah di Indonesia yang belum menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Seorang guru di pedalaman Kalimantan (Ruma, n.d) menceritakan bahwa daerah pedalaman mengalami kurangnya guru yang mau mengabdikan di sana, selain fasilitas pendidikan yang minim dan banyaknya murid usia sekolah yang tidak bersekolah.

Jumlah guru layak mengajar sebanyak 2,91 juta orang pada tahun ajaran 2020/2021 atau 95,78% dari seluruh guru di Indonesia (Karnadi, 2021) dengan rasio 17. Rasio ini sudah sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yaitu 20, meski mayoritas guru masih berkonsentrasi di Pulau Jawa (Mahdi, 2021).

#### 2.1.2.6 Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital menjadi salah satu isu penting dalam penerapan teknologi di Indonesia termasuk dalam dunia pendidikan. Meski menjanjikan, jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menjalankan usahanya secara digital baru berkisar 20,45% (Dyah, 2021) dan 20,2 juta atau 34% dari 64 juta untuk pelaku UMKM (4 Tantangan UMKM, 2022). Dalam bidang pendidikan, diberitakan bahwa hanya 60% guru

belum siap dengan teknologi selain kendala jaringan dan kesenjangan generasi antara guru dan siswa (Purba, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Budiraharjo (2022) mengungkapkan bahwa guru-guru di NTT mengalami kesulitan terkait penggunaan teknologi dan perangkat pembelajaran siswa yang kurang memadai sehingga mempengaruhi pembelajaran efektif. Seperti disampaikan Destalino, Seorang Guru di daerah 3T:

Tugas guru di daerah khusus (3T) sangatlah berat, di samping harus mentransfer pengetahuan dengan segala keterbatasan juga di perhadapkan dengan keadaan geografis yang terkadang sangatlah berbahaya ditambah lagi beban ekonomi keluarga karena biaya yang ditanggung untuk menuju lokasi kerja (n.d.).

Meskipun demikian, seperti diberitakan Jakarta Post (Jesemann, 2022) bahwa operator jaringan seluler di seluruh Indonesia telah menutup jaringan dan layanan 3G dan beralih ke 4G *Long-Term Evolution (LTE)*, dengan 5G sebagai akan dimulai di awal tahun depan. Harapannya adalah teraksesnya jaringan 4G di seluruh daerah terpencil dan kecamatan di Indonesia. Tentu kita berharap bahwa hal ini akan mereduksi *Digital Gap* karena kesenjangan digitalisasi bisa menimbulkan dan memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi (Setiawan dkk, 2022).

Tantangan bagi bangsa Indonesia termasuk mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan adalah bagaimana menyiasati *digital disruption* menjadi *digital transformation*. Transformasi digital adalah fenomena mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek bisnis, organisasi, atau administrasi publik, dan itu terjadi dengan cepat. Transformasi digital terkait erat dengan disrupsi digital, yang terjadi ketika inovasi teknologi menggoyahkan lingkungan bisnis dan mengikis *status quo*. Ponsel cerdas adalah salah satu teknologi baru yang membuat banyak teknologi lain menjadi usang (IEEE Digital Reality, 2022).

Setiap pemimpin dan para manajer dihimbau untuk memikirkan kembali keterampilan mereka (D'Amato, 2022). Sementara itu, Law dan Zentner (2012) menekankan perlunya fleksibilitas model dan strategi yang digunakan dalam merespons disrupsi pasar. Dalam hal ini, teknologi baru perlu dilihat bukan sebagai disrupsi melainkan sebagai kesempatan untuk menciptakan ekonomi baru serta pendekatan dan prinsip industri digital baru (Shvidanenko dkk, 2020). Dalam dunia pendidikan, era disrupsi seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk mempelajari strategi dan inovasi baru seperti halnya blended learning (Wintarti dkk, 2019). Dengan kata lain kita hendaknya memperlakukan disrupsi digital menjadi transformasi digital.

#### 2.1.2.7 Konstruksi Identitas Guru Profesional

Mengubah paradigma pembelajaran: bukan lagi content delivery karena sumber belajar. Berikut penulis menyajikan beberapa tantangan yang dihadapi guru dan pendidik Indonesia ke depan dalam mengkonstruksi identitas profesional. Pengembangan pendidikan berkualitas tidaklah terlepas dari tersedianya pendidik berkualitas. Tantangan bagi pendidikan guru ke depan adalah bagaimana mereka memikirkan secara sungguh-sungguh desain pendidikan yang mampu mendorong guru untuk meningkatkan identitas professional mereka dengan kelengkapan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta kemelekhan teknologi yang tinggi atau *TPACK* (Voogt & McKenney, 2016) karena guru berkualitas akan memampukan mereka untuk menerapkan kebijakan pendidikan berkualitas (Ryke dkk, 2021). Sementara itu, saat ini rata rata kompetensi guru adalah 50,64 (Kemendikbudristek Ungkap, 2022).

Dalam penelitian terkait guru-guru SMK (Sasmito dkk, 2020) ditemukan bahwa kualitas guru SMK dapat ditingkatkan melalui efikasi diri dan ketrampilan-ketrampilan yang dapat ditransfer selain pengalaman awal dan pengalaman mengajar. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan tercipta bila pemimpin mereka meningkatkan efikasi diri dalam tim dengan menggunakan konsep

pengembangan tim kepemimpinan dan komunitas pembelajaran yang bertujuan (Hill & Lundquist, 2008). Selain itu budaya pembelajaran profesional dan konektivitas dapat meningkatkan efikasi diri para guru dan mendukung pembelajaran Siswa (Battersby & Verdi, 2014).

Dalam penelitian lain, Suryani (2020) menegaskan bahwa guru berkualitas tinggi di Indonesia dapat tercapai melalui perbaikan kriteria seleksi penerimaan guru, penguatan program induksi guru, dan penyempurnaan kualitas lembaga pelatihan guru. Sementara itu, Lomi dan Mbato (2020) menemukan dua tantangan yang dihadapi guru-guru pemula (novice) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun identitas profesionalnya di tengah minimnya fasilitas dan sumber belajar yaitu: 1) tantangan internal terkait dengan bagaimana guru mengendalikan emosinya, efikasi diri dan kemampuan untuk mengajar; dan 2) tantangan eksternal terkait dengan pengelolaan kelas, kemampuan, dan sikap siswa, kurangnya sumber daya dan fasilitas di sekolah, hubungan dengan rekan kerja dan gaji mereka. Dalam penelitian pada dua sekolah berkebutuhan khusus di Yogyakarta, Yupa dan Mbato (2020) menemukan bahwa baik faktor intrinsik seperti keinginan untuk membantu siswa berkebutuhan khusus untuk lebih mandiri, dan faktor ekstrinsik seperti keluarga, siswa, dan rekan mempengaruhi motivasi guru untuk mengajar di sekolah berkebutuhan khusus di Yogyakarta. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam mengembangkan dan membentuk identitas guru.

Sementara itu, penelitian terhadap strategi guru pemula dan guru berpengalaman mengubah kerentanan mereka menjadi identitas profesional yang dilakukan Florida dan Mbato terhadap guru-guru sebuah SMP di Kupang, NTT (2020) menunjukkan bahwa tanpa refleksi dan tindakan kritis (*critical incident*), baik guru pemula maupun berpengalaman dapat mengalami kelelahan ketika berhadapan dengan kerentanan mereka. Dari penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa refleksi dan pemaknaan pengalaman secara kritis akan membantu para guru dari menangani kerentanan mereka agar

tidak terjadi *burnout* (kelelahan). Kemampuan ini akan membuat guru mampu mengelola emosi secara tepat ketika berhadapan dengan berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka (Jennifer & Mbato, 2020). Kemampuan mengelola emosi membuat mereka lebih banyak mengalami kebahagiaan dalam menekuni profesinya daripada perasaan marah (Nugroho & Mbato, 2021).

Penelitian terhadap guru-guru tidak tetap di lima sekolah di daerah terpencil Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan (Upa dan Mbato, 2020) menunjukkan bahwa tanpa ketangguhan, para guru tidak bisa bertahan mengajar di daerah tersebut. Sumber daya pribadi dan sumber daya kontekstual tampaknya memainkan peran utama dalam pertumbuhan ketahanan mereka. Resiliensi guru yang tinggi membentuk identitas profesional mereka, yang membuat mereka tetap bertahan dan berpikir bahwa mengajar adalah panggilan mereka. Maka sudah seyogyanya kita memikirkan secara serius strategi-strategi jitu agar para guru kita menjadi guru yang resilien (tangguh) dan tidak hanya mengeluh dan mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian yang dilakukan Mbato dan Triprihatmini (2022) terhadap calon guru menunjukkan bahwa persepsi tentang profesionalisme guru sebelum, selama dan setelah mengajar meningkat sejalan dengan meningkatnya persepsi mereka tentang kesadaran metakognitif dalam mengajar dan bahwa refleksi dipersepsikan sebagai pendekatan yang positif dalam meningkatkan kesadaran metakognitif guru dalam mengajar.

Tantangan pendidikan guru dan pengembangan guru masa kini adalah bagaimana mereka mampu mengembangkan kesadaran metakognitif dalam pengajaran karena dengan kesadaran ini mereka akan menjadi guru yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam melakukan aktivitas kognitif yaitu merencanakan, melaksanakan, memonitoring, memecahkan masalah dan mengevaluasi pembelajaran baik pada tataran *lower order thinking* (LOTS) maupun *higher order thinking* (HOTS). Memiliki kesadaran metakognitif

tinggi sangatlah penting karena guru di abad 21 ditantang untuk mendesain tugas-tugas pembelajaran tingkat yang lebih tinggi (HOTS) (Ginting & Kuswandono, 2020).

Seperti yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya bahwa satu strategi pendidikan guru ke depan adalah membantu mereka untuk mengembangkan kesadaran metakognitif dan juga regulasi diri.

#### 2.1.2.8 Pesan Reflektif

Disparitas berbagai aspek dapat menimbulkan kesenjangan dan kesenjangan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan pada mereka yang mengalaminya secara langsung. Karena bersama pemerintah, kita hendaknya terus berjuang dan bekerjasama agar pembangunan ke depan semakin berkeadilan sehingga siapapun dan dimanapun seseorang lahir dan hidup, selama Ia merupakan warga negara Indonesia, Ia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan termasuk fasilitas belajar berkualitas yang memadai seperti layaknya dialami mereka yang berdiam di perkotaan.

#### 2.1.2 Pencarian Jati Diri Pendidikan Indonesia

Mempelajari sejarah berarti mempelajari perubahan. Mempelajari sejarah membantu kita memahami dan bergulat dengan pertanyaan dan dilema yang kompleks dengan mencermati bagaimana masa lalu telah membentuk (dan terus membentuk) hubungan global, nasional, dan lokal antara masyarakat dan manusia. Karena sejarah memberi kita alat untuk menganalisis dan menjelaskan masalah di masa lalu, sejarah memposisikan kita untuk melihat pola yang mungkin tidak terlihat di masa sekarang – sehingga memberikan perspektif penting untuk memahami (dan memecahkan!) masalah saat ini dan masa depan (Department, n.d.).

Bagian dimaksudkan untuk memberikan tinjauan historis sekilas tentang Pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat

ini. Ulasan ini tidak bertujuan untuk menggantikan buku-buku sejarah pendidikan di Indonesia, yang jumlahnya tentu sudah sangat banyak, tetapi hendak membangkitkan kesadaran pembaca bahwa pendidikan Indonesia yang kita jalani sekarang ini dan akan datang merupakan bukti keberhasilan bangsa kita yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkontribusi bagi kecerdasan bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia bahkan sejak zaman kolonial. Karena itu penulis mendorong semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk melihat yang lainnya sebagai kolaborator sesuai semangat gotong-royong dan bukan sebagai pesaing.

Dengan semangat ini, penulis akan secara gamblang menyajikan perjalanan pendidikan dan persekolahan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga awal kemerdekaan yang dirangkum dari berbagai sumber. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa tinjauan sejarah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi referensi holistik mengenai sejarah pendidikan tetapi bertujuan untuk membantu pembaca memahami bahwa pendidikan yang kita nyam sekarang dan akan datang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dan menjadi saksi dari kontribusi berbagai pihak dan elemen masyarakat demi kemajuan bersama. Bagian ini diakhiri dengan ulasan tentang pencarian jati diri kurikulum Indonesia saat ini dan pesan reflektif untuk menghadapi tantangan pendidikan ke depan.

### 2.1.2.1 Belajar dari Perjuangan Pendidikan Indonesia Masa Lalu

Pendidikan di Indonesia telah dimulai pada zaman Hindu-Budha yang bisa terlihat dari sumber-sumber tertulis yang didampingi pula oleh data visual dari relief-relief bercerita seperti tampak pada candi-candi (meskipun hanya kalangan bangsawan). Pesantren merupakan sistem pendidikan pribumi tertua di Indonesia dengan pendidikan padepokan yaitu Guru dan semua murid tinggal di situ. Pendidikan pesantren merupakan salah satu contoh pendidikan merdeka karena tidak bergantung pada bantuan Belanda serta secara

mandiri berorientasi pada pengembangan agama, moral dan intelektual (Aufi, 2019; Tifada & Winardi, 2022). Pendidikan pesantren sendiri merupakan warisan dari pengaruh Hindu karena di banyak negara Islam tidak terdapat pesantren. Pesantren tertua adalah pesantren Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren Tegalsari yang didirikan oleh Sultan Paku Buwono II tahun 1742 sebagai ucapan terima kasih kepada Kyai Hasan Besari (Asal Usul, 2018). Data lain menyebutkan bahwa pesantren ini didirikan pada tahun 1870 (Muwaffaq, 2020). Pada 1851, Pemerintah daerah untuk pantai Barat Sumatera segera mendirikan sekolah-sekolah bumi putera disusul Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada tahun 1853. Akhirnya pada tahun 1854, pemerintah hindia Belanda menginstruksikan pendirian sekolah untuk pribumi di setiap Kabupaten (Warta Sejarah, n.d.).

Meskipun pesantren merupakan sekolah pribumi tertua di Indonesia, Wirachmi (2022, 11 Juli) menjelaskan bahwa sekolah pertama di Indonesia adalah Sekolah Katolik yang semula didirikan oleh Portugis pada abad ke-16 (tahun 1546) di Maluku, Ambon, Maluku dimana penduduknya telah memeluk agama Katolik Roma. Sekolah ini bertujuan untuk mengajar membaca, menulis dan berhitung. Di sekolah Katolik itu, mereka mendapat pelajaran agama dan dilengkapi dengan pelajaran baca, tulis, berhitung dan pemahaman bahasa Latin (Wirachmi, 2022).

Kemudian, ketika Belanda mulai melakukan ekspansi ke Indonesia, kegiatan pendidikan oleh Portugis berhenti dan digantikan oleh sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Sejak tahun 1627, Belanda memperluas pendidikan di Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta. Pada awal abad ke-19, Belanda mendirikan hingga 20 sekolah untuk Indonesia. Sejak tahun 1899, pada masa pemerintahan Ratu Juliana dari Kerajaan Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Deventer memperkenalkan politik etis di Indonesia. Salah satu pedoman Kode Etik adalah pendidikan. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Belanda mendirikan beberapa sekolah bagi penduduk asli, baik di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah

pertama, dan sekolah menengah atas. Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai semakin maju pada awal tahun 1900-an. Secara umum sistem pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda dilaksanakan sebagai berikut. Perbedaan perilaku terhadap masyarakat adat tetap penting. Hal ini tercermin dari perbedaan kemungkinan penerimaan antara kelas atas dan bawah. Beberapa sekolah masih sulit dimasuki oleh masyarakat kelas bawah karena berbagai regulasi. Hal ini dilakukan dengan sengaja agar penduduk asli hanya menempati sekolah tingkat bawah (Wirachmi, 2022).

Sistem pendidikan formal pun mulai didirikan di Indonesia pada abad 19 dan awal abad ke 20 yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS) atau sekolah dasar bagi orang Eropa, *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) atau sekolah dasar bagi pribumi, *Hollandsch Chineesche School* (HCS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) (SMP), *Algemene Middelbare School* (AMS) (SMU), *Schakel School* (sekolah rakyat yang ada di desa dan setara HIS), dan *School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* (STOVIA) yaitu sekolah pendidikan dokter Djawa yang kemudian menjadi sekolah dokter bagi anak-anak pribumi. Melalui Stovia ini yang didirikan pada tahun 1851 lahir pada berbagai gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa yang berjuang bukan dengan kekuatan fisik tetapi secara intelektual diantaranya Budi Utomo, Jong Sumatranen, Jong Ambon (Welianto, 2020).

Tercatat tanggal 17 Maret 1901, berdiri Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) yang merupakan sebagai sekolah swasta modern pertama yang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa (Nabila, 2021). Sejarah Pendidikan Nasional Zaman Kolonial: Pemerintah Belanda membolehkan pendidikan dokter Jawa. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah Budi Utomo atas inisiatif dr. Wahidin Soedirohoesodo yang ingin meningkatkan martabat bangsanya melalui pengajaran (Sejarah Berdirinya Budi, n.d.). Tanggal 11 Desember 1911 di Kauman Yogyakarta, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang merupakan sekolah berbasis Muhammadiyah pertama (Hidayatullah, 2002).

Sekolah pertama yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan ini dibuka di rumahnya dengan sistem Barat, memakai meja, kursi, dan papan tulis.

Tahun 1912 Pihak Yayasan Kartini mendirikan Sekolah Kartini di Semarang yang merupakan sekolah putri dan menampung sekitar 112 orang siswa dengan lama pendidikan dua tahun (Anjani, 2022).

Tokoh utama pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hajar yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli tahun 1922 (Wirachmi, 2022). Untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan maka peran guru sangatlah penting yaitu depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selain itu Beliau menekankan pentingnya budi pekerti yang ketrampilan untuk menggunakan pikiran, perasaan, serta standar yang tidak berubah dalam berkata maupun bertindak. Beliau juga menekankan bahwa pendidikan yang memerdekakan, baik kemerdekaan lahiriah maupun batiniah, ditandai dengan kemampuan seseorang menguasai diri dan sekaligus menghormati kemerdekaan orang lain (Gitiyarko, 2021; Sambo dan Yasunari, 2010). Tahun 1922 lahirlah taman siswa di yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa dengan tokoh utamanya Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan sebagai sarana untuk memerdekakan bangsa.

Bagi Beliau Pendidikan sebagai sarana memerdekakan dari kolonialisme. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa pendidikan hanya bertujuan menuntun kodrat pada diri anak dan peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa pendidikan hanya bertujuan menuntun kodrat pada diri anak dan peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 (Wirachmi, 2022). Yang menarik adalah pada masa kolonial ini, pendidikan Katolik juga turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah Yayasan Kanisius yang merupakan

Yayasan Pendidikan Katolik tertua di Jawa, dan didirikan oleh Fransiskus van Lith, S.J., pada tahun 1918 (SMA Kanisius, 2022).

### 2.1.2.2 Mencari Jati Diri Kurikulum Pasca-Kemerdekaan

Pendidikan pada masa kolonial, dan mungkin masih terjadi hingga kini, sering ditandai dengan *null curriculum* yaitu kesempatan belajar yang hilang. *Null curriculum* (kurikulum nol) mengacu pada hal-hal yang siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Dalam hal ini, peserta didik mempelajari sesuatu berdasarkan ketiadaan pengalaman, interaksi, dan wacana tertentu di dalam kelas. Dengan kata lain, apa yang tidak ada dalam kurikulum sebenarnya ada dalam apa yang dipelajari siswa (Kazemi dkk, 2020), seperti muatan lokal, budaya lokal, agama lokal dan sebagainya, baik dalam konteks pendidikan formal maupun, non-formal maupun informal.

Dalam penelitian oleh Sholeha dan Setiawati (2019) ditemukan bahwa pendidikan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1900-1942 sangatlah terbatas dan hanya disediakan bagi ras atau orang yang memiliki kedudukan sosial atau etnis tertentu. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), pendidikan berorientasi semi-militer meski terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penelitian mereka, disimpulkan bahwa pendidikan pada masa kolonial lebih diprioritaskan untuk kepentingan kekuasaan, ekonomi dan politik daripada berorientasi pada kemanusiaan, meskipun pada masa penjajahan Belanda terjadi peningkatan jumlah sekolah dasar dan dihapuskan diskriminasi terhadap pribumi dengan diberlakukannya sekolah dasar selama enam tahun (Adryamarthanino, 2021).

Pasca kemerdekaan, kurikulum dirancang demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Hal ini terlebih pada masa orde baru yang ditandai dengan pembagian jurusan menjadi jurusan IPA IPS Bahasa yang tentu berbeda dengan Liberal Arts Education dimana semua mata pelajaran dipelajari semua. Ada berbagai kelompok yang maju bersama dengan cara-cara sendiri untuk a dalam mengembangkan pendidikan mosaik di Indonesia. Ada pendidikan lama di pesantren

(NU) yang memiliki kekhasan tersendiri dan juga pendidikan muhammadiyah. Ada kelompok Kristen bersamaan dengan datangnya Misi pendidikan di Indonesia. Misalnya Kolese Kanisius Jakarta Kanisius sudah 100 tahun berkarya di Indonesia. Melihat besarnya kontribusi sekolah-sekolah swasta pada masa pra dan awal kemerdekaan Indonesia maka sudah sewajarnya bahwa pemerintah memperlakukan mereka sebagai mitra bukan sebagai kompetitor.

Anwar (2020) dan Mukminin dkk (2019) mengungkapkan bahwa hingga kini terdapat sepuluh kurikulum yang sudah diberlakukan di Indonesia yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013. Kurikulum 1947, dengan silabusnya disebut Jadwal, difokuskan pada pembentukan karakter bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaulat dengan Pancasila menjadi asasnya. Kurikulum 1952 dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai dan difokuskan pada kehidupan sehari-hari dengan setiap guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964, lebih dikenal dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964, menitikberatkan pada Pendidikan SD dengan Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kaparigelan (keterampilan), dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan produk kurikulum pertama Era Soeharto dan menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan dari UUD 1945 dan bersifat teoritis serta penguasaan materi. Kurikulum 1975 bertujuan untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien dan dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) atau satuan pelajaran. Kurikulum 1984 menitikberatkan pada keahlian dengan siswa menjadi atau sering disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Kurikulum 1994 adalah perpaduan Kurikulum 1975 dan 1984 yang menitikberatkan pada integrasi antara tujuan dan proses namun menuai banyak kritikan karena terlalu banyak muatan lokal dan nasional. Kurikulum 2004 atau sering disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menekankan pada kompetensi, indikator-indikator pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran.

Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengusung semangat desentralisasi sistem pendidikan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan pemerintah pusat menetapkan sedangkan guru mengembangkan sendiri silabus dan penilaian. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan pendekatan saintifik memberi perhatian pada pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap (Anwar, 2020) yang kemudian dikembangkan menjadi kurikulum merdeka.

### 2.1.2.3 Kurikulum Dewasa ini

Saat ini Indonesia sedang menerapkan Kurikulum 2013 yang kemudian dikembangkan menjadi Kurikulum Merdeka dengan penekanan pada capaian pelajaran melalui pembelajaran terdiferensiasi, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, asesmen formatif dan pemberian otonomi kepada guru mengembangkan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan berbagai panduan yang telah disediakan pemerintah (Wulandari, 2022). Perubahan yang paling mencocok pada Kurikulum Merdeka adalah dihapuskan ujian nasional dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) meski ada beberapa daerah tertentu yang masih menyelenggarakan ujian serentak berbasis daerah untuk menentukan kelulusan dan nilai siswa. Selain itu untuk level SMA tidak akan ada lagi peminatan IPA, IPS dan Bahasa. Pada tingkat perguruan tinggi salah satu penerapan Kurikulum Merdeka yang paling mencolok adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh perkuliahan di luar program studinya baik di Universitasnya maupun di Universitas lain. Secara prinsip, Kurikulum Merdeka memiliki kemiripan dengan pedagogi kritis Paulo Freire karena penekanannya pada kemandirian siswa dalam belajar (Madhakomala dkk, 2022) meskipun kurang siapnya guru dalam menerapkan teknologi dan tantangan dalam menerapkan Proyek Penguatan Pelajar Pancasila (Purba, 2022).

Kebijakan pemerintah yang membolehkan sekolah memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum 2013 bahkan kurikulum darurat telah menimbulkan gejala di antara para guru mengingat muatan konten dan tagihan proyek yang berbeda di antara ketiga kurikulum ini. Kontroversi lain yang muncul adalah penerapan Kurikulum Merdeka hanya diberlakukan pada 2.500 sekolah penggerak yang merupakan pilihan dari Kemendikbud Ristek dengan masing-masing memperoleh bantuan subsidi hingga Rp100 juta. Kemewahan ini tidak dinikmati oleh sekolah non-penggerak bahkan ketika sekolah-sekolah tersebut diperbolehkan menggunakan kurikulum merdeka (Firmansyah, 2022). Selain itu, penerapan kurikulum merdeka tanpa diawali dengan pelatihan para guru melainkan guru dipersilakan untuk mempelajari sendiri melalui platform Merdeka Mengajar sementara 60% guru di Indonesia masih terbatas dalam penguasaan teknologi (Purba, 2022). Karena itu kurikulum kita hendaklah tidak terjebak pada formalisme dimana para pelakunya menghabiskan banyak waktu untuk pemenuhan tuntutan administratif tanpa mendapatkan makna yang sesungguhnya dari apa yang dikerjakan bahkan mengabaikan esensi dari pendidikan itu sendiri (Priyatma, 2022).

Kurikulum Merdeka dengan tegas menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah berbasis *student centred* (berpusat pada siswa) dengan memberikan penekanan pada *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), *Problem-solving*, Proyek dan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun dalam prakteknya, pembelajaran di banyak sekolah masih berpusat pada guru dan lebih ditekankan pada penyelesaian materi daripada pengembangan HOTS dan 4 Skills. Salah satu tantangan pelaksanaan kurikulum merdeka adalah banyaknya guru yang tidak begitu mengenal kurikulum tersebut selain tentunya sarana prasarana sekolah yang belum memadai (Kurikulum Merdeka Beri Kebebasan, 2022). Selain itu seperti diutarakan sebelumnya bahwa guru berkualitas masih terpusat di kota-kota besar

terutama di Pulau Jawa serta minimnya pelatihan dan *learning community* secara berkelanjutan bagi guru-guru.

Dari tinjauan sekilas sejarah pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dan persekolahan di Indonesia seperti yang kita jalani sekarang ini dan bahkan di masa mendatang tidaklah terlepas dari keterlibatan begitu banyak pihak baik secara individu maupun dari berbagai kelompok swasta, etnis dan agama. Semua pihak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berupaya untuk berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Keterlibatan masyarakat ini diakui secara konstitusional di dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Secara realitas, di banyak wilayah Indonesia, keberadaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bahkan lebih dulu daripada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan ini kadang kurang mendapat dukungan dari pemerintah, bahkan terasa seperti kompetitor ketika sekolah-sekolah pemerintah menambah kapasitas kelas dan guru-guru ASN ditarik dari sekolah swasta dan dipindahkan ke sekolah pemerintah.

Karena itu, sudah sewajarnya kita berkolaborasi sebagai mitra dengan tidak mempertajam dikotomi antar lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Mengutip BPS, Mahdi (2021) mengatakan bahwa terdapat lebih banyak sekolah negeri untuk SD dan SMP. Sedangkan jumlah SMA Swasta unggul sedikit dari sekolah negeri. Sementara itu SMK Swasta jauh lebih banyak dari SMK Negeri. Perlu kita sadari bahwa saat ini Perguruan Tinggi Swasta jumlahnya justru melebihi PT Negeri yaitu sebanyak 3.792 dan 183, dengan sebagian besar diantaranya berada di Jawa (Rizaty, 2022).

## 2.2 Tantangan Pendidikan dalam Konteks Global

### 2.2.1 Liberalisasi Pendidikan?

Dalam konteks global, salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan adalah internasionalisasi. Tentang globalisasi pendidikan, Shirley (2016, hal. 3) menegaskan:

Berakhirlah sudah hari-hari ketika perbandingan pendidikan dibatasi untuk kota, negara bagian, atau provinsi dalam negara. Penetapan kebijakan pendidikan telah mengglobal dan merupakan bisnis besar, dengan perusahaan berfokus pada keuntungan yang dapat mereka hasilkan dan dampak yang dapat mereka capai setelah mendeteksi peluang baru untuk peningkatan dan inovasi sekolah dengan teknologi baru di seluruh dunia.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang didirikan pada tahun 1 Januari 1995, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, memprioritaskan privatisasi termasuk dunia pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari keanggotaan Indonesia dalam WTO maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Bab VII Bidang Usaha Pasal 12 ayat 1 disebutkan “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal” termasuk modal asing dimana didalamnya termasuk pendidikan (Murtiningsih, 2022).

Isu liberalisasi pendidikan juga merebak dengan adanya UU terkait otonomi pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 50 Ayat (6) menegaskan kewenangan Perguruan tinggi untuk menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Otonomi yang dimaksudkan tidak saja otonomi akademik tetapi juga otonomi untuk mengelola dana secara mandiri (non akademik) (UU Dikti No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Karena itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus

berbadan hukum (Pasal 53 Ayat (1) dan memiliki kemandirian untuk mengelola keuangannya (Pasal 64 Ayat 3) (Murtiningsih, 2022).

Pertanyaan yang mengusik kita semua adalah sejauh mana keberimbangan dukungan pemerintah terhadap privatisasi PTN dan PTS, yang selama ini sudah bersama-sama PTN mengembangkan dunia pendidikan dan pembangunan Indonesia? Salah satu hal yang dikhawatirkan banyak orang terkait liberalisasi pendidikan adalah bahwa pendidikan akan dikelola berdasarkan kepentingan pasar. Kalau itu kepentingan pasar maka orientasinya adalah keuntungan dan agar memperoleh keuntungan maka perlu investasi yang besar. Semakin besar investasi maka pendidikan akan semakin mahal sehingga yang bisa mengakses pendidikan yang berkualitas hanya mereka yang beruang. Selain itu, isu liberalisasi pendidikan juga muncul terkait akreditasi yang diarahkan untuk dikelola oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yaitu soal pembiayaan dan kedua soal kebebasan LAM dalam menentukan hasil akreditasi ketika Perguruan tinggi membayar mahal. Apakah LAM dapat melakukan akreditasi dan memberikan peringkat secara bebas?

Pendekatan berbasis pasar ini mencakup nilai-nilai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi menilai kekuatan indikator keuangan dan lapangan kerja sebagai metrik untuk kesehatan suatu bangsa; (2) produktivitas yang menilai intensitas produksi berdasarkan tenaga kerja dan jam terlibat dalam aktivitas; dan (3) efisiensi berfokus pada penghematan biaya, seperti konsolidasi dan standarisasi akreditasi dan kurikulum guru (Tyack & Cuban, 1995). Bahasa yang digunakan dalam kebijakan pendidikan yang dikendalikan pasar adalah bahasa keunggulan, persaingan, dan kualitas (Mitra, 2022, hal. 5). Kelly (2004) mengingatkan kita bahwa dalam sejarah, bahkan sejak Plato, manusia telah menggunakan isu-isu pendidikan untuk kepentingan politik dan juga setiap model kurikulum merefleksikan ideologi pendidikan bahkan politik.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tampaknya telah mengantisipasi liberalisasi baru, misalnya dengan adanya Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Asing (JDIH BPK, 2017). Selain itu, pemerintah masih memegang teguh berbagai produk UUD dan UU terkait keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Selain itu berbagai terobosan afirmatif untuk memastikan keadilan dalam menikmati pendidikan juga terus dilakukan pemerintah dan berbagai pelaku pendidikan lainnya, misalnya melalui penyediaan kuota, pemberian beasiswa dll. Dalam menyikapi isu ‘neoliberalisme’ baik kita mengutip penegasan Freire (2000) bahwa yang perlu kita waspadai adalah sebuah sistem pendidikan yang fatal dan kaku yang menghalangi anak-anak Indonesia untuk bermimpi, untuk memiliki cita-cita yang tidak selalu sejalan dengan tuntutan industri maupun pasar.

### 2.2.2 Menaikkan Daya Saing

Seperti dikemukakan di atas bahwa tidak ada satu provinsi pun yang APK PT-nya melebihi 50%, dengan Maluku mencatat APK tertinggi pada tahun 2021 yaitu 48,36% dan Kep. Bangka Belitung terendah pada tahun yang sama yaitu, 15,23. Secara Nasional APK PT di adalah 31,19%. Dengan kata lain APK kita sangat tinggi pada usia SD tetapi semakin menurun ketika SMP, SMA dan paling rendah pada usia kuliah. Ini berarti kalau kita melihat lulusan PT sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan jaminan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja maka bangsa kita masih harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan partisipasi warganya untuk berkuliah di PT.

Dengan kata lain, meskipun TPAK lumayan tinggi 67,80% (BPS, 2020), kebanyakan dari mereka bukanlah lulusan PT. Dan mungkin banyak dari mereka tidak mengambil posisi yang cukup tinggi dalam pekerjaannya. Artinya, kita perlu semakin lebih kompetitif agar pekerjaan-pekerjaan strategis tidak diambil alih oleh pekerja-pekerja asing yang mungkin memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

### 2.2.3 Persaingan dalam Semangat Kolaborasi

Arus globalisasi dalam semua bidang kehidupan semakin sulit kita bendung. Bangsa kita adalah bagian penting dari bangsa-bangsa di dunia yang terhubung satu sama lain antar lain berkat kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi. Bagi bangsa kita yang merupakan pemain penting dalam berbagai organisasi dunia seperti G-20, WTO, dan AFTA yang terpenting adalah meningkatkan daya saing dalam semangat kolaborasi yang saling menguntungkan. Untuk itu yang terbaik adalah kita terus meningkatkan SDM kita dan memastikan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menikmati pendidikan berkualitas dan berkeadilan sesuai UUD 45 dan UU serta Peraturan turunannya. Kita juga harus memastikan bahwa bangsa kita haruslah menjadi tuan rumah di negara sendiri agar pekerjaan-pekerjaan kita tidak diambil alih pihak asing sambil terus memastikan adanya asas keadilan dalam hal ketersediaan fasilitas dan penghargaan, termasuk penggajian, untuk pekerjaan yang sama, yang dilakukan pekerja asing. Ke mana arah pengembangan perguruan tinggi di Indonesia? Apakah akan mengikuti persaingan global: Riset dan publikasi yang mengejar ranking dunia dan mengajar riset dalam ilmu-ilmu dasar yang sudah dikuasai oleh negara-negara maju? Atau riset-riset yang lebih berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan nasional agar memiliki keunggulan komparatif pada tingkat global?

### 2.3 Pesan Reflektif

Bab ini telah mencoba mencermati berbagai tantangan pendidikan yang bangsa kita hadapi dewasa ini dan ke depan. Pembaca diharapkan merenungkan dengan sungguh-sungguh makna dari apa yang disajikan dan menggunakan informasi ini maupun pengetahuan dan pengalamannya untuk memikirkan strategi-strategi pengembangan pendidikan Indonesia ke depan.

# BAB III

## STRATEGI PENDIDIKAN INDONESIA KE DEPAN

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” (Alinea ke-4, Mukadimah UUD 1945).

**B**ab ini akan membahas beberapa kebijakan yang bisa ditempuh dalam menyikapi tantangan dunia pendidikan dan berpotensi meningkatkan aksesibilitas kualitas pendidikan Indonesia ke depan.

### 3.1 Belajar dari RUU Sisdiknas

Penyusunan Buku ini salah satunya dipicu oleh munculnya RUU Sisdiknas yang sempat menjadi pembicaraan hangat berbagai pihak di Indonesia beberapa waktu yang lalu. RUU ini akhirnya tidak dilanjutkan pembahasannya ke tingkat UU karena tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Sementara tahun 2023, pemerintah kemungkinan akan disibukan dengan persiapan PEMILU yang akan dilaksanakan tahun 2024. Meskipun demikian, baik kiranya kita merefleksikan kembali beberapa poin pokok yang muncul dalam RUU Sisdiknas tersebut.

Meskipun kini redup, menarik kiranya kita mencermati beberapa isu pokok yang diangkat dalam RUU Sisdiknas tersebut (Naskah

Rancangan Undang-Undang, 2022). Pemerintah mengungkapkan cukup banyak alasan mengapa diperlukan UU Sisdiknas yang baru, diantaranya: (a) Adanya tiga UU untuk satu sistem pendidikan nasional yaitu UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, dan UU Dikti Nomor 12 Tahun 2012. Pemerintah khawatir bahwa ketiga UU ini berpotensi memunculkan berbagai kesulitan dalam tataran praksis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia; (b) Adanya UU yang berbeda bagi guru dan ASN yang lain telah menimbulkan kesulitan dalam pengaturan upah. UU Guru dan Dosen mengamanatkan pemberian tunjangan profesi bagi guru yang sudah tersertifikasi. Hal ini telah memunculkan kesulitan dalam penerapan karena ada banyak guru yang tidak bisa mendapatkan tunjangan ini meskipun mereka telah mengajar cukup lama; (c) isu pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

Harian Kompas mengutip setidaknya-tidaknya lima (5) perubahan utama yang diajukan pemerintah dalam RUU Sisdiknas (Ihsan, 2022) yaitu (1) wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 9 tahun; (2) pendanaan wajib belajar yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah; (3) Penyesuaian nomenklatur satuan pendidikan yang tidak lagi pada tingkat UU Sisdiknas; (4) kemudahan mobilitas pelajar antara pesantren formal dengan satuan pendidikan lain; dan (5) Pancasila menjadi pelajaran wajib.

Selain itu Naskah Akademik RUU Sisdiknas mengungkapkan setidaknya-tidaknya 5 pasal hukum, filosofis dan sosiologis menarik yang tentunya sangat relevan untuk dikritisi dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pendidikan Indonesia ke depan pasca gugurnya RUU ini yaitu:

- 1) Pasal 2 Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.
- 3) Pasal 4 Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebhinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin.
- 4) Pasal 5 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip: a. berorientasi pada pelajar; b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah; c. demokratis berkeadilan; e. non diskriminatif; f. inklusif; dan g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.

Secara prinsip, USD berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia haruslah tetap berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga Indonesia, persatuan dan kesatuan serta berkeadilan tanpa diskriminasi. Universitas Sanata Dharma sebagai salah satu PT Swasta tertua di Indonesia, khususnya terkait pendidikan guru sekolah menengah, merasa perlu berpartisipasi secara aktif dalam perdebatan tentang Sisdiknas termasuk RUU Sisdiknas. Menyangkut RUU Sisdiknas yang sempat menimbulkan perdebatan dan kehebohan ini, Rektor USD menegaskan sikap USD:

USD dipanggil untuk menyumbangkan kajian dan usulan yang lebih dasariah dan menampilkan visi kreatif untuk bergerak di bidang pendidikan. ... Selama ini kita di USD sering merasa belum maksimal dalam membagikan gagasan, best practices

dan mengusulkan eksperimen-eksperimen dalam pendidikan dan kurikulum (Lampiran ToR Dies USD ke 67, hal. 1).

Selanjutnya Rektor USD (Lampiran ToR Dies USD ke 67) menegaskan beberapa isu yang kiranya menjadi perhatian USD yaitu pembiayaan pendidikan, inklusivitas, keberpihakan pada rakyat miskin, pluralitas, kontekstualisasi, dan kemandirian unit pengelola pendidikan. Pada intinya USD berkomitmen untuk menjadi pemain aktif dalam Diskusi RUU Sisdiknas ke depan dan memberikan sumbangan nyata terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai PT Katolik Swasta.

### **3.2 Sentralisasi Kebijakan dan Desentralisasi Implementasi**

Seperti dikemukakan pada Bab II bahwa salah satu tantangan dunia pendidikan Indonesia ke depan adalah tantangan geografis dimana banyak daerah yang sulit terjangkau baik dari segi transportasi maupun juga ketersediaan infrastruktur pendidikan. Jumlah daerah tertinggal pun masih cukup banyak yaitu 62 dan semuanya berada di luar Pulau Jawa (lht. Bab 2). Hal ini ditambah lagi Indeks Pembangunan Manusia yang masih berkisar pada angka 72,29 % (Indeks Pembangunan Manusia, 2021). Artinya masih sekitar 27% masyarakat Indonesia yang belum dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih pada tahap memadai yaitu 67,80% (BPS, 2020). Artinya masih sekitar 22% penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja aktif secara ekonomi yang tidak berpartisipasi aktif dalam bekerja. Dengan kata lain bangsa Indonesia masih harus berjuang agar semakin banyak masyarakat usia produktif yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produksi barang dan jasa (Tingkat Partisipasi, n.d.).

Menarik mencermati Angka Partisipasi Kasar (APK) dari usia SD hingga PT (lht. Bab III) yang menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi pada usia SD dan semakin menurun pada usia SLTP, SMA dan rendah pada PT. Untuk SMA, Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 17-18 tahun mencapai 85,23% di tahun 2021. Untuk PT, hanya Maluku yang mencatat APK tertinggi pada tahun 2021 yaitu 48,36% dan Kepulauan Bangka Belitung terendah pada tahun yang sama yaitu 15,23%. Secara Nasional APK PT di adalah 31,19%. Sementara mayoritas guru yang layak mengajar masih berkonsentrasi di Pulau Jawa (Karnadi, 2021).

Dari data-data di atas, salah satu pertanyaan yang menggelitik kita semua adalah kebijakan pendidikan yang seperti apakah yang perlu kita tempuh untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan Indonesia ke depan? Dewey memahami bahwa pendidikan adalah sarana dan tujuan, dan merupakan masalah individu maupun sosial (Shirley, 2016, hal. 138). Mengingat variabilitas sumber daya manusia dan ketersediaan pendidikan berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia, pengelolaan persekolahan seperti apa yang perlu kita cermati agar mempercepat akses terhadap pendidikan berkeadilan?

Pengelolaan pendidikan dengan manajemen ilmiah seringkali justru mereduksi pembelajaran dan makna pembelajaran itu sendiri. Rincón-Gallardo (2019, hal. 2) menggambarkan konsep manajemen ilmiah sekolah dan persekolahan sebagai berikut:

Siswa diatur menurut usia, dikelompokkan tepat waktu, dan setiap kelompok mengikuti instruksi dari orang dewasa dalam ruangan dengan menciptakan insentif eksternal, seperti nilai. Cara ini sangat efektif untuk mengelola sejumlah besar siswa. Masalahnya adalah bahwa pembelajaran – setidaknya pembelajaran yang menyenangkan dan mandiri – telah dikesampingkan. Manajemen ilmiah mengasumsikan bahwa pekerjaan pada dasarnya membosankan dan tidak berarti dan oleh karena itu insentif eksternal harus diciptakan untuk mengimplementasikannya. Dalam banyak hal, inilah yang

dilakukan sekolah (dan kampus) – serangkaian tugas yang perlu dilakukan, termasuk kepatuhan, prestasi, dan sertifikasi. Sedikit sekali pengalaman yang begitu membebaskan, membahagiakan dan memotivasi secara intrinsik seperti halnya belajar (Rincón-Gallardo, 2019, hal. 2).

Konsep ilmiah pelaksanaan pendidikan seperti inilah yang disebut oleh Romo Sosa sebagai dunia fragmentalis, superfisial dan instrumentalisme yaitu sebuah pendidikan yang menjauhkan pembelajar dari makna pembelajaran. Para pelaku pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sering mengalami lima keharusan (Imperatives) lama (Shirley, 2016, hal. 10) yang menjadi tantangan dalam upaya pembaharuan kurikulum. Ke-lima keharusan ini telah digunakan sebagai hukum dalam dunia pendidikan dan berorientasi pada *Testing*:

- a. Keharusan ideologis yang menekankan persaingan pasar, ujian, dan standardisasi. Keharusan ini membuat pelaku pendidikan tidak memiliki ideologi pendidikan yang lain selain harus berorientasi pada kebutuhan pasar.
- b. Keharusan imperial yang memproyeksikan ideologi ini ke sekolah dan sistem lain sebagai cara terbaik untuk maju, bahkan ketika sistem lain itu sudah berhasil dengan menggunakan cara yang berbeda untuk mengatur mereka kerja. Ideologi pendidikan ini .
- c. Keharusan preskriptif yang mengamanatkan pekerjaan sehari-hari pendidik dari tingkat birokrasi sekolah yang lebih tinggi.
- d. Keharusan sempit yang membebani pendidik dengan begitu banyak kebijakan sehingga menghambat kemampuan mereka untuk belajar dari sekolah lain dan sistem di tempat lain.
- e. Keharusan instrumental yang telah menetapkan siswa dan guru dalam kaitannya dengan kontribusi ekonomi mereka, dengan mengabaikan nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, atau melayani.

Selanjutnya, Shirley menegaskan perlunya keharusan baru dalam dunia pendidikan (2016, hal. 25) yaitu:

- a. Kebutuhan pembuktian merupakan pengganti kebutuhan ideologis yaitu bahwa ketika prestasi dan integritas diselaraskan, upaya perbaikan didasarkan pada interpretasi bukti secara cerdas, termasuk bukti dari apa yang benar-benar membuat sekolah dan sistem lain berhasil.
- b. Kebutuhan interpretif merupakan pengganti dari kebutuhan imperialis. Ketika kita memiliki prestasi dengan integritas, kita belajar dari kesuksesan orang lain tetapi tidak memaksakan model yang dipakai satu negara pada sistem pendidikan di tempat lain.
- c. Kebutuhan profesional merupakan pengganti dari kebutuhan preskriptif. Kebutuhan ini menempatkan prestasi dengan integritas dengan melibatkan guru yang mampu dan diizinkan untuk melakukan penilaian profesional di ruang kelas mereka, bukan dengan cara yang sewenang-wenang atau berubah-ubah, tetapi berdasarkan keahlian yang mereka kembangkan secara mandiri melalui studi mandiri, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka dalam jaringan sebaya.
- d. Kebutuhan global merupakan pengganti dari kebutuhan sempit dan merujuk pada pencapaian dengan integritas dengan melibatkan dunia yang lebih luas di luar batasnya sendiri sebagai guru kelas dan sebagai seorang profesional yang terus belajar.
- e. Kebutuhan eksistensial menggantikan kebutuhan instrumental. Kebutuhan ini merujuk pada pencapaian dengan integritas dalam arti kita memperhatikan pencarian makna dalam komunitas yang lebih luas, bukan hanya memperoleh keterampilan untuk menjadi produktif secara ekonomi.

Kebijakan dunia pendidikan Indonesia ke depan perlu kiranya mencermati ketegangan antara kebutuhan lama dan kebutuhan baru, seperti yang dikemukakan Shirley (Shirley, 2016). Sejauh mana kebijakan dunia pendidikan kita saat ini telah mampu memilih berbagai kebutuhan yang ditawarkan dari luar Indonesia dan digali

dari nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam negeri kita sendiri? Sejauh mana kita sebagai bangsa memiliki efikasi diri yang tinggi dan meregulasi sebuah kebijakan pendidikan sebagai kombinasi dari kosmopolitanisme dan nasionalisme? Apakah kebijakan pendidikan kita akan lebih ditekankan pada daya saing global dan bukannya pada kependudukan global dengan segala kemajemukan dan keunikannya? Bagaimana pendidikan yang kita terapkan tetap menjunjung demokratisasi sesuai ciri bangsa kita dalam menyikapi arus neoliberalisme termasuk dalam dunia pendidikan? Apakah pendidikan kita akan mampu mengakomodasi kaum marginal dan minoritas baik etnis, bahasa, ekonomi, gender, maupun disabilitas? Paulo Freire (2000) menegaskan bahwa pendidikan harus melakukan lebih dari sekadar pertanyaan untuk melatih siswa menjadi tangkas atau kompeten.

Melihat disparitas akses dan mutu pendidikan yang cukup tinggi di negara kita maka sudah selayaknya kebijakan pendidikan menjadi bahan kajian pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, khususnya dari daerah-daerah masih tertinggal. Implementasi kebijakan pendidikan hendaknya bersifat desentralisasi dengan penyeimbangan antara *Standardisasi dan kuantifikasi, akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility)* dan *kepercayaan (trust)*.

Salah satu bagian terpenting dalam keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dan persekolahan di berbagai belahan dunia adalah standardisasi dan akuntabilitas yang sering diukur melalui ujian. Dalam banyak kebijakan pendidikan ke arah transformasi, istilah standardisasi dan akuntabilitas sering digunakan untuk memastikan keberhasilan sebuah kebijakan. Taubman (2009) menegaskan bahwa kedua istilah ini mempengaruhi semua aspek pengajaran, persekolahan, dan pendidikan guru di Amerika Serikat [bahkan di Indonesia], dan sekarang mengancam pendidikan publik itu sendiri (hal. 12).

Taubman (2009) menegaskan bagaimana kurikulum telah dikendalikan oleh dan didesain untuk keperluan ujian, ketika ia berkata:

Tentu saja ujian telah menentukan pendekatan kita terhadap pendidikan, dan interpretasi hasil telah mendefinisikan realitas pendidikan. Sulit untuk diingat kapan tes tidak digunakan untuk mengukur kesuksesan profesional kita meskipun banyak tes tidak berkaitan dengan penalaran, hasrat atau kreativitas dan originalitas (hal. 18).

Di Amerika, ujian berstandar telah digunakan sebagai strategi kebijakan publik untuk meminta pertanggungjawaban siswa, sekolah dan guru (Taubman, 2009, hal. 22), bahkan ujian telah menjadi berisiko tinggi ‘*high stakes*’ karena tidak saja digunakan untuk mengukur pengetahuan seseorang tetapi menentukan nasib seseorang (hal. 26). Hal serupa terjadi Inggris. Studi independen oleh Profesor Hutchings (Hutchings, 2015) mengungkapkan bagaimana agenda akuntabilitas di Inggris telah mengubah sifat pendidikan secara yang luas dan berbahaya. Akuntabilitas tidak melayani kepentingan anak-anak dan kaum muda dan merongrong hak mereka terhadap kurikulum yang seimbang, kreatif dan yang memuaskan. Pendekatan ini menghasilkan tekanan ekstrim baik di sektor pendidikan dasar maupun menengah dan berisiko mengubah sekolah menjadi ‘pabrik ujian’. Akuntabilitas yang terlalu bersifat eksternal justru bisa menjadi *boomerang* bagi peningkatan kualitas pendidikan karena ada banyak akuntabilitas internal yang terjadi dalam operasionalisasi pendidikan. Untuk kita kiranya kita perlu mencermati tiga faktor yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu konsepsi individu tentang tanggung jawab, harapan bersama antara sekolah (penyelenggara pendidikan) dan pemangku kepentingan, dan mekanisme internal dan eksternal akuntabilitas (Abelmann, dkk, 1999). Kurikulum kita ke depan (Armove, 2020) hendaknya menekankan perlunya otonomi dan berorientasi pada penanganan masalah dengan melibatkan siswa

dalam menguji secara kritis masalah yang menimpa pribadi, keluarga atau komunitas mereka.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kurikulum merdeka belajar lebih menekankan pada otonomi pendidikan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sekolah, guru dan siswa untuk mengeksplorasi pelaksanaan kurikulum. Selain itu digantikannya ujian nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum (*AKM*) menunjukkan bergesernya konsep pemerintah terkait urgensi ujian berstandar nasional sebagai penentu kelulusan. Meskipun demikian kita masih harus berjuang keras dan cerdas untuk memastikan bahwa kebijakan kurikulum ini tidak mengalami kendala dalam penerapannya dan justru bisa meningkatkan kesenjangan dan aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas. Karena itu kita hendaknya mengusung semangat pasca-modernis dengan mendorong pengembangan minat dan bakat eklektik siswa, refleksi otobiografi, penyelidikan naratif, multitafsir, dan pemahaman kontekstual (Slattery, 2006, hal. 40).

Desentralisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah termasuk dalam dunia pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang perlu semakin ditingkatkan ke depan. Desentralisasi merupakan upaya untuk mengurangi sentralisasi dan bahkan otoritarianisme (Hooghe dkk., 2016). Desentralisasi juga merupakan upaya pengembangan demokratisasi. Di negara lain, desentralisasi untuk mereformasi efisiensi pelayanan public diharapkan menghasilkan tata kelola publik yang lebih akuntabel dan transparan, korupsi yang lebih rendah, partisipasi politik yang lebih tinggi, dan inovasi kebijakan (Charbit, 2011). Meskipun demikian hendaklah desentralisasi tetap memperhitungkan berbagai dampak kebijakan pembangunan terhadap lingkungan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran budaya ramah dan kasih terhadap mereka yang berbeda dan terhadap lingkungan. Selain itu, bagi pelaksana kebijakan, diperlukan penanaman rasa tanggung jawab kepada mereka yang dilayani dan bukan terutama demi akuntabilitas eksternal. Rasa tanggung jawab

akan semakin bisa dijalankan dengan baik bila dibangun budaya relasi saling percaya antara pemberi kebijakan dan pelaksana di lapangan.

### 3.3 Pendidikan Antarbudaya dan Ekologis

Mengapa pendidikan lintas budaya menjadi sangat penting melebihi pendidikan multibudaya? Paus Fransiskus dalam Ensikliknya (2015, dalam Harun, 2016) yang berjudul *Laudato Si* menegaskan bahwa “kita berhadapan dengan suatu tantangan budaya, spiritual dan pendidikan yang besar, yang akan menghendaki proses-proses pembaruan yang panjang” (2015, dalam Harun, 2016, hal. 124). Slattery (2006) mengingatkan kita bahwa kita hidup di masa konflik besar yang dibentuk oleh orang-orang yang mengaku tahu pasti bahwa Tuhan ada di pihak mereka (hlm. 6). Bagi bangsa Indonesia keberagaman budaya bukanlah hal yang baru.

Secara tradisional, Indonesia memiliki modal filosofis, hukum dan sosial yang kuat seperti tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai sosial ini perlu terus digalakkan karena sejarah mencatat sejumlah konflik sosial yang justru bertentangan dengan modal sosia bangsa Indonesia. Hampir setiap orang Indonesia mengetahui moto Bhineka Tunggal Ika yaitu berbedabeda tetapi tetap satu. Kita juga akan dengan lancar menyebut Pancasila beserta kelima silanya sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Sayangnya kebanyakan dari kita baru mencapai pengetahuan deklaratif. Kita bisa menjelaskan dengan tepat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Pengetahuan kita tentang kedua konsep hidup berbangsa ini belum mencapai tingkat pengetahuan prosedural apalagi pengetahuan kondisional (kontekstual).

Banyak konflik, baik antar budaya maupun antar etnis dan agama, terjadi karena ketidakmampuan kita menerjemahkan konsep Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ke dalam tataran praksis yang sangat membutuhkan keterampilan untuk menerapkan kedua konsep ini sesuai konteks dan waktu. Pemerintah tentu menyadari betul akan

pentingnya digalakkan kembali semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Naskah akademik (Naskah Akademik, 2022) yang sempat bergulir menekankan adanya profil pelajar Pancasila sebagai berikut:

Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil yang demikian itu adalah pelajar yang terbangun utuh keenam dimensi pembentuknya, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif (Naskah Akademik, 2022, hal. 49).

Rancangan RUU Sisdiknas ini menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada pelajar karena memang Pancasila adalah pandangan hidup bangsa sekaligus menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Kurikulum Merdeka yang berlaku sekarang ini memberi porsi yang cukup besar terhadap Pancasila melalui Proyek Penguatan Pelajar Pancasila.

Menjadi menarik bahwa perlunya penanaman nilai-nilai Pancasila hanya ditekankan kepada pelajar. Apakah hanya pelajar yang disinyalir akan bermasalah dalam hidup berkebangsaan dengan orang lain di Indonesia yang sangat beraneka ragam dan multibudaya? Penulis berpendapat bahwa penanaman dan penghayatan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara tidaklah cukup hanya terbatas pada pelajar. Yang tidak kalah penting adalah para guru, mahasiswa dan dosen. Bukankah guru, pendidik harus menjadi panutan bagi siswanya terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika? Bukankah Ki Hadjar Dewantara menekankan tiga peran utama pendidik yaitu di depan memberi teladan (Ing Ngarso Sung Tulodo), di tengah memberi bimbingan (Ing Madyo Mangun Karso) dan di belakang menyemangati (Tut Wuri Handayani)?

Bagaimana dengan para mahasiswa yang justru setelah menamatkan studinya akan langsung berkarir di masyarakat sebagai penerus tonggak pembangunan bangsa? Nilai-nilai nasionalis apa yang telah mereka hayati di kampus selain tentu yang tertera pada transkrip nilai mereka? Dan bagaimana dengan para dosen yang memiliki *power* yang cukup kuat di kampus? Apakah mereka bisa menjadi contoh seorang akademisi nasionalis? Apakah gunanya seseorang berpendidikan tinggi tetapi dangkal bahkan cenderung menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?

Mempertimbangkan posisi strategis, guru, mahasiswa dan dosen maka kiranya pemerintah perlu menetapkan pasal-pasal terkait mahasiswa Pancasila, Guru Pancasila dan Dosen Pancasila. Apakah sudah saatnya para guru dan dosen memiliki profil Pancasila dengan sanksi jabatan, finansial dan non-finansial, bila terindikasi menyimpang dari nilai-nilai Pancasila?

Pertanyaan lain yang muncul adalah kejituan strategi Proyek Penguatan Pelajar Pancasila dan program serupa ke depan bila kita berkomitmen akan merambah dunia guru, mahasiswa dan dosen. Pada bagian latar belakang, ditekankan bahwa dunia kita saat ini ditandai dengan fragmentalisme, superfisialitas dan instrumentalis. Program peningkatan kesadaran budaya seperti halnya Proyek Penguatan Pelajar Pancasila hendaklah lebih bersifat integratif dan bukan fragametalis, mendalam dan bukan superfisial, dan bermakna dan bukan instrumentalis. Karena itu, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila sebagai wujud pengamalan kelima sila Pancasila haruslah saling terkait dan menginspirasi dan bukan segregasi atau terpisah-pisah. Misalnya, seseorang yang mengamalkan Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa harus terampil dalam mengamalkan Sila ini bukan saja pada tataran ritual seremonial (deklaratif) tetapi pada tataran praktik sosial dalam hubungannya dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dengannya (prosedural dan kondisional). Bagaimana keberadaannya, semangat

persatuannya, kegotongroyongan, dan sikap adilnya dijiwai dan menjiwai nilai-nilai Ketuhanan yang dia yakini dan amalkan. Bila hal-hal ini yang dilakukan maka pengalaman Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika akan mendalam dan bermakna (eksistensialisme) dan tidak berhenti pada tataran idealis.

Strategi-strategi konkret bisa dilakukan dalam jenjang pendidikan. Misalnya:

- 1) Dalam satu sekolah melakukan pengerjaan proyek penguatan pelajar Pancasila berkelompok multikultural (baik agama, etnis, bahasa, gender dsnya).
- 2) Mengerjakan proyek dengan mengunjungi sekolah dengan atribut yang berbeda dengan sekolahnya.
- 3) Sekolah-sekolah berbasis Agama Islam dapat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah non-Islam dan sebaliknya.
- 4) Pertukaran dan proyek guru dengan basis multikultural yang berbeda.

Kegiatan-kegiatan kreatif seperti ini akan memberi makna yang mendalam dan mentransformasi bila diawali dengan penetapan tujuan (lht. Mbato, 2013) dan diakhiri dengan refleksi dan *sharing* (lht. Mbato, 2022). Contoh-contoh kegiatan ini akan secara alamiah membongkar sekat-sekat primordialisme dan membuka ruang dialog dan keterbukaan untuk saling menghargai dan menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa.

Inilah yang kita namakan pemahaman lintas budaya (*intercultural understanding*) yang merupakan bukti dari pembelajaran berbasis bukti dan bukan ideologis, berbasis interpretif dan bukan imperial, berbasis profesional dan bukan preskriptif, berbasis global dan bukan sempit, berbasis eksistensial dan instrumental (lht. Shirley, 2016).

Pendidikan antar budaya perlu juga bersifat ekologis yaitu bagaimana pemahaman antar budaya bisa diterjemahkan untuk melestarikan kecintaan para pelaku pendidikan dan pembelajar

terhadap lingkungan. Paus Fransiskus (2015, dalam Harun, 2016) menegaskan:

Budaya ekologis tidak dapat direduksi menjadi serangkaian jawaban mendesak dan parsial atas masalah-masalah yang sedang muncul dalam kaitan dengan kerusakan lingkungan, menipisnya cadangan sumber daya alam, dan polusi. Budaya itu membutuhkan suatu cara memandang yang berbeda, pikiran, kebijakan, program pendidikan, gaya hidup dan spiritualitas yang membangun ketahanan menghadapi kemajuan paradigma teknokratis. Jika tidak, bahkan inisiatif ekologis yang terbaik pun akhirnya dapat terjebak dalam pola pikir globalisasi yang sama. Hanya mencari solusi teknis untuk setiap masalah lingkungan yang muncul, adalah memisahkan hal-hal yang dalam kenyataan saling terjalin, dan menutupi masalah-masalah yang sesungguhnya dan paling mendalam dari sistem global (hal. 72)

Terkait pendidikan ekologis, Paus Fransiskus (2015, dalam Harun, 2016) menegaskan bahwa “para pendidik harus mampu mengembangkan jalur-jalur pedagogis bagi etika lingkungan, sehingga membantu orang secara efektif bertumbuh dalam solidaritas, tanggung jawab, dan perawatan penuh kasih” (hal. 126). Lebih lanjut Beliau menegaskan agar pendidikan ekologis tidak terbatas pada pemberian informasi dan penerbitan undang-undang dan aturan tetapi harus dengan motivasi yang tepat, berdasarkan suatu perubahan pribadi, pengembangan kebajikan kukuh, dan pemberian diri dalam suatu komitmen ekologis (hal. 126). Pendidikan harus mampu mendorong orang untuk menjadikan kecintaan pada ciptaan sebagai suatu gaya hidup melalui tindakan-tindakan kecil sehari-hari (hal. 129).

Raharja (n.d.) menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan pendidikan berwawasan ekologis karena akan mempengaruhi praktek pendidikan terhadap kondisi lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, wilayah, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan ekologis yang efektif dalam dengan melakukan pendekatan ekologis yang dapat

menyentuh sisi psikologis seseorang sehingga ia semakin mencintai alam dan lingkungan, demikian tandas Raharja. (n.d.)

### **3.4 Pendidikan Inklusif dan Nondiskriminatif**

Aturan hukum tentang Pendidikan di Indonesia terlihat pada pasal-pasal berikut. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional. Bab III, Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. RUU Sisdiknas, yang sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, dengan jelas mengatur sistem Pendidikan Indonesia ke depan pada Bab II Pasal 5 yaitu: (a) berorientasi pada pelajar; (b). menjunjung tinggi kebenaran ilmiah; (c). demokratis; (d). berkeadilan; (e). non diskriminatif; (f). inklusif; dan (g) mendukung pembelajaran sepanjang hayat (Naskah Rancangan Undang Undang, 2022, hal. 57).

Pada tingkat global, salah satu isu penting dalam dunia pendidikan adalah pendidikan inklusif, yang oleh UNESCO (UNESCO, 2022) didefinisikan sebagai semua anak di kelas yang sama, di sekolah yang sama. Ini berarti kesempatan belajar nyata bagi kelompok yang secara tradisional dikucilkan – tidak hanya anak-anak penyandang disabilitas, tetapi juga penutur bahasa minoritas. Sistem inklusif menghargai kontribusi unik siswa dari semua latar belakang yang dibawa ke kelas dan memungkinkan berbagai kelompok tumbuh berdampingan, untuk kepentingan semua. Pendidikan inklusif memungkinkan siswa dari semua latar belakang untuk belajar dan tumbuh berdampingan, untuk kepentingan semua.

Sebelum sistem zonasi diberlakukan pada tahun 2018 (bds. Permendikbud No. 17 2017), cukup banyak sekolah negeri di

Indonesia yang merasa memiliki status ‘elit’ sehingga mereka bisa menyaring calon siswa berdasarkan nilai akademik sebelumnya. Munculnya sistem zonasi sering membuat sekolah-sekolah ‘elit’ harus gigit jari karena mereka harus mendidik semua murid yang ada di sekolah mereka dengan kemajemukan akademik. Terkait Sistem Zonasi, Permendikbud No. 17 2017 menegaskan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin penerimaan siswa dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan yang lebih baik. Dalam pasal 15 peraturan yang sama diatur bahwa sekolah negeri harus menerima paling sedikit 90% dari jumlah siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah (Mbato, 2018).

Mbato (2018) dalam analisisnya di Jakarta Post mengatakan bahwa sistem zonasi, bila dijalankan secara sungguh akan mampu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Ia juga memberikan catatan bahwa bagi banyak orang, penerapan sistem baru penerimaan sekolah ini adalah pelepas dahaga mereka akan pendidikan yang setara dan adil untuk semua. Dengan peraturan ini, sekolah tidak dapat menolak siswa masuk berdasarkan hasil akademik sebelumnya. Melakukannya sama dengan melanggar hukum. Bagi yang lain, sistem baru ini berarti mereka harus rela melepaskan status istimewanya dan belajar menerima heterogenitas siswa baik itu latar belakang akademis maupun sosial ekonominya.

Sehubungan dengan kebijakan pendidikan dan implementasi kurikulum, kita dapat merefleksikan keharusan lama (*old imperatives*) yang digagaskan oleh Shirley (2016) (lht. Poin 4.1). Ia berargumen bahwa pendidikan yang terlalu didominasi oleh keharusan lama (Shirley, 2016) membuat pendidikan tidak lagi berorientasi pada pemanusiaan manusia muda (Driyarkara) atau pengembangan manusia/anak didik seutuhnya tetapi pada ujian dan standardisasi yang pada akhirnya menjadi sangat fragmentalis, superfisial dan instrumentalis (Sosa, 2022).

Pendidikan berorientasi pasar ini memperlakukan institusi pendidikan sebagai pabrik dan para murid sebagai bahan mentah yang akan dikelola tanpa memperhatikan pengembangan bakat dan minat sehingga seleksi alamiah yang menentukan mereka yang akan berhasil dan mereka yang akan gagal. Pendidikan berorientasi pasar dan *testing* telah dikritik oleh Robinson (2018) karena merupakan cara paling ampuh untuk mematikan kreativitas peserta didik. Mengutip Bourdieu, Wong (2002) berpendapat bahwa standar akademik, meskipun tampak netral, pada kenyataannya dipenuhi dengan nilai-nilai budaya dan keterampilan khusus, yang sebagian besar terkait dengan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.

Seperti yang ditegaskan oleh Robinson (2018) bahwa pendidikan diharapkan mengantarkan kita ke masa depan yang memang belum kita pahami karena memang kita kita mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara itu, lanjutnya, semua setuju pada kapasitas anak yang luar biasa untuk berkembang yaitu kapasitas untuk berinovasi. Jadi kita mendidik mereka untuk masa depan yang kita sendiri tidak dapat pastikan.

Masalah inklusivitas sering menjadi perdebatan dalam penyelenggaraan pendidikan karena bersinggungan dengan *excellence* (keunggulan) dan *equity* (kesetaraan). *Equity* perlu dibedakan dari *equality* (kesamaan). Ekuitas berarti memberikan setiap orang sarana untuk menjadi sukses, dengan fokus pada standar minimum. Ia berfokus pada keadilan dengan pengakuan yang kita lakukan bahwa kita tidak mulai dengan kesempatan yang sama, dan dengan demikian kebijakan harus disesuaikan untuk mengkompensasi defisit yang tidak dapat dikendalikan oleh individu (Mitra, 2022, hal. 4). Konsep keadilan sosial sangat berkaitan dengan pemerataan yaitu upaya untuk mencari kelompok-kelompok yang kurang mampu ketika mayoritas tidak melakukannya. Kebijakan seperti kuota, *affirmative action* cocok dalam konsep ini.

Terkait *equity* adalah kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*), yang merupakan standar yang lebih rendah daripada

kesetaraan, dan terkait penyediaan kesempatan bagi setiap orang untuk bersaing untuk tujuan yang sama tetapi tidak mempertimbangkan berbagai titik awal dari setiap kelompok (hal. 4). Persaudaraan adalah ide terkait lainnya yang terdiri dari ikatan dan kesetiaan bersama antara anggota masyarakat yang dapat menimbulkan kebijakan sosial yang didasarkan pada kepentingan mendukung orang lain. Mengenai pendidikan berkeadilan Brookfield (2005) mengajak kita semua untuk mengkritisi dampak suatu kebijakan, tindakan, atau praktik umum pada keadilan sehingga membuka peluang untuk berbagai alternatif pendekatan pendidikan.

Dalam hal ini kita perlu memastikan bahwa buku-buku pelajaran yang digunakan di Indonesia sudah bersifat inklusif dan multikultural dalam arti seluas-luasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Jennifer dan Ouda (2020) menunjukkan bahwa terdapat bias etnis dalam buku teks Bahasa Inggris kelas X karena tidak ada hewan dan minimnya subjek manusia berasosiasi Melanesia sedangkan subyek Asing justru lebih banyak ditemukan dalam kata kerja tindakan. Dalam penelitian lain (Romrome & Ena, 2022) ditemukan bahwa penggunaan budaya dalam materi Bahasa Inggris dapat meningkatkan keterampilan siswa. Terkait agama dalam buku teks elektronik, ditemukan bahwa beberapa agama sangat minim keterwakilannya di dalamnya (Ena, 2016).

### **3.5 Kurikulum Holistik**

Sebelum kita meninjau isu-isu penting kurikulum di Indonesia dewasa ini baiklah kita mencermati apa itu kurikulum dan jenis-jenisnya. Kelly (2004) menegaskan bahwa kurikulum seringkali dimaknai secara sempit yaitu hanya terkait pengajaran yang akan ditawarkan, dan terkadang juga, maksud atau tujuan serta jumlah mata pelajaran. Definisi ini tidak memperhitungkan aspek pendidikan atau moral dari dimensi kurikulum sekolah.

Selanjutnya Kelly (2004) mengkategorikan kurikulum menjadi empat yaitu: (1) kurikulum menyeluruh (total) yang mengharuskan guru dan perencana kurikulum untuk menyusun dasar sebagai bangunan beberapa skema menyeluruh (2) kurikulum tersembunyi (hidden) yang dipelajari siswa meski tidak diajarkan secara terang-terangan; 3) kurikulum yang direncanakan dan kurikulum yang diterima adalah apa yang ditetapkan dalam silabus dan dokumen lainnya sedangkan kurikulum aktual atau yang diterima adalah realitas pengalaman murid dan 4) kurikulum formal dan kurikulum informal adalah kegiatan formal di mana jadwal sekolah mengalokasikan periode pengajaran tertentu dan banyak kegiatan informal yang berlangsung, biasanya atas dasar sukarela, pada waktu makan siang, setelah jam sekolah, pada akhir pekan atau selama liburan (hal. 4-7). Salah satu kurikulum lain yang sering dilupakan adalah *null curriculum* yaitu apa yang sengaja tidak diajarkan atau kesempatan yang hilang untuk mempelajari sesuatu tetapi justru siswa/mahasiswa mempelajarinya sendiri (Kazemi dkk, 2020).

Membicarakan kurikulum tentu tidak terlepas dari teori belajar yang diusungnya. Yang pertama adalah perspektif psikodinamik yaitu suatu pendekatan yang dikembangkan pada awal abad ke-20 dari karya Freud dan terutama mempertimbangkan perkembangan emosional, dan diterapkan dalam pendekatan terapeutik untuk anak dengan masalah (Long, 2002, hal. 4). Teori struktur mental ini terdiri dari tiga aspek yaitu *Id*, *Ego* dan *Superego*. *Id* merupakan dorongan motivasi intrinsik yang tidak disadari seperti dorongan seks. *Ego* merupakan perasaan sadar kita tentang identitas diri dan berfungsi mengontrol *Id* agar sesuai dengan tuntutan realitas serta menyeimbangkan *Id* dan *Superego*. *Superego* merupakan internalisasi yang cukup sadar terkait kontrol oleh orang tua dan juga nilai-nilai moral (hal. 108).

Teori belajar behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan dikembangkan oleh psikolog Pavlov, Watson dan Skinner. Meskipun agak kurang populer akhir-akhir ini, teori ini menghasilkan

teknik yang kuat untuk menganalisis dan memodifikasi perilaku di sekolah (hal. 4). Perspektif humanistik menekankan keunikan dan potensi pengembangan diri individu dan mendasari pendekatan yang berpusat pada anak dalam pendidikan. Teori ini dikembangkan oleh Maslow untuk melawan perspektif mekanistik psikodinamik dan psikologi perilaku. Perlu kiranya kita garis bawahi motivasi manusia termasuk belajar merupakan ekspresi dari hirarki kebutuhan seperti yang diutarakan oleh Maslow (dalam Long, 2002, 109) yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan harga diri (penghargaan), kebutuhan kognitif, kebutuhan estetik, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Perspektif psikobiologis mempertimbangkan struktur dan proses biologis sebagai dasar yang menentukan pemikiran tingkat tinggi dan tindakan dan perdebatan antara bawaan/pengasuhan (*nature/nurture*) sebagai dasar kecerdasan dan proses yang mendasari gairah dan motivasi.

Perspektif kognitif melihat individu sebagai pengolah informasi yang menyiapkan model internal dunia dan mengembangkan rencana dan strategi untuk memandu cara berinteraksi dengannya untuk mencapai tujuan (Medcof dan Roth, 1979, dikutip dari Long, 2002, hal. 4). Vygotsky (1978, dalam Ireson, 2008), melalui teori konstruktivis sosialnya, menekankan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain. Ia menekankan bahwa pembelajaran tidaklah terlepas dari konteks dunia sosial budaya dimana seseorang berada. Pedagogi kritis juga menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang perlu diterapkan di dalam kelas. Pedagogi kritis adalah strategi pengajaran yang vital, yang dirancang untuk memperkuat kesadaran peserta didik tentang keadilan dan kesetaraan sosial, sambil meningkatkan pengetahuan mereka (Uddin, 2019).

Salah satu teori belajar yang cukup relevan dengan dunia *networking* dewasa ini adalah konektivisme. Darrow (2009) menegaskan bahwa konektivisme membantu memastikan bahwa siswa tetap mengikuti perkembangan dengan membangun koneksi

aktif, memanfaatkan jaringan sosial cerdas, dan mendorong kurikulum yang dihasilkan siswa. Konektivisme memungkinkan masa depan pendidikan untuk dilihat secara optimis, sebuah perspektif yang hampir utopis, ketika individu secara bersama-sama menciptakan pengetahuan dalam lingkungan jaringan global. Konektivisme adalah integrasi prinsip-prinsip yang dieksplorasi oleh kekacauan, jaringan, dan kompleksitas dan teori organisasi diri (Siemens, 2005, dalam Darrow, 2009). Siemens (2006, dalam Darrow, 2009) menggambarkan belajar sebagai sesuatu yang "berantakan, kacau, sosial, kolaboratif, dan terhubung dengan aktivitas dan minat lain. Sebaliknya, pendidikan formal, ... [adalah] artifisial dan terstruktur'.

Siemens (2004, dalam Darrow, 2009) berargumen bahwa tiga teori belajar utama yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, tetaplah valid meski memiliki keterbatasan yang melekat karena teori-teori tersebut tidak mencerminkan jenis pembelajaran yang terjadi di era digital saat ini dan juga tidak memenuhi kebutuhan siswa meskipun ia juga mengakui bahwa tidak satu teori pun yang berlaku universal dalam aplikasinya (Siemens, 2006, dalam Darrow, 2009). Dari pernyataan Siemens ini (2006, dikutip Darrow, 2009) dapat kita simpulkan bahwa pendekatan eklektik adalah yang terbaik dalam menerapkan berbagai teori belajar. Hal serupa ditegaskan Ireson (2008) sebagai berikut:

Terdapat hubungan yang kuat antara berbagai teori pembelajaran. Apa yang terjadi di otak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas budaya. Plastisitas otak manusia membuatnya mampu belajar dalam jangka waktu yang lama, membangun pengetahuan dan keterampilan yang tersedia untuk digunakan nanti. Konteks budaya memberikan anak-anak berbagai kesempatan untuk belajar ketika keyakinan orang dewasa, nilai-nilai, etnoteori, dan praktik kebiasaan mendorong mereka untuk mempromosikan kegiatan. Dengan terlibat dalam aktivitas ini, otak membentuk koneksi yang mempengaruhi kinerja peserta didik dalam berbagai komponen keterampilan (hal. 144-145).

### 3.6 Metakognisi dan Regulasi Diri

Konektivisme mengharuskan seseorang untuk berjejaring dengan orang dalam pembelajaran maupun dalam hidup. Meskipun demikian, tanpa keterampilan berpikir yang efektif dan efisien, ia bisa tersesat dalam menghadapi dunia penuh ketidakpastian dan disrupsi (*D-Vucad*). Sayangnya di banyak negara, termasuk Indonesia, pembelajaran lebih diorientasikan pada penguasaan materi tanpa pemaknaan. Tantangan bagi para guru di Indonesia masa depan adalah bagaimana menciptakan ruang untuk mengembangkan 4C elements abad 21 yaitu *critical thinking*, *creative thinking*, *collaboration communication* (Yu & Wan Mohammad, 2019). Salah satu pendekatan pembelajaran yang terbukti cukup ampuh dalam meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar adalah pendekatan metakognitif dan regulasi diri.

#### 3.6.1 Metakognisi

Metakognisi merupakan sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dipopulerkan pertama kalinya oleh Flavell (1979) dengan istilah *metacognitive monitoring*. Beliau menegaskan metakognisi sebagai pengetahuan dan kognisi tentang fenomena kognitif, di mana pemantauan kognitif dilakukan. Brown (1987, p. 65) mendefinisikan metakognisi sebagai pengetahuan dan kontrol sistem kognitif seseorang (hal. 66). Bruning dkk (2004) dijelaskan lebih lanjut metakognisi sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang proses berpikirnya dan Anderson (2002, p. 1) mendefinisikannya hanya sebagai berpikir tentang berpikir. Terdapat banyak aspek metakognisi yang dijelaskan para ahli sejak Flavell (1979) meskipun kategori metakognisi oleh Brown (1987) sering dipakai karena dianggap paling komprehensif. Beliau membagi metakognisi menjadi pengetahuan tentang kognisi dan regulasi kognisi. Pengetahuan tentang kognisi dibagi menjadi tiga yaitu pengetahuan deklaratif (tahu apa), prosedural (tahu bagaimana) dan kondisional (tahu kapan dan mengapa). Sementara regulasi kognisi dibagi menjadi menjadi

perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Mengapa pembelajaran berbasis metakognisi masih relevan bahkan pada masa mendatang? Jawabannya adalah karena metakognisi melatih seseorang untuk berpikir tingkat tinggi. Ia berbeda dengan Taksonomi Bloom karena Taksonomi Bloom bergerak pada level kognitif yaitu *lower order thinking skills* (LOTS) dan *higher order thinking skills* (HOTS). Metakognisi berfungsi sebagai pengontrol HOTS dan LOTS.

Lebih jauh mari kita diskusikan elemen-elemen metakognisi di atas. Yang pertama adalah pengetahuan deklaratif (konseptual). Pengetahuan deklaratif ini menghendaki seseorang untuk membangun konsep dan prinsip dasar tentang sebuah ilmu. Seorang pembelajar tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan deklaratif tetapi juga prosedural. Untuk menjadi pembelajar yang sukses, ia perlu berlatih agar sekumpulan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi sebuah keterampilan. Ireson (2008) dan Gladwell (dalam Young, 2020) mengungkapkan bahwa untuk benar-benar mencapai level terampil/ahli seseorang harus berlatih. Latihan memainkan peran penting dalam proses menjadi ahli dan perolehan kompleks keterampilan biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, atau 10.000 jam latihan atau sekitar 2 jam sehari selama 20 tahun. Meskipun demikian banyak orang yang telah berhasil mematahkan konsep ini dengan menunjukkan bahwa orang bisa mencapai keahlian tanpa harus menempuh 10 tahun latihan. Intinya bukan saja berlatih tetapi berlatih aspek tertentu secara sengaja (*deliberate*). Inilah yang membedakan orang baru dan mereka yang benar-benar ahli, kata Ericsson, sang peneliti pada Florida State University (Ericsson, 1993). Memiliki pengetahuan deklaratif dan prosedural tidaklah cukup bagi seseorang untuk bisa menjadi terampil dan berpengetahuan. Ia harus mengembangkan pengetahuan kondisional atau kontekstual yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Selain pengetahuan tentang kognisi, seorang pembelajar perlu mengembangkan keterampilan untuk meregulasi kognisinya yaitu melalui kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Keterampilan

ini akan memampukan pembelajar untuk melaksanakan proses pembelajaran secara lebih efektif dan efisien.

Salah satu ahli yang mengembangkan konsep metakognisi Flavell (1979) adalah Wenden (1987). Wenden menggunakan istilah pengetahuan metakognisi yang terbagi menjadi pengetahuan tentang diri (*person knowledge*), pengetahuan tentang tugas belajar (*task knowledge*) dan pengetahuan tentang strategi (*strategy knowledge*). Seorang pembelajar perlu mengenal dirinya (*person knowledge*). Misalnya apakah ia merupakan orang suka belajar di tempat sepi atau ramai, sendiri atau bersama orang lain, gampang gugup atau penuh percaya diri. Ia juga perlu mengetahui tugas-tugasnya sebagai pembelajar dan juga apa yang menjadi kriteria dari sebuah tugas belajar dan menggunakan berbagai strategi yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan.

Mengapa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi perlu dimiliki pembelajar abad 21? Penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan lebih mudah diraih oleh mereka yang memiliki sekumpulan strategi dan mampu menggunakannya secara tepat untuk memecahkan persoalan belajar yang dihadapi (Rubin, 1975 dan 2008). Selain itu metakognisi juga telah digunakan oleh banyak organisasi untuk menyiapkan individu untuk bekerja pada lingkungan Vucad (Waryold, dkk, 2021). Mbato (2013) dalam penelitiannya di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, antara lain, menemukan bahwa pendekatan metakognitif dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meregulasi dirinya dalam mempelajari bahasa Inggris. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian campuran yang melibatkan dua puluh satu guru sekolah dasar di sebuah sekolah dasar di wilayah Magelang, Jawa Tengah (Suminto & Mbato, 2020) ditemukan bahwa guru mempersepsikan penerapan metakognisi dalam pengajaran pendidikan karakter secara positif. Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa mereka tidak menerapkan regulasi kognisi secara keseluruhan. Penelitian tentang keterampilan berpikir kritis

dalam membaca (Mbato, 2019) menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan deklaratif yang cukup tentang berpikir kritis dalam membaca. Namun, pengetahuan prosedural dan kondisional mereka tentang berpikir kritis dalam membaca tidak mencukupi. Hasil penelitian lain (Andriani & Mbato, 2021) tentang penggunaan strategi metakognitif dalam membaca akademik ditemukan bahwa mahasiswa lebih banyak menggunakan strategi menerka arti dari pada mahasiswi sementara mahasiswi lebih banyak menggunakan variasi strategi membaca dari pada mahasiswa.

### 3.6.2 Regulasi Diri

Pendidikan Indonesia ke depan juga harus berorientasi pada regulasi diri. Zimmerman (1986) mengidentifikasi regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk secara metakognitif, motivasi dan perilaku, aktif dalam diri mereka sendiri ketika mereka sedang belajar. Selanjutnya, regulasi diri didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatur emosi (perasaan dan berbagai aspek afektif), pikiran dan tindakan untuk mencapai tujuan (Zimmerman dkk, 1996).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Mbato (2013) ditemukan bahwa kemampuan mahasiswa PGSD dalam meregulasi diri membuat mereka menjadi pembelajar Bahasa Inggris yang lebih baik, positif dan berprestasi. Kemampuan meregulasi diri yang ia teliti mencakup regulasi sikap dan perasaan (emosi), motivasi, ketekadan (*volition*), efikasi diri, atribusi dan strategi. Kemampuan meregulasi diri yang meningkat terlihat dari kemandirian mereka dalam merencanakan, memonitoring, menyusun strategi untuk memecahkan masalah belajar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring, dan melakukan evaluasi baik terkait strategi belajar, perilaku, emosi, maupun hasil belajar. Keadaan emosi mahasiswa pun menjadi lebih positif karena keadaan emosi negatif di kalangan siswa diketahui merangsang kinerja akademik yang buruk (Ozamiz-Etxebarria dkk, 2021). Pendekatan metakognitif yang dilakukannya mampu meningkatkan regulasi diri. Dalam hal ini, Mbato (2013) mengkombinasikan

peran guru seperti yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara yaitu di depan memberi teladan, ditengah membimbing dan dibelakang menyemangati (hal. 173).

Meskipun penelitiannya dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris, pendekatan serupa dapat dilakukan dalam pembelajaran bidang studi apapun, tentu dengan memodifikasi konten yang akan dipelajari. Argumen ini didukung oleh penegasan oleh Reaves (2019) yaitu bahwa untuk membantu pelajar bertahan dan berkembang dalam lingkungan VUCA (volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas), kita mungkin perlu mengajarkan apa yang disebut keterampilan abad ke-21 – fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, pengamatan, empati, kreativitas, inovasi, belajar cara belajar. Banyak keterampilan ini secara inheren bersifat metakognitif dan merupakan bagian-bagian kecil dan menunjukkan prinsip dasar yang sama pada berbagai tingkat detail dan pengetahuan. Meskipun positif, banyak kebijakan dan praktik sekolah mengabaikan metakognisi. Para peneliti (Perry dkk, 2018) mempelajari lebih dari 50 penelitian untuk memastikan pengaruh pengajaran metakognisi di sekolah terhadap hasil belajar dan menemukan bahwa mengajar metakognisi dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah.

Maka pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah mengalami pembelajaran berbasis metakognisi dan regulasi diri sering diabaikan dalam dunia pendidikan dan mengapa pendidikan Indonesia ke depan perlu metakognisi dan regulasi diri? Yang pertama adalah kita terlalu terfokus pada pendekatan-pendekatan kognitif karena dianggap lebih mudah diajarkan dan diukur. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis metakognisi dan regulasi diri membutuhkan guru yang terampil secara metakognitif dan telah mengalami dan menerapkan prinsip-prinsip regulasi diri dalam hidupnya dan proses belajarnya dan dalam pengajaran. Yang ketiga, pendekatan metakognitif dan regulasi diri membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya sering belum kelihatan di tahap-tahap awal pembelajaran.

Sekarang mari kita perhatikan pembelajaran *HOTS*, *4Cs*, *TPACK*, *problem-based learning*, *discovery learning*, *inquiry learning*, *flipped learning* dll yang menjadi *trend* dalam berbagai kurikulum di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Pada level apakah pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ini? Bila dicermati maka kita akan menyadari bahwa semuanya berada pada level berpikir kognitif. Bloom sendiri menyebut *LOTS* dan *HOTS* sebagai hirarki berpikir kognitif. *4C skills*, yang sering disebut sebagai keterampilan berpikir abad 21, terdiri dari *critical thinking*, *creative thinking*, *collaborative thinking*, dan *communicative thinking*. *TPACK* yang terdiri dari *technological pedagogical content knowledge*, bergerak pada tingkat kognitif.

Agar seseorang mampu memahami dan menerapkan berbagai keterampilan kognitif maka Ia harus memiliki kemampuan metakognitif. Kemampuan metakognitif akan memberdayakan seseorang untuk merencanakan, mengawasi, mencari strategi sebagai jalan keluar dan mengevaluasi berbagai kegiatan kognitif. Misalnya, ketika seorang pembelajar diminta menuliskan sebuah artikel ilmiah maka Ia diharapkan memiliki pengetahuan deklaratif tentang kriteria sebuah karangan ilmiah. Ia juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan prosedural dalam menulis sekaligus memutuskan kapan ia mengutip dan bagaimana memparafrase sebuah pendapat (pengetahuan kondisional/kontekstual). Ia juga perlu mengevaluasi karangannya tersebut. Yang terpenting di sini bukan saja kegiatan menulis tetapi kemampuannya untuk memahami proses berpikir yang terjadi sebelum, sesaat dan setelah menulis. Di sinilah seseorang membutuhkan kemampuan metakognitif, bahkan ketika dia diminta mencipta (*to create*) yang merupakan level tertinggi dari *HOTS*, Ia harus mengevaluasi apa yang dia ciptakan. Dalam hal ini seorang pembelajar atau praktisi pembelajaran perlu memiliki metakognitif yaitu pengetahuan tentang dirinya, tugas-tugas yang dikerjakan termasuk kriteria keberhasilan tugas tersebut dan juga strategi-strategi yang diperlukan. Tanpa penerapan metakognisi, semua pembelajaran

atau tugas-tugas kognitif menjadi tidak efektif dan efisien. Bagi pendidik sendiri, cara termudah sekaligus tersulit adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat baik pada level kognitif maupun pada level metakognitif. Mengapa tersulit karena tanpa pembekalan memadai dan latihan yang terus menerus maka metakognisi sulit diterapkan dalam kelas-kelas kita.

Pertanyaan berikut adalah mengapa pembelajaran berorientasi regulasi diri itu penting? Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa regulasi diri menyangkut aspek metakognitif, motivasi dan tindakan. Ia juga terkait perasaan (emosi) dan tujuan belajar. Meskipun terlihat sederhana, pembelajaran berorientasi regulasi diri sulit dilakukan pada lingkungan belajar yang terlalu preskriptif, terkontrol dan berorientasi hasil instan dan tanpa kebebasan berpikir, berkreasi dan berekspresi. Borkowski dan Muthukrishna (1992, dalam Borkowski & Thorpe, 1994, hal. 49-50) menjelaskan ciri-ciri pembelajar yang memiliki regulasi diri:

- mengetahui sejumlah besar strategi pembelajaran
- mengetahui kapan, di mana dan mengapa strategi ini penting
- memilih dan memantau strategi dengan bijak
- berpegang pada pandangan bertahap mengenai pertumbuhan pikiran
- percaya pada usaha
- termotivasi secara intrinsik dan berorientasi pada tugas
- tidak takut gagal;
- memiliki gambaran yang konkret dan beragam tentang diri mereka sendiri
- tahu banyak tentang banyak topik

Sekarang masih kita refleksikan kebijakan kurikulum dan penerapannya di kelas-kelas. Apakah kita sudah memprioritas kepemilikan dan penerapan berbagai strategi dalam belajar dan nanti tentu dalam menghadapi dunia yang begitu kompleks dengan *D-Vucad*-nya? Apakah para pendidik sudah menerapkan *wait time*

(waktu tunggu) bagi pembelajar ketika kita mengajukan pertanyaan agar bisa memproses pertanyaan, menggali informasi yang ada dalam memori jangka panjangnya dan menyusun kalimat sebagai sarana untuk menyampaikan idenya? Apakah kita menyadari secara metakognitif bahwa pertumbuhan proses berpikir kritis dan kreatif itu berbeda-beda untuk setiap siswa sehingga pembelajaran berdiferensiasi sudah mengakomodasi kemajemukan dan keunikan keterampilan berpikir siswa? Apakah kita sudah menanamkan pada siswa sebuah kepercayaan akan pentingnya usaha dan strategi karena bersifat internal dan dapat dikendalikan? Atau kita malah membuat para pembelajar kita percaya bahwa prestasi belajar dan dalam hidup itu bergantung pada *luck* (eksternal dan tidak dapat dikendalikan), *kemampuan* (meskipun internal tetapi tidak bisa kendalikan, *situasi atau orang lain* (eksternal dan tidak bisa dikendalikan).

Mbato (2013) menemukan bahwa membantu siswa untuk memberikan penjelasan yang tepat terhadap kesuksesan maupun kegagalan adalah sangat penting agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang termotivasi, tangguh, dan memiliki efikasi diri yang tinggi. Untuk itu pendidikan kita hendaknya menekankan juga pentingnya teori atribusi dalam belajar dan dalam hidup (Mbato, 2013). Bila kita mampu menerapkan prinsip-prinsip metakognisi dan regulasi diri pada siswa kita maka siswa kita akan memiliki gambaran diri yang utuh dan mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya. Ia akan menjadi pribadi yang berpengetahuan, dan terampil dalam meregulasi emosinya, pikirannya, dan tindakan serta lingkungannya karena Ia memiliki tujuan belajar yang jelas. Tantangan ini menjadi sulit karena dunia kita dihadapi dengan disrupsi digital. Tetapi penetapan tujuan belajar siswa hendaklah dikerjakan bersama oleh siswa dan guru dan guru tidak selalu menggurui. Mbato (2013) menemukan bahwa tujuan belajar haruslah bersifat spesifik dan dapat tercapai.

Selain itu pembelajaran berbasis metakognisi dan regulasi diri dan semua pendekatan pembelajaran yang lain akan berhasil bila kita

menerapkan secara seimbang keterampilan berpikir *divergen* bukan hanya *konvergen*. Pemikiran divergen adalah kognisi yang mengarah ke berbagai arah. Beberapa di antaranya konvensional, dan beberapa orisinal (Runco, 2011). Karena beberapa ide yang dihasilkan bersifat orisinal, pemikiran divergen merepresentasikan potensi pemikiran kreatif dan pemecahan masalah (Runco, 2011). Pemikiran konvergen terjadi ketika solusi untuk suatu masalah dapat disimpulkan dengan menerapkan aturan yang berlaku dan penalaran logis. Jenis penalaran ini melibatkan pemecahan masalah dalam konteks informasi yang diketahui dan mempersempit solusi berdasarkan inferensi logis (Killgore, 2010).

Berpikir divergen (majemuk) melatih kita untuk memikirkan berbagai alternatif solusi terhadap sebuah masalah sedangkan berpikir konvergen mendorong seseorang untuk mengungkapkan satu jalan keluar terhadap masalah. Dalam konteks diskusi, *problem-based learning*, *discovery learning*, konektivis dll, kita perlu terbuka terhadap berbagai kemungkinan jawaban terhadap masalah dan bukan hanya menerima satu jawaban saja seperti yang banyak terjadi pada kurikulum berorientasi tes. Bukankah dunia ini kompleks dengan segala permasalahannya? Mengapa kelas-kelas kita justru cenderung mengajarkan yang bertentangan realitas hidup (lht. pembahasan tentang *D-Vucad* dan konsep fragmentalis, superfisialitas dan instrumentalis di bagian awal buku ini)?

Penelitian yang dilakukan oleh Jones dan Estes (2015) menemukan bahwa perbedaan individu dalam pemikiran konvergen dan divergen dapat secara unik menjelaskan variasi dalam kemampuan penalaran analogis. Hasil penelitian mereka lebih jauh memberi pencerahan terkait hubungan antara penalaran analogis dan kognisi kreatif dengan menunjukkan pemikiran konvergen dan divergen sebagai prediktor analogi verbal.

Untuk itu kelas-kelas kita hendaklah menjadi *thinking classroom* dengan segala kemajemukan berpikir dan berkreasi. Inilah salah tugas kita dalam menerapkan pengajaran dan pembelajaran

*berdiferensiasi* yang menjadi salah satu ciri Kurikulum Merdeka di mana guru melakukan tiga perannya (baca Ki Hadjar Dewantara) dalam memanusiakan manusia muda (baca Driyarkara) demi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk hal ini kita bisa belajar dari Finlandia.

Sistem pendidikan di Finlandia memberikan penekanan pada kesetaraan (*equity*), inklusi, dan demokrasi sosial, dan berbeda dari model pendidikan liberal yang berorientasi pada pasar, pilihan, dan akuntabilitas (Shirley, 2019, hal. 12). Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa sistem Pendidikan di Finlandia sering menjadi rujukan, bahkan oleh Amerika sekalipun, karena keberhasilan mereka dalam mengelola Pendidikan?

Siswa-siswa Finlandia mencatat skor tertinggi dalam tes PISA untuk anak usia 15 tahun pada tahun 2001 padahal pembelajaran di sekolah pendek, tidak banyak PR, dan standardisasi ujiannya tidak begitu ketat (Walker, 2017). Penulis memaparkan 33 strategi sederhana untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Salah satu strategi yang bisa kita kaitkan dengan pembahasan tentang regulasi diri adalah pemberian kebebasan dan pilihan di mana siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya, misalnya untuk meneliti, dan menulis layaknya seorang penulis, dan bukan pengontrolan kelas yang ketat. Pada bagian akhir dari tulisannya, Walker (2017) menyoroti pendidikan dan pembelajaran di Finlandia yang menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama. Sistem Pendidikan di Finlandia secara ringkas seperti di bawah ini (Lord, 2021):

Sistem ini [baca: pendidikan] lebih menekankan kerjasama daripada persaingan dan sangat berfokus pada permainan. Guru memiliki otonomi yang sangat besar, termasuk tanggung jawab untuk menilai siswa, dengan hampir tidak ada tes standar formal. Hanya ada sedikit pekerjaan rumah dan anak-anak dari semua kemampuan diajar bersama. Orang tua Finlandia—termasuk saya—dan sebagian besar masyarakat lainnya percaya bahwa anak-anak harus memiliki hak atas masa kanak-

kanak yang panjang dan sehat. Kreativitas adalah syarat utama di balik kesuksesan Finlandia secara keseluruhan sebagai sebuah bangsa. Berakar kuat dalam pola pikir Finlandia bahwa menemukan cara Anda sendiri untuk melakukan sesuatu mengarah pada hasil yang lebih baik daripada meniru orang lain. Mungkin satu-satunya faktor terbesar dalam keunggulan sekolah Finlandia berasal dari kepercayaan yang diberikan kepada para gurunya. Tidak ada inspektorat terpusat dan tidak ada peringkat siswa, sekolah atau guru, melainkan mereka didorong untuk mengatur kurikulum dan tes mereka sendiri, yang mengarah ke keragaman pengetahuan di antara siswa.

Dengan kata lain, pendidikan berkeberagaman perlu mempertimbangkan perbedaan individu termasuk kemungkinan mencoba pendekatan intelegensi ganda yang memang gaungnya belum terlihat dalam berbagai dokumen resmi kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa mengambil manfaat dari pendekatan intelegensi ganda. Cerita-cerita sukses dari sekolah-sekolah yang menerapkan inteligensi ganda bisa menginspirasi para guru dalam penerapan pendekatan ini, tentu disesuaikan dalam konteks Indonesia (Campbell & Campbell, 1999).

### **3.7 Profil Pendidik Indonesia Masa Depan**

UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 (JDIH, 2017) mengatakan bahwa:

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan (2) dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya ditegaskan bahwa:

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah (Bab I).

Menjadi profesional dan menjadi seorang profesional adalah dua hal yang berbeda (Hargreaves & Fullan, 2015, hal. 80). Menurut Hargreaves dan Fullan, (2015), ada tiga formula untuk modal profesional yaitu modal manusia, modal sosial dan modal keputusan (hal. 88-90). Modal manusia terkait pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar bisa mengajar dan mendidik dengan efektif termasuk di dalamnya hasrat dan komitmen moral untuk mendidik. Hargreaves dan Fullan menegaskan pentingnya modal manusia ini:

jika Anda menginginkan sistem sekolah berkinerja tinggi, ekonomi yang kompetitif, dan masyarakat yang kohesif. . .kami membutuhkan guru-guru terbaik dan paling berkualitas yang memiliki khazanah ilmu yang dalam dan luas dan keterampilan di sekolah yang tidak memiliki kemewahan menyaring anak-anak (hal. 79).

UU Guru dan Dosen Bab II Pasal Pasal 10 menyebutkan bahwa selain kompetensi professional, seorang guru juga harus memiliki meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Karena itu penulis perlu menggarisbawahi kompetensi kepribadian dan sosial yang mungkin perlu digalakkan terus menerus ke depannya. Pendidik Indonesia ke depan adalah seorang yang menghargai dan menghidupi keberagaman Indonesia baik dari segi agama, budaya, etnis, bahasa, sosial ekonomi, maupun berbagi jenis minoritas lainnya.

Dengan kata lain ke depan, pendidikan kita perlu memastikan bahwa pendidik kita adalah pelaku sejati Pancasila dan bukan hanya penggerak Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila mengingat masih terjadinya beberapa insiden yang kurang menghargai keragaman dengan pendidik disinyalir sebagai pelakunya. Pendidik Indonesia ke depan harus berkarakter inklusif dan non-diskriminatif bukan saja pada tingkat pengetahuan deklaratif tetapi terlebih pada tingkat prosedural dan kondisional/kontekstual. Bandura (1977), dalam teori pembelajaran sosialnya, menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosional orang lain. Teori pembelajaran sosial mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran dan perilaku manusia.

Salah satu cara orang belajar adalah dengan meniru orang dewasa yang bertindak sebagai *Role Model* (McLeod, 2016). Dalam teorinya tentang Zona Perkembangan Proksimal, Vygotsky menekankan tentang pentingnya orang lain yang lebih berpengetahuan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih banyak daripada pelajar. Seringkali, orang lain itu adalah orang dewasa seperti orang tua atau guru yang memberikan kesempatan pendidikan, seperti instruksi terbimbing, dalam zona perkembangan proksimal anak (Cherry, 2022; Langford, 2004). Untuk itu pendidik haruslah berjalan di depan memberi teladan, di tengah membimbing dan di belakang menyemangati (baca Ki Hadjar Dewantara) terkait relevansi Pancasila bagi anak-anak muda, termasuk dalam pendidikan ekologis.

Guru Indonesia ke depan juga perlu memiliki kemampuan metakognitif dan regulasi diri yang tinggi. Kemampuan meregulasi diri harus mencakup semua aspek kognitif, afektif dan tingkah laku dalam mencapai tujuan pembelajaran. Regulasi afektif sendiri mencakup motivasi, sikap dan perasaan (emosi), ketekalan (*Volition*), efikasi diri, atribusi dan strategi (Mbato, 2013). Ia harus menjadi guru yang resilien (tangguh) agar dapat belajar dari kerapuhannya sehingga

mampu mencegah *burnout* (kelelahan emosional) dan menjadi berdaya dan membahagikan secara emosional.

Selanjutnya kita perlu mencurahkan satu paragraf tentang pentingnya praktik refleksi dalam pelaksanaan pendidikan, seperti sudah dicanangkan dalam berbagai kurikulum kita termasuk Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Pertanyaannya adalah mengapa refleksi? Refleksi adalah kegiatan penyadaran diri yang mendukung pengajaran, pembelajaran, dan pemahaman (Matthew dkk., 2017) dan dapat meningkatkan kesadaran diri tentang diri mereka sebagai guru dan pengajaran (Arslan, 2019) serta berdampak positif pada pengembangan profesional mereka (Davis dan McDonald (2019). Mbato dan Triprihatmini (2022) menemukan kontribusi positif dari refleksi dalam meningkatkan kesadaran metakognitif para calon guru dalam mengajar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh implementasi refleksi secara eksplisit terhadap unsur-unsur kesadaran metakognitif dalam pengajaran.

Selain itu, agar guru bisa berkembang dan mampu mengembangkan identitasnya secara profesional dan membahagiakan, Ia perlu berada pada lingkungan yang memiliki otonomi dan kemerdekaan untuk mengembangkan potensinya. Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Mbato (2022) menunjukkan bahwa guru yang bahagia akan mampu memberikan pengajaran berkualitas dan menghasilkan murid yang sukses. Maka pertanyaan yang perlu kita ajukan terkait metakognisi dan regulasi diri pada siswa, bisa kita ajukan pada semua program pemberdayaan guru di negara kita. Apakah kita sudah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi guru atau kita malah terlalu mengawasi bahkan muncul budaya tidak percaya termasuk dengan menggunakan teknologi yang bukan lagi sebagai sarana pemberdayaan tetapi sebagai sarana pengawasan dan kontrol? Bukankah takut salah adalah salah satu faktor tidak berkembangnya regulasi diri? Bagi para pemangku kebijakan baiklah bahwa kita menerapkan secara bijak akuntabilitas eksternal agar akuntabilitas internal, dan tanggung jawab bisa berkembang di antara guru.

Tentu ada banyak teori belajar yang harus terus dimiliki guru. Mari kita belajar dari praktik-praktik baik pendidikan dari tempat lain, dari sekolah lain, dari negara lain, bukan untuk mengadopsi secara serampangan tetapi untuk kita jadikan pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan di masing-masing lingkungan dan lembaga pendidikan baik secara individu maupun dalam komunitas belajar. Dengan kata lain kita perlu belajar menerapkan keharusan baru yang ditawarkan Shirley (2016) dengan tetap secara kritis dan cerdas mencermati keharusan lama yang mungkin justru telah membelenggu kita dalam upaya mengembangkan dunia pendidikan di negara kita.

### **3.8 Pesan Reflektif**

Bab ini telah mencoba mengurai secara ringkas isu sentralisasi, desentralisasi, pendidikan antarbudaya dan ekologis, pendidikan inklusif dan non-diskriminatif. Juga telah dipaparkan secara gamblang kurikulum berorientasi pelajar dan profil pendidik Indonesia ke depan. Penulis menyadari masih banyak gagasan yang belum dibahas maupun secara cakupan maupun secara isi. Meskipun demikian baiklah kita merefleksikan pesan dan makna yang kita dapatkan setelah membaca Bab ini agar kita mampu untuk saling memperkaya dan diperkaya melalui sikap *learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together* (Rodrigues, 2021) dalam dunia yang oleh Paus Fransiskus (2015, dalam Harun, 2016) disebut sebagai rumah kita bersama di mana cinta kasih, solidaritas dan persaudaraan terjalin demi menciptakan dunia yang baik, yang lebih adil dan membahagiakan bagi semua termasuk terhadap bumi.



# BAB IV

## PERAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA DALAM KONSTELASI PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN

### 4.1 Pengantar

**B**ab ini akan secara khusus mendiskusikan peran Universitas Sanata Dharma dalam Pendidikan Indonesia masa depan. Mengapa Universitas Sanata Dharma? Salah satu alasannya adalah bahwa Universitas Sanata Dharma merupakan salah satu Universitas swasta di Indonesia yang didirikan atas hasil diskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1955 atau tepatnya 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian Universitas Sanata Dharma telah berkiprah dalam pembangunan pendidikan Indonesia dan tentunya sumber daya manusia Indonesia selama 67 tahun.

Universitas Sanata Dharma juga tidak bisa dipisahkan dari salah satu tokoh pendidikan Indonesia, sekaligus Rektor pertamanya yaitu Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara. Selain itu, Universitas Sanata Dharma tidak bisa dipisahkan dari pendidikan Yesuit di dunia. Lembaga pendidikan Yesuit sendiri pertama kali didirikan oleh St. Ignatius dan kawan-kawan pada tahun 1548 atau 474 tahun yang lalu. Karena ini, Bab ini akan secara gamblang membicarakan Tokoh Driyarkara, Pendidikan Yesuit dan Universitas Sanata Dharma.

## 4.2 Driyarkara

Bagian ini secara khusus membicarakan salah satu tokoh penting pendidikan di Indonesia di awal kemerdekaan yang karya dan gagasannya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia cukup signifikan tetapi pemikirannya tidak begitu nampak dalam konteks pendidikan nasional dewasa ini. Kontribusi Driyarkara terhadap dunia pendidikan ditandai dengan diberikannya penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Habibie pada tanggal 13 Agustus tahun 1999 atas jasa-jasa Beliau terhadap Negara Indonesia (Sudiarja dkk, 2006, hal. xxxviii). Kontribusi lain yang tidak kalah penting adalah menjadi Dekan dan Rektor pertama IKIP Sanata Dharma (1955-1967) yang menjadi cikal bakal Universitas Sanata Dharma. Perlu dicatat bahwa pendirian IKIP Sanata Dharma kala itu merupakan Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI) pada tahun 1950-an (Sejarah - Universitas Sanata Dharma. (n.d.). Sejak itu (1955) Universitas Sanata Dharma mulai berperan dalam pendidikan di Indonesia dengan menyediakan tenaga guru ke sekolah menengah. Meskipun Beliau diakui negara sebagai tokoh yang cukup berjasa, Driyarkara dan pemikirannya tidak begitu berdampak dalam berbagai dokumen resmi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Hal ini antara lain terlihat dari minimnya rujukan terhadap karya-karya maupun pemikiran Driyarkara dalam Naskah Akademik RUU Sisdiknas (Naskah, Agustus, 2022). Bahkan dalam Naskah setebal 361 halaman itu, nama Driyarkara hanya disebut satu kali dibandingkan tokoh-tokoh pendidikan lainnya.

Meskipun demikian, Bab ini tidak bermaksud menyajikan secara lengkap semua pemikiran maupun karya Driyarkara dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pembaca yang tertarik diharapkan membaca karya lengkap Driyarkara (Sudiarja dkk, 2006) dan berbagai karya tulis lainnya.

#### 4.2.1 Konteks Pemikiran Driyarkara Secara Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis

Driyarkara menjadikan manusia sebagai pusat pemikirannya. Hal ini bisa terlihat dari munculnya 1081 kata manusia dalam tulisannya (lht. Sudiarja dkk, 2006). Driyarkara memandang manusia sebagai makhluk yang istimewa dan bisa merenungkan diri sendiri (Sudiarja dkk, 2006, hal. 10). Keistimewaan manusia terletak pada kemerdekaannya (hal. 10). Yang menarik adalah Driyarkara menggunakan kata manusia dalam kaitanya dengan kemerdekaan sebanyak 51 kali. Nampaknya kemerdekaan manusia merupakan hal yang esensial bagi manusia untuk menemukan dirinya dan mengembangkan potensinya (eksistensinya). Driyarkara melihat kemerdekaan manusia sebagai sebuah wadah kosong yang perlu harus terus diisi dalam kerja sama dengan lain.

Driyarkara memandang manusia secara fenomenologi eksistensial yaitu makhluk yang kehadirannya selalu ada bersama orang lain dan mengekspresikan keberadaannya dalam kaitan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang berjalan bersama menuju Kerajaan Allah (Muhtar, 2014). Ia bukanlah serigala bagi sesamanya (Thomas Hobbes). Keberadaan manusia hanya dapat dilihat dan dimaknai dalam hubungannya dengan dunia jasmani (hubungan ke bawah), dengan sesamanya (hubungan horizontal) dan dengan Tuhannya (hubungan vertikal) (Busro, 2014). Melalui teladan hidupnya, Driyarkara adalah seorang pendidik sejati, dan melalui tulisan-tulisannya, Ia memberikan pertanggungjawaban akan apa yang Ia lakukan (Sudiarja dkk, 2006, hal. XXXIV).

Dalam hal ilmu mendidik, pemikiran Driyarkara dijelaskan secara fenomenologis yaitu dengan menjelaskan sebuah persoalan secara perlahan-lahan disertai banyak contoh. Hal ini dikarenakan Driyarkara “menggunakan gaya seorang guru tanpa harus menggurui” (Sudiarja dkk, 2006, hal. xv). Driyarkara:

menuntun pembaca memasuki kedalaman persoalan manusia, masalah pendidikan, masalah religi dan budaya, kehidupan bersama dalam Negara Pancasila, dan lain sebagainya. Gaya bahasa semacam ini membuat karangan terasa lebih menyapa karena bersifat kolokial daripada analitis (hal. 10).

Pada bagian lain Driyarkara menekankan bagaimana pengetahuan diperoleh yaitu “Sebab ilmu pengetahuan itu tidak terutama hidup dari jawaban, melainkan dari pertanyaan” (hal. 297).

Nampaknya Driyarkara meyakini bahwa cara mengajar yang dialektik dan dialogis adalah salah satu cara orang memperoleh pengetahuan. Pendekatan pembelajaran pasca-positivis seperti ini sangatlah mirip dengan berbagai teori belajar yang mengedepankan kemerdekaan termasuk metakognisi, regulasi diri, maupun imitasi model oleh Bandura, *project-based*, *problem-based*, *cooperative learning* dan teori ZPD Vygotsky dan juga konsep guru yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara.

Sebagai pendidik, Driyarkara sangat mementingkan etika atau moralitas. Dalam hal ini Driyarkara menekankan bagaimana manusia menggunakan ilmu atau kedudukan, atau keberadaannya (aksiologi). Dalam buku setebal 1500san halaman yang berisi pemikiran Driyarkara (Sudiarja dkk, 2006) ditemukan 217 kata etika, 530 kata moral dan 338 kata kesusilaan atau 1085 kata terkait moralitas atau 72,3 % dari jumlah halaman buku. Dalam hal ini Driyarkara menyamakan istilah etika dan kesusilaan, “manusia terikat oleh suatu cara bertindak yang kita sebut kesusilaan atau etika. Ia tak dapat berbuat semau-maunya saja, baginya ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang diwajibkan (hal.1004)”. Menurut Driyarkara, etika adalah “ajaran tentang perbuatan manusia sebagai realisasi dorongan untuk mencapai bahagia. Kehausan akan bahagia adalah sesuatu yang nyata sekali dalam kehidupan manusia” (hal 1203). Meskipun demikian, Driyarkara menekankan kehendak bebas dan kemerdekaan:

Ia dapat dan harus menentukan perbuatan-perbuatannya sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah kesucilaan yang menguasai perbuatan-perbuatannya itu. Adapun aturan-aturan kesucilaan itu hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keyakinan akan kebenarannya dan didukung oleh kehendak yang bebas, merdeka (hal. 1004).

## 4.2.2 Driyarkara dan Pemikirannya tentang Pendidikan

### 4.2.2.1 Pendidikan adalah Hak Fundamental dan Realitas

Sekitar 838 kata pendidikan muncul dalam karya Driyarkara dan 926 kata pendidik yang muncul dalam pemikiran Driyarkara (Sudiarja dkk, 2006). Driyarkara memang dikenal bukan saja sebagai seorang filsuf tetapi seorang pendidik. Dalam bidang pendidikan, Beliau dikenal dengan istilah Hominisasi dan humanisasi (yang Ia pinjam dari Thomas Aquinas). Bagi Driyarkara, pendidikan adalah “karya yang memimpin manusia muda (anak) ke arah kemanusiaan penuh atau kedewasaan. Dalam tingkat itu manusia harus melaksanakan hidupnya sebagai manusia” (hal. 220). “Pendidikan adalah fenomena fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa di mana ada kehidupan manusia, di situ bagaimanapun juga ada pendidikan” (hal. 270).

Pemikiran Beliau tentang pendidikan sebagai hak fundamental manusia sangatlah sejalan dengan berbagai produk hukum terkait pendidikan di Indonesia, misalnya Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional. Lebih lanjut Beliau menegaskan (Sudiarja dkk, 2006):

... problem pendidikan adalah problem eksistensial dan harus ditinjau melalui eksistensia manusia dengan segala macam perlakuan dan dialektikanya. Bagaimana eksistensia manusia itu dilaksanakan, bagaimana harus kita pandang bentuk-bentuk

yang konkret daripadanya, mengapa dan bagaimana harus dikomunikasikan, manakah syarat-syarat komunikasi itu sehingga tampak, mengapa, bagaimana, dan dalam arti mana harus ada ketetapan dan perubahan (hal. 272).

Karena itu pendidikan merupakan sebuah realitas yang dinamis dan bukan sebuah ide (Sudiarja dkk, 2006):

Pendidikan bukanlah suatu ide. Pendidikan adalah suatu realitas. Realitas janganlah dipandang sebagai sesuatu yang hanya "terletak" di sini atau di sana tanpa berubah. Realitas di sini harus dipandang sebagai dinamika, sebagai aktivitas. Dalam memandang pendidikan, kita tidak boleh diikat oleh kata. Kalau istilahnya memang seperti "kata mati", tidak membayangkan dinamika, seperti kata "guntur", "geledak", "air mancur". Dalam berpikir tentang pendidikan kita harus menerobos istilah (kata) itu dan melihat apa yang terjadi. Maka, nyatalah bahwa pendidikan (lebih tepat mendidik dan dididik) adalah sesuatu yang "berjalan", pendidikan adalah suatu pengembangan dan perkembangan yang aktif (hal 376).

Dalam hal ini, Driyarkara sangatlah visioner. Beliau menyuarakan apa yang dikatakan oleh Shirley (2016) tentang perlunya keharusan baru untuk menggantikan keharusan lama dalam menyikapi pendidikan termasuk kurikulumnya yaitu keharusan berdasarkan bukti dan bukan ideologis, keharusan interpretasi dan bukan imperial, keharusan profesional dan bukan preskriptif, keharusan global dan bukan sempit, dan keharusan eksistensial dan bukan instrumental (hal. 25).

#### 4.2.2.2 Pendidikan Keluarga dan Sekolah

Driyarkara (Sudiarja dkk, 2006) juga menekankan keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama:

... pendidikan yang terlaksana dengan dan dalam kesatuan keluarga itu kita sebut primer atau perwujudan utama. Hal ini tidak berarti bahwa di luar kesatuan tritunggal itu tidak ada

kemungkinan pendidikan. Perwujudan primer berarti bahwa perwujudan itu adalah yang fundamental, yang sewajarnya, yang menurut kodratnya, sehingga tidak pernah akan bisa diganti sepenuhnya. (hal. 397).

Beliau menegaskan perlunya cinta kasih sebagai nilai dasar dan semangat tritunggal dalam keluarga ‘Pendidikan adalah suatu aspek dari kesatuan itu; aspek ini tampak jika memandangnya melalui anak. Cinta kasih yang menyebabkan tritunggal itu juga cinta kasih yang mengangkat anak sampai ke tingkat manusia (hal. 397)’. Beliau menekankan bahwa pendidikan dalam keluarga terjalin melalui kesatuan tritunggal keluarga yaitu Ayah, Ibu dan Anak yang hidup bersama dalam memanusiakan manusia muda. Dari segi anak, Beliau berpendapat bahwa hidup bersama menjadikan “anak memanusia sebagai anak, untuk lambat laun bisa memanusia sebagai manusia purnawan” hal. 402). Driyarkara melihat pendidikan keluarga sebagai pemanusiaan yang akan muncul melalui pertumbuhan ke kemanusiaan. Di sinilah terjadi pembudayaan anak sehingga dapat membudaya sendiri sebagai manusia purnawan (hal. 416). Namun pertumbuhan bersifat dinamis dan fleksibel:

tidak dapat kita perhitungkan dan kita tentukan sebelumnya dengan pasti. Selamanya mendidik itu berupa *vivere pericoloso*, seperti seluruh hidup manusia. Oleh sebab itu, tidak mungkin dipaksa dalam suatu sistem yang tertentu dan tepat karena kita juga melihat sistem dalam pendidikan keluarga. Janganlah dicari suatu kesatuan teknis dan mekanis. Dengan mengingat batas-batas ini, maka kita bisa mencoba menemukan kesatuan dalam pendidikan (hal. 399).

Dalam hal ini Driyarkara juga menekankan pentingnya proses pemanusiaan manusia secara holistik tanpa paksaan dan proses ini berlangsung sepanjang hayat. Konsep pendidikan Driyarkara sangatlah relevan dengan pendidikan karakter yang menjadi salah satu fokus persekolahan kita. Shary (2022) mengatakan bahwa pendidikan yang

memanusiakan manusia melalui konsep hominisasi dan humanisasi Driyarkara sangat cocok untuk pendidikan karakter yang dapat dilakukan melalui pendekatan sejarah, karena konsep pendidikan ini terbukti dapat mendorong kemajuan pendidikan Indonesia pada masa Driyarkara dengan menembus batas-batas primordial (Sigarlaky, 2020). Widya (n.d.) mengemukakan lima terobosan konkrit yang dapat diambil dari filosofi pendidikan Driyarkara yaitu: (1) peningkatan kemanusiaan melalui kebudayaan untuk mencapai peradaban tinggi; 2) pendidikan kesetaraan bagi manusia sehingga mereka saling menghargai sebagai manusia dengan derajat yang sama; 3) pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia yang setara, partisipatif, saling menghormati, mandiri dan memiliki ketekadan diri; 4) pendidikan terutama adalah dilakukan orangtua dalam keluarga sebagai pendidikan informal dan dilakukan di sekolah melalui pengembangan religiositas, etika, estetika, psikomotorik (seni, ketrampilan), dan demokrasi; 5) pendidik menjadikan pendidikan sebagai pengamalan iman melalui ketulusan niat luhur dan kecintaan pada anak didik, penghormatan pada peserta didik dalam kemanusiaan yang setara. Selanjutnya pemikiran Driyarkara tentang pendidikan tertuang pada 13 dalil pendidikan.

#### 4.2.2.3 Tiga Belas Dalil Pendidikan Driyarkara

Ketiga belas dalil pendidikan Driyarkara adalah sebagai berikut (Sudiarja dkk, 2006, hal. 420-464):

- 1) Pendidikan tidak boleh bersifat individualistis atau stato-sentris, melainkan harus bersifat personalistis
- 2) Mendidik adalah hak dan kewajiban orang tua
- 3) Adalah kewajiban negara: mengakui, melindungi, dan membantu pelaksanaan hak dan kewajiban itu
- 4) Negara melaksanakan tugasnya mengenai pendidikan dengan memperkembangkan pengajaran
- 5) Untuk membentuk konstruksi pengajaran, hendaknya pandangan kita janganlah terutama pragmatis, melainkan harus inkulturatif-progresif, dalam arti seluas-luasnya

- 6) Bangsa kita sekarang ini sedang mengembara mencari integrasi
- 7) Tujuan menggunakan unsur-unsur asli dalam pendidikan dan pengajaran bukanlah menyuburkan barang-barang kuno, melainkan untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan
- 8) Pengajaran harus menghasilkan tenaga-tenaga yang penuh keberanian, tanggung jawab, dan cerdas
- 9) Pengajaran harus lebih memperhatikan segi praktis dan berdiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari (Sekarang disebut kontekstual dan konkrit)
- 10) Pada umumnya, fungsi edukatif dari suatu mata pelajaran pada sekolah lanjutan ialah membantu manusia muda dalam menyelami dunianya dan dengan menjadi manusia
- 11) Fungsi edukatif dari kelompok mata pelajaran kebudayaan adalah membantu manusia muda dalam memasuki alam kebudayaan
- 12) Kelompok mata pelajaran sosial membantu manusia muda dalam pertumbuhannya untuk melihat dunianya sebagai *mit-welt* dan dirinya
- 13) Kelompok mata pelajaran eksakta membantu manusia muda dalam proses penyelaman dan penguasaan alam jasmani: proses ini adalah suatu unsur dalam proses menjadi manusia.

#### 4.2.2.4 Pesan Reflektif

Apa makna yang bisa kita petik dari kekayaan pemikiran Driyarkara dari ketiga belas dalil pendidikan beliau? Tentu sangatlah terbatas pada konteks buku ini untuk menguraikan satu persatu. Meskipun demikian, beberapa dalil Beliau sangatlah jelas dan sudah termaktub dalam UUD maupun UU turunannya dan juga dalam kebijakan kurikulum. Penulis berpendapat bahwa Driyarkara adalah seorang pendidik Indonesia sejati yang nasionalis dan visioner. Misalnya, dari dalil pertama terkait pendidikan yang harus personalistik dan bukan individualistik bisa kita maknai sekarang sebagai pentingnya kita mengikis sifat egoisme, konsumerisme dan keserakahan yang merupakan buah-buah dari individualistik. Sebaliknya dengan

personalistis, kita hendaknya melaksanakan pendidikan yang inklusif, non-diskriminatif dengan menghargai perbedaan dan keragaman individu. Menarik bahwa isu-isu ini muncul di Kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi.

Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan yang inkulturatif-progresif, dalam arti seluas-luasnya dan mewaspadaikan pendidikan yang terlalu pragmatis. Isu-isu primordialisme, disintegrasi dalam arti luas, krisis-krisis kemanusiaan, budaya kekerasan dan pendidikan berbasis dan berorientasi industri dan pasar merupakan buah-buah pendidikan yang terlalu pragmatis.

Beliau juga menekankan betapa pentingnya pendidikan berorientasi *soft skills* selain *hard skills* ketika Beliau menegaskan bahwa pengajaran harus menghasilkan tenaga-tenaga yang penuh keberanian, tanggung jawab, dan cerdas, dan ini melebihi apa yang tertuang dalam ijazah dan transkrip yang merupakan hasil ujian. Selain itu pendidikan kita haruslah kontekstual dan konkrit karena berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketiga dalil terakhir Beliau berkenaan dengan perlu dikikisnya dikotomi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penjurusan berbasis budaya (bahasa), ilmu-ilmu sosial maupun eksata. Pada intinya pemanusiaan manusia menjadi semakin semakin lengkap dengan adanya berbagai bidang keilmuan yang semuanya akan saling melengkapi dan memperkaya baik dalam pembangunan bangsa, masyarakat, keluarga maupun pribadi. Mungkin bisa kita bayangkan bagaimana miskinnya hidup yang kita jalani bila semua orang mengambil jurusan yang sama dan profesi yang sama. Kalau semua orang jadi dokter misalnya, siapa yang akan bermain sinetron dan bernyanyi untuk memuaskan dahaga estetika kita ketika kita tidak sakit atau ketika kita sakit gigi setelah dibedah oleh dokter gigi? Bagi penulis, ke-13 dalil ini merujuk pada hak seseorang terhadap pendidikan yang inklusif, non-diskriminatif, multikultural, nasionalis, kontekstual, integratif dan holistik di mana negara berkewajiban menyelenggarakannya.

Mengakhiri bagian ini penulis ingin menyampaikan bahwa kekayaan pemikiran Driyarkara belum mampu penulis sajikan sejarah lengkap dan utuh. Pembaca yang tertarik diharapkan mendalami dan memperkaya informasi yang didapatkan pada Bab ini dari berbagai sumber lain.

### **4.3 Pendidikan Yesuit**

#### **4.3.1 Sekilas Pendidikan Yesuit**

Universitas Sanata Dharma merupakan bagian dari sejarah panjang Pendidikan oleh Serikat Yesuit. Dilansir dari Xavier Edu (n.d.) bahwa Ignatius dari Loyola dan rekan-rekannya mendirikan Serikat Yesus pada tahun 1540. Begitu Ordo itu didirikan, mereka mengorganisasi dan membuka perguruan tinggi untuk pendidikan para pemuda yang bergabung dengan ordo religius Jesuit. Tujuh tahun kemudian, Ignatius membuka sekolah Jesuit pertama untuk pemuda awam. Pada saat kematian Santo Ignatius, terdapat 1.000 Jesuit, sebagian besar dari mereka terlibat dalam 35 sekolah yang telah didirikan. Dua puluh lima tahun kemudian jumlah sekolah meningkat menjadi 144, dan 35 tahun berikutnya mendekati 400. Pada akhir tahun 1700-an, ada lebih dari 800 perguruan tinggi dan universitas Jesuit di seluruh dunia. Saat ini terdapat 189 lembaga pendidikan tinggi Yesuit di seluruh dunia (Boler College, n.d.).

Kontribusi dunia pendidikan Yesuit di Indonesia diwujudkan melalui Yayasan Kanisius dengan SMA va Lith sebagai SMA tertua di Pulau Jawa, tepatnya di Muntilan yang didirikan pada tahun 1918 (Sejarah Yayasan, 2019). Terdapat banyak SD dan SMP Kanisius setelah kemerdekaan yang memiliki kontribusi terhadap dunia pendidikan Indonesia khususnya di Pulau Jawa, yang banyak di antaranya sudah tidak bisa beroperasi karena kekurangan siswa maupun karena kekurangan dana.

Saat ini terdapat empat perguruan tinggi Yesuit, sembilan sekolah menengah, dan tiga pendidikan calon imam (Serikat Yesus, n.d.) selain banyak sekolah dasar kanisius yang penyelenggaraannya telah diserahkan ke Keuskupan atau sudah tidak beroperasi lagi.

#### 4.3.2 Nilai-nilai Dasar Pendidikan Yesuit

Pendidikan Yesuit sejak abad ke-16 telah ditandai oleh empat kualitas dari apa yang sekarang dikenal sebagai paradigma pendidikan Ledesma-Kolvenbach, yaitu utilitas, keadilan, humanisme, dan iman. Kualitas utilitas memberi orang “keuntungan untuk kehidupan praktis. Bahayanya adalah pemahaman pendidikan yang murni utilitarian dapat mengarah pada subordinasi nilai-nilai yang paling dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang adil — atau bahkan penghinaan terhadapnya. Universitas Jesuit tidak dapat hanya puas dengan hanya mentransmisikan pengetahuan instrumental. Oleh karena itu pendidikan Jesuit perlu mencakup tiga kualitas lain selain kegunaan. Keadilan memungkinkan siswa untuk berkontribusi pada “tata kelola urusan publik yang tepat dan perumusan hukum yang tepat” untuk mempromosikan kebaikan bersama. Di zaman modern, demokrasi membutuhkan warga negara yang bertanggung jawab yang berpartisipasi dalam urusan publik, mempromosikan kesempatan yang sama, dan berkomitmen untuk bekerja sama untuk kebaikan bersama. Humanisme adalah kualitas lain dari pendidikan Jesuit, sebuah ciri yang berusaha mengangkat manusia dengan memperhatikan "sopan santun, keunggulan, dan kesempurnaan pada sifat rasional mereka." Humanisme bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti belas kasih, kesederhanaan, kebijaksanaan, ketabahan dll dan mencari kehidupan yang lebih baik untuk semua orang dan memupuk kesejahteraan makhluk hidup lainnya dan planet. Aspek iman pendidikan Jesuit berusaha menawarkan kepada siswa pengalaman transenden dengan menunjukkan kepada mereka kemungkinan terbuka terhadap Tuhan sebagai tujuan akhir mereka. Ini adalah pemahaman tentang iman yang mengedepankan cinta sesama dan

menolak agama sebagai alat negasi, pengucilan, dan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda (Álvarez, 2014). Dengan kata lain pendidikan Yesuit berorientasi pada transformasi kemanusiaan.

Sosa (2022) menggambarkan bahwa kemanusiaan (dunia) dewasa ini mengalami transformasi yang mendalam dan berada dalam perubahan zaman sebagai berikut:

Kita telah menyaksikan transformasi mendalam dalam kemanusiaan selama empat tahun, sejak pertemuan Bilbao tahun 2018. Kita menemukan diri kita di tahap lain sejarah, sebuah tahap yang kita rasakan tetapi belum kita lihat dengan jelas. Kita mencoba menggambarannya sebagai “perubahan zaman”, “zaman pengetahuan” karena kita merasakan kedalaman perubahan yang sedang berlangsung dalam semua dimensi kehidupan manusia. Transformasi datang tanpa memberi kita cukup waktu untuk memahami apa yang terjadi, apalagi untuk menyiapkan diri kita secara memadai (hal. 1).

Transformasi pada kemanusiaan kita dipenuhi dengan ketegangan, termasuk di Universitas Yesuit yaitu:

Pada saat yang sama kita terus mengalami, dalam kehidupan sehari-hari universitas, ketegangan yang melekat pada hakikat universitas. Ketegangan antara keunggulan akademik dan pembentukan pribadi yang utuh. Ketegangan antara pemenuhan tuntutan saat ini terhadap infrastruktur dan teknologi, dan penyediaan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ketegangan antara sejarah, tradisi yang telah membuat institusi seperti yang kita saksikan, dan tantangan krisis saat ini yang membuka masa depan yang tidak pasti. Ini dan banyak ketegangan lainnya memenuhi pikiran, hati, dan pekerjaan sehari-hari mereka yang telah yang berkecimpung dalam dunia pendidikan (Sosa, 2022, hal. 1).

Ketegangan-ketegangan dalam kehidupan kita di Universitas tentu tidak terlepas tiga ‘virus’ utama di dunia ini yang oleh Sosa

digambarkan sebagai fragmentalisme, superfisialitas dan instrumentalitas seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas (poin 1.1.1.2) (dari teks pidato Pertemuan Asosiasi Universitas Yesuit, Sosa, 2022). Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, semua pelaku pendidikan di Institusi Yesuit diharapkan melakukan tujuh (7) berikut:

- 1) Menyiapkan masa depan membutuhkan *discernment* saat ini:

Pater Artur Sosa, SJ (Sosa, 2017) menekankan *Common Discernment* sebagai kesatuan pikiran dan hati dalam pengambilan keputusan apostolik dan komunitas berdasarkan *best practices* dan juga ketersediaan literatur serta proses formasi bagi siapapun yang terlibat dalam misi pendidikan Yesuit. *Discernment* haruslah menjadi cara untuk maju dan melakukan sesuatu. *Discernment (pemeriksaan batin dalam proses pengambilan keputusan)* harus dilakukan secara terus menerus karena kita berada dalam dunia yang terus berubah. Melalui pemeriksaan batin yang terus menerus ini, kita akan menemukan Tuhan dalam segalanya dan menemukan segalanya dalam Tuhan. Inilah hakikat kontemplasi, yang diajarkan St. Ignasius dari Loyola (Loyola Press, n.d.).

Dalam dokumen berjudul, *Jesuit Schools: A Living Tradition in the 21<sup>st</sup> Century, An ongoing exercise of discernment setebal 94 halaman* (IJACE, 2019) kata *discernment* disebutkan sebanyak 98 kali (104,3%) atau melebihi jumlah halaman. Hal ini paling tidak hendak menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Jesuit perlu mengintegrasikan pemeriksaan batin dalam praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran.

*Discernment* hendaknya dilakukan dalam upaya untuk memahami tantangan dan kesempatan dalam dunia kita dewasa ini yang berujung pada pembaruan, inovasi dan imajinasi pendidikan (IJACE, 2019, hl. 5). Penekanan pada *Discernment* membuat orang bersedia untuk mendengarkan, berdiskusi,

melakukan percakapan dan berkreasi (hal. 8). Karena itu pendidikan Yesuit memberikan penekanan pada empat hal ini yaitu: (1) menunjukkan jalan menuju Tuhan melalui Latihan Rohani dan pemeriksaan batin; (2) berjalan dengan orang miskin, orang yang terpinggirkan, mereka yang martabatnya telah dilanggar, dalam misi rekonsiliasi dan keadilan; (3) mendampingi kaum muda dalam menciptakan masa depan yang penuh harapan; dan (4) berkolaborasi dalam merawat dunia sebagai rumah kita bersama (Universal Apostolic, 2019). Dalam melakukan *discernment*, pendidikan Jesuit tidak hanya berfokus pada yang telah salah kita lakukan tetapi bagaimana kita bisa melakukan dengan lebih baik. Proses *discernment* dilakukan melalui penerapan *Dimensi Paradigma Pedagogi Ignasian*, yaitu: *Konteks, pengalaman, refleksi, tindakan, evaluasi* sebagai sebuah siklus yang tidak terputus.

2) Meningkatkan Persaudaraan

Persaudaraan dibangun melalui kolaborasi dengan orang-orang, yang dipimpin oleh keyakinan agama lain, pilihan kemanusiaan atau keinginan untuk melayani, bergabung dalam bekerja menuju tujuan rekonsiliasi dan keadilan yang sama (Sosa, 2022). Terlihat dengan jelas bahwa pendidikan Yesuit sangatlah terbuka untuk bekerja sama dengan semua orang dalam semangat solidaritas tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan.

3) Melakukan dialog

Dialog otentik merupakan salah satu ciri khas pendidikan humanistik Yesuit seperti yang ditegaskan Pater Sosa (Sosa, 2022):

Tradisi humanistik dari identitas institusi universitas kita mengilhami penciptaan pengetahuan melalui dialog multifaktor yang mencakup keragaman perspektif dari semua disiplin ilmu yang dibudidayakan di universitas. Dialog ini menuntut

komunikasi yang lancar dan konstan sebagai sarana yang diperlukan untuk membangun dan menjaga kesatuan pikiran dan hati yang memberi makna bagi lembaga. (hal. 7):

Dialog memiliki banyak manfaat diantaranya adalah untuk mengatasi fragmentasi pengetahuan ilmiah, menjembatani komunikasi lintas generasi dan lintas budaya, mengambil keputusan dalam cakrawala kebaikan bersama, yang memungkinkan politik yang mengarah pada keadilan dan kepenuhan hidup bagi semua pribadi manusia, selaras dengan lingkungan (Sosa, 2022). Dialog menembus sekat-sekat budaya dan agama sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan bangsa Indonesia berkeadilan termasuk terhadap lingkungan tempat kita hidup dan ini sesuai dengan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

4) Meningkatkan hubungan antar budaya dan antar generasi

Pater Jenderal Sosa juga menegaskan perlunya menjalin komunikasi antar budaya dan generasi dalam dunia yang saling terhubung dan multikultural:

Dari pengalaman antargenerasi dan antarbudaya, kita dapat mengenali kekayaan, risiko, dan potensi masa depan dalam dua karakteristik mendasar umat manusia saat ini: keragaman budaya dan keragaman usia yang membentuk populasi manusia. Untuk melestarikan dan mengambil manfaat dari kekayaan ini, kita harus menghadapi dua tantangan yang kompleks dan indah: untuk maju menuju pemahaman antarbudaya dengan kesadaran yang mengakar dalam pengertian antargenerasi. Mengakui keragaman budaya sebagai kekayaan membawa kita untuk bergabung dengan arus yang melandasi dunia global yang saling terhubung pada multikulturalitas sebagai fundamental karakteristik dunia hari ini dan besok. (Sosa 2022, hal. 7).

Komunikasi tanpa sekat akan memungkinkan terjalannya solidaritas yang saling memperkaya seperti ditandaskan Pater Jenderal Sousa:

Ciri khas kolaborasi identitas kita meliputi solidaritas yang lahir dari perasaan diri kita untuk menjadi saudara dan saudari dari semua manusia, diperkaya oleh pemahaman antarbudaya dan hubungan antargenerasi, selalu siap untuk mengulurkan tangan kepada siapa pun yang membutuhkannya. Solidaritas di antara orang-orang dan solidaritas institusional sesuai dengan cara kita berada (Sosa, hal. 7).

5) Menjadi Men and Women for and with others

Pater Jenderal menegaskan bahwa “menjadi laki-laki dan perempuan untuk dan bersama orang lain” adalah buah dari solidaritas yang terdidik dengan baik. Komunitas universitas di dalam institusi kita dipanggil untuk hidup dengan solidaritas itu. Mereka harus menjadi institusi dengan budaya organisasi yang dikonfigurasi untuk mewujudkan keberadaan dan keberlanjutan (Sosa, 2022, hal. 13).

6) Merawat lingkungan

Terkait kewajiban kita merawat lingkungan, Pater Jenderal menegaskan bahwa “kita bergerak menuju rekonsiliasi dengan lingkungan, membangun kembali keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam yang mempromosikan tidak hanya kehidupan penuh semua pribadi manusia tetapi juga kehidupan itu sendiri di planet Bumi” (Sosa, 2022, hal.1).

7) Mencegah otokrasi dalam pemerintahan

Pater Jenderal menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kemanusiaan karena masyarakat demokratis tidak hanya mencari kemakmuran materi tetapi juga pembangunan integral yang berasal dari mengejar kebaikan bersama (Sosa, 2022, hal. 9). Rezim otokrasi mengusulkan untuk mempertahankan

kekuasaan tanpa batas melalui polarisasi masyarakat dan dukungan pengikut yang bertindak seperti penggemar tim olahraga. Rezim otokratis yang ditopang oleh populisme, polarisasi, dan pasca-kebenaran menghasilkan suasana di mana segala sesuatu selalu diragukan kecuali kata-kata otokrat. Karena itu, sebagai universitas Beliau menegaskan:

Sebagai perguruan tinggi yang identitasnya meliputi komitmen terhadap misi rekonsiliasi dan keadilan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membantu membedakan kebenaran dari kepalsuan yang digunakan untuk membenarkan otokrat yang menampilkan diri mereka sebagai satu-satunya pembela asli rakyat. Sebagai eksponen budaya demokrasi, kita tahu bahwa warga negaralah yang sadar, bebas, dengan ide-ide yang kontras, yang mampu berdialog dan mengambil keputusan dalam cakrawala kebaikan bersama, yang memungkinkan politik yang mengarah pada keadilan dan kepenuhan hidup bagi semua pribadi manusia, selaras dengan lingkungan. (2022, hal. 11).

Perguruan tinggi diharapkan memperdalam komitmen mereka untuk bekerja demi keadilan (Alvarez, 2014).

#### 4.3.3 Tujuan dan Ciri-ciri Pendidikan Jesuit

Tujuan praktik pedagogis Universitas Yesuit menurut Garanzini dan Baur (2022) adalah: 1) mempromosikan dialog dan rekonsiliasi yang otentik; 2) mempromosikan keunggulan manusia dalam setiap aspek kehidupan; 3) mempromosikan eksplorasi dan penemuan yang berfokus pada berbagai disiplin ilmu; 4) mempromosikan eksplorasi dan apresiasi antar budaya; 5) memberikan kontribusi baik dalam teori maupun praktik untuk mempromosikan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan; 6) mempromosikan pembangunan visi global pada mahasiswa dan dosen; dan 7) mempromosikan pertumbuhan spiritual yang otentik dan pengembangan iman melalui magang. Semua tujuan ini dilakukan berdasarkan pendekatan utama Paradigma Pedagogi Ignasian.

Serikat Yesus di Amerika Serikat (Jesuit Conference, 2002) menerbitkan sebuah dokumen, *Communal Reflection on the Jesuit Mission in Higher Education: A Way of Proceeding*, yang menonjolkan lima karakteristik pendidikan tinggi Jesuit yaitu:

- Dedikasi terhadap martabat manusia dari perspektif iman Katolik dan Jesuit
- Penghormatan dan refleksi berkelanjutan atas pengalaman manusia
- Kebersamaan yang kreatif dengan rekan kerja
- Perhatian terfokus untuk siswa
- Keadilan dan solidaritas

Sementara itu, tujuan pendidikan Jesuit di abad 21 adalah “membarui tradisi yang hidup dari pendidikan kita sebagai latihan *discernment* yang terus berlangsung” (IJACE, 2019, hal. 5). Pendidikan Jesuit bertujuan untuk melanjutkan pendidikan laki-laki dan perempuan untuk dan bersama orang lain dalam konteks keunggulan kemanusiaan yang membedakan tradisi pendidikan Jesuit dari pendidikan lain baik pada konteks lokal, regional maupun global (IJACE 2019, hal. 5). Adapun ciri-ciri pendidikan Yesuit menurut IJACE (2019, hal. 18):

- 1) Katolik, berkomitmen untuk pembentukan iman yang mendalam dalam dialog dengan agama dan pandangan dunia lain
- 2) Berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat untuk semua
- 3) Berkomitmen pada kewarganegaraan global
- 4) Berkomitmen untuk merawat semua ciptaan
- 5) Berkomitmen pada keadilan
- 6) Berkomitmen untuk dapat diakses oleh semua orang
- 7) Berkomitmen pada hubungan antarbudaya
- 8) Berkomitmen untuk menjadi jaringan global yang melayani misi
- 9) Berkomitmen untuk keunggulan manusia
- 10) Berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat.

Widyaputranto (2011) mengemukakan lima ciri pendidikan Yesuit yaitu keunggulan akademis, pengembangan bidang keilmuan humaniora dan sains, upaya berkelanjutan untuk mencari solusi masalah-masalah etika dan sistem nilai baik di bangku pendidikan maupun di dunia kerja, pengembangan iman dan kehidupan rohani, dan pendampingan peserta didik secara pribadi.

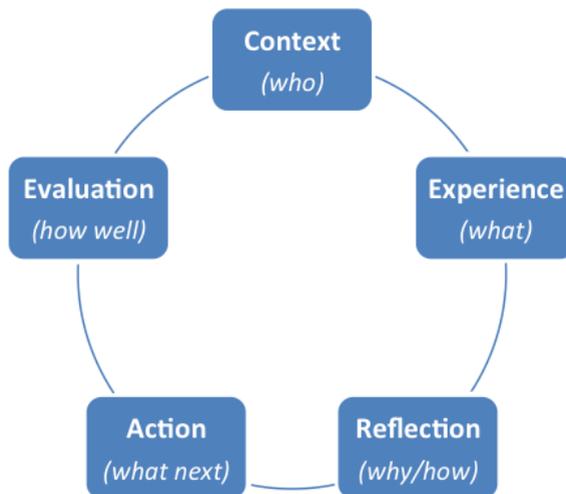
Selain itu dokumen penting yang dikeluarkan Serikat Yesus sedunia adalah *Preferensi Apostolik Universal (Universal Apostolic Preferences)* yang diterbitkan oleh Pater Jendral Yesuit Arthuro Sosa S.J. (Sosa, 2019). Dokumen ini menjelaskan arah pelayanan Gereja yang dilakukan oleh Serikat Yesus termasuk bagi siapapun yang terlibat dalam Karya Pelayanan Serikat Yesus di Indonesia, yaitu: (1) menunjukkan jalan menuju Allah; (2) berjalan bersama yang terkucilkan; (3) penjelajahan bersama orang muda; dan (4) merawat rumah kita bersama (Sosa, 2019; Juliawan, 2022).

Dari empat preferensi tersebut dapat kita maknai bahwa dalam dunia yang ditandai *D-Vucad, fragmentalisme, superfisialitas dan insrumentalis*, manusia mengembara mencari makna yang salah satunya adalah dalam menemukan Tuhan. Dalam hal ini, pendidikan Yesuit maupun karya pelayanan Yesuit lainnya sangat menghargai keberagaman termasuk Agama dan Iman. Begitu banyak orang dari berbagai latar belakang iman bahkan orang-orang tak beriman tertentu telah, sedang dan masih terus bekerja sama, berjalan bersama dalam berbagai karya pelamanan. Diharapkan melalui perjalanan bersama, orang menemukan Allah, mungkin dalam artinya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan ajaran Sang Pendiri Yesuit, yaitu St. Ignasius yaitu menemukan Tuhan dalam segalanya dan segalanya dalam Tuhan, tanpa harus menjadikan seseorang Kristen. Menunjukkan jalan menuju Allah hendaklah dimaknasi dalam arti luas yaitu bukan melalui ritual agama atau perdebatan agama tetapi melalui berbagai tindakan karitatif dimana orang menemukan kebesaran Tuhan termasuk dalam peristiwa tersulit dalam hidup bahkan bencana Covid-19 sekalipun. Justru dalam keadaan terpuruk, seseorang akan

menemukan makna hidup terdalam yaitu ketika dia mau berjalan bersama mereka yang terkucilkan dan terpinggirkan (preferensi ke dua). Terkait relasi dengan kaum muda, dengan jelas dikatakan bahwa kita sebagai pendidik, sebagai orang tua sebaiknya mengambil sikap berjalan bersama mereka dan bukan menggurui apalagi memvonis (preferensi ke 3). Kita juga diminta untuk bersama-sama memilih merawat daripada merusak bumi karena bumi ini adalah rumah kita bersama. Inilah pilihan-pilihan kita yang kita lakukan secara bersama-sama dan secara sadar.

#### 4.3.4 Pedagogi Ignasian

Salah satu perbedaan pendidikan Jesuit dengan pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi dan universitas lain adalah siklus (konteks), pengalaman, refleksi, tindakan, dan evaluasi yang dapat ditelusuri kembali ke Spiritualitas Latihan St. Ignatius (2012). Hal serupa ditegaskan oleh Saint Louis University (2022), terkait Paradigma Pedagogi Ignatian seperti terlihat pada figur berikut ini:



Sumber: Saint Louis University (2022).

Terkait Paradigma Ignatian dijelaskan bahwa semua aktivitas pembelajaran terjadi dalam konteks tertentu, berakar pada pengalaman sebelumnya dan hasil dari pengalaman belajar yang baru. bergantung pada - dan diperdalam oleh - refleksi tentang pengalaman tersebut, menjadi bermakna ketika pengetahuan baru dimasukkan ke dalam beberapa jenis tindakan, dan diperkuat dengan evaluasi eksplisit (dan akhirnya, evaluasi diri) dari tindakan tersebut dan sejauh mana pembelajaran telah terjadi (Saint Louis University (2022)).

Paradigma pedagogi ini melibatkan gaya dan proses pengajaran tertentu dalam kurikulum yang ada bukannya menambah mata kuliah. Pedagogi Ignasian sejak awal bersifat eklektik dalam pemilihan metode untuk mengajar dan belajar (Duminuco, 2019). Terkait pedagogi, dijelaskan:

Pedagogi adalah cara guru mendampingi peserta didik dalam tumbuh kembangnya. Pedagogi, seni dan ilmu mengajar, tidak bisa direduksi begitu saja menjadi metodologi. Ia harus mencakup pandangan dunia dan visi tentang pribadi manusia yang ideal untuk dididik. Ia memberikan tujuan akhir yang harus dituju semua aspek pendidikan. Ia juga memberikan kriteria untuk pilihan sarana yang akan digunakan dalam proses pendidikan. ... Pedagogi Ignasian mengasumsikan pandangan dunia tersebut dan bergerak satu langkah lebih maju dari pada menyarankan cara yang lebih eksplisit di mana nilai-nilai Ignatian dapat diwujudkan dalam proses belajar-mengajar (hal.5).

Pendidikan Yesuit bertujuan untuk membentuk laki-laki dan perempuan untuk orang lain dimana mereka bebas untuk berjalan di jalan yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya baik secara intelektual, spiritual, sosial, emosional menuju keunggulan (Duminuco, 2019).

Paradigma Pedagogi Ignasian merupakan suatu metode yang muncul dari pendidikan Jesuit dan pembinaan rohani. Filsafat

pendidikan Jesuit didasarkan pada keinginan untuk mendidik manusia secara utuh (*whole person education*) (González-Aller & Hernández, 2017). Pendidikan pribadi holistik dicapai melalui: (1) pengakuan bahwa Tuhanlah pengarang semua realitas dan dalam pendidikan kita mengakui bahwa semua ilmu merupakan sarana kita untuk menemukan; (2) upaya formasi total setiap individu dalam dirinya dan meliputi aspek spiritual, dan moral, serta dimensi pendidikan dan sosial demi pengembangan talenta yang diberikan Tuhan di dalam diri seseorang dalam konteks keanggotaan dan pelayanan kepada komunitas manusia; (3) dimasukkannya dimensi religius yang menembus semua aspek proses pembelajaran, mengakui bahwa setiap disiplin dapat menyediakan sarana untuk menemukan Tuhan; (4) pemberian perhatian dan kepedulian terhadap individu melalui *cura personalis*, yang dijelaskan Peter-Hans Kolvenbach, S.J., sebagai “cinta sejati dan perhatian pribadi untuk kita masing-masing siswa”; (5) dialog antara iman dan budaya, dan kebutuhan akan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Penelitian yang mereka lakukan (González-Aller & Hernández, 2017) menemukan relevansi pedagogi Ignatian dalam pembelajaran sastra yaitu konteks, pengalaman, aksi, refleksi dan evaluasi. Konteks berguna untuk mengeksplorasi pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan komunikatif sambil memanfaatkan pengalaman siswa di masa lalu dan masa kini. Dalam konteks ini mereka menggunakan teori skemata. Pada tahap pengalaman, siswa diminta untuk menghubungkan ide dengan dirinya sendiri melalui diskusi kelompok dan penerapan *HOTS*. Kegiatan refleksi digunakan untuk menarik makna dari pengalaman belajar melalui kegiatan *compare and contrast* makna yang ada dalam cerita. Aksi bertujuan untuk melakukan tindakan transformasi baik internal maupun eksternal ketika mereka melakukan refleksi pertumbuhan mereka sendiri. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai pertumbuhan dan proses belajar.

Hasil penelitian ini meneguhkan kembali pentingnya pedagogi Ignasian dalam mendampingi untuk mengembangkan seluruh

potensinya dimana pendidik berfungsi sebagai fasilitator dari pada instruktur (Duminuco, 2019):

Paradigma Ignasian tentang pengalaman, refleksi, dan tindakan menunjukkan banyak cara guru dapat menemani siswa mereka untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan melalui perjumpaan dengan kebenaran dan eksplorasi makna manusia. Ini adalah paradigma yang bisa memberikan tanggapan yang lebih dari cukup terhadap isu-isu pendidikan kritis yang kita hadapi saat ini. Ini adalah sebuah paradigma dengan potensi yang melekat yang melampaui teori belaka untuk menjadi alat praktis dan efektif untuk membuat perbedaan dalam cara kita mengajar dan cara siswa kita belajar. Model pengalaman, refleksi dan aksi tidak semata-mata ide menarik yang layak untuk didiskusikan, juga bukan sekadar proposal yang menarik perdebatan panjang. Ini adalah paradigma Ignatian yang segar namun akrab tentang pendidikan Jesuit, sebuah proses yang kita semua dapat ikuti dengan percaya diri dalam upaya kita untuk benar-benar membantu siswa tumbuh sebagai orang yang kompeten, berhati nurani dan penuh kasih sayang (hal. 10).

Salah satu ciri Pedagogi Ignasian adalah refleksi. Terkait refleksi, Duminuco (2019) menegaskan bahwa:

di sekolah-sekolah Jesuit, pengalaman belajar diharapkan melampaui pengetahuan hafalan dan meliputi pengembangan keterampilan belajar yang lebih kompleks dari pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (baca Taksonomi Bloom). Jika pembelajaran berhenti di situ, itu bukan Ignasian. Karena itu akan kekurangan komponen refleksi dimana siswa didorong untuk mempertimbangkan manusia makna dan signifikansi dari apa yang mereka pelajari dan untuk mengintegrasikan makna itu sebagai pembelajar yang bertanggung jawab yang tumbuh sebagai orang yang kompeten, berhati nurani dan penuh kasih sayang (hal. 11-12).

Pernyataan ini didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Hayes (2006) terhadap lima sekolah Yesuit dan guru-guru di sekolah-sekolah tersebut yaitu bahwa pedagogi Ignatian sejalan dengan lima teori besar pembelajaran behaviorisme, kognitivisme; humanisme, pembelajaran sosial dan konstruktivis. Selain itu, perbandingan juga dibuat dengan pendekatan pendidikan 'perubahan pribadi' (*personal change*) seperti praksis "praksis pendidikan Kristen Groome" (*Shared Christian Praxis*), pedagogi tertindas Freire dan pedagogi kritis. Ditemukan bahwa Pedagogi Ignasian memiliki banyak kesamaan dengan unsur-unsur dalam berbagai teori tersebut. Pedagogi Ignasian bersifat agak eklektik dalam gagasannya dalam upaya untuk setia pada visi asli pendidikan Jesuit, sementara berusaha untuk memberikan strategi lintas kurikulum yang koheren untuk mempromosikan perkembangan spiritual dan moral anak didik. Meskipun demikian, Pedagogi Ignasian, seperti pedagogi spiritual /moral lainnya, (misalnya, pedagogi kritis, nilai-nilai pendidikan), menunjukkan masalah umum dengan konseptualisasi dan penerapan. Pedagogi Ignatian paling baik ditafsirkan sebagai perspektif pelayanan global yang menginformasikan pengajaran di seluruh kurikulum (Hayes, 2006).

Hal serupa ditegaskan Defeo (2009), sebagai berikut:

Pedagogi Ignasian mengakui poin-poin kesamaan dengan pendekatan pedagogis yang aktif digunakan tingkat pendidikan. Pedagogi Ignatian, seperti filsafat pendidikan Dewey, pendidikan kritis, feminis, pedagogi pembelajaran layanan dan teori pembelajaran orang dewasa, berusaha menemani peserta didik dalam perjalanan mereka, melibatkan siswa sebagai pembelajar mandiri, menggunakan pengalaman/refleksi/metodologi tindakan, mendorong peserta didik untuk bertindak berdasarkan apa yang mereka pelajari, dan mendidik orang untuk menjadi warga negara secara kolektif. Pedagogi Ignasian juga berbagi nilai-nilai kunci dan bidang keterlibatan (*engagement*) dengan mayoritas pedagogi ini, seperti promosi keadilan sosial, keterlibatan pembelajaran yang aktif, afektif, dan kontekstual,

sebuah etika kepedulian terhadap peserta didik, dan transformasi serta kebebasan melalui proses pembelajaran. Kesamaan ini menunjukkan perlunya dialog yang berkelanjutan dan penggunaan pedagogi Ignatian dalam hubungannya dengan literatur pedagogis saat ini dan praktik aktif dalam pendidikan tinggi (hal. 81-82).

Meskipun menjanjikan, hasil survei kuantitatif secara daring terhadap administrator di pusat-pusat pengajaran dan pembelajaran di perguruan tinggi dan universitas Jesuit di Amerika Serikat menunjukkan bahwa meski administrator pusat universitas percaya bahwa pedagogi Ignatian dapat dilakukan di pendidikan tinggi, mereka tidak percaya banyak fakultas di universitas mereka berbagi sikap ini (hal. 115).

Dalam hal ini Pedagogi Ignasian dan pedagogi lain saling melengkapi. Hal serupa digaribawahi oleh Chubbuck (2007) dalam penelitiannya melalui jurnal reflektif dan wawancara kelompok fokus (FGD) terhadap 15 calon guru. Ia menemukan bahwa ketika pedagogi Ignatian dan pedagogi kritis disandingkan terlihat bahwa setiap teori bermanfaat sekaligus terbatas kemampuannya untuk mengatasi masalah jurnal reflektif dan wawancara kelompok fokus dari kelompok 15 guru setiap teori bermanfaat sekaligus terbatas kemampuannya untuk mengatasi masalah kurikulum, pedagogi, dan alasan untuk pengajaran yang adil secara sosial. Ketika digunakan bersama-sama, kedua teori tersebut memberikan dukungan yang berharga untuk pengembangan calon guru yang berusaha menjadi guru yang berkeadilan sosial.

Terkait hubungan antara guru dan murid, dikatakan bahwa peran utama guru adalah memfasilitasi pertumbuhan hubungan pelajar dengan kebenaran, khususnya dalam hal subjek yang dipelajari di bawah pengaruh bimbingan guru. Guru menciptakan kondisi, meletakkan dasar dan menyediakan peluang untuk interaksi terus-menerus dari PENGALAMAN, REFLEKSI siswa dan TINDAKAN

terjadi (Duminuco, 2019). Terkait Paradigma Ignasian ditandaskan bahwa (Duminuco, 2019):

Paradigma Ignasian tentang pengalaman, refleksi, dan tindakan menunjukkan banyak cara guru dapat menemani siswa mereka untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan melalui perjumpaan dengan kebenaran dan eksplorasi makna manusia. Ini adalah paradigma yang dapat memberikan tanggapan yang lebih dari cukup terhadap isu-isu pendidikan kritis yang kita hadapi saat ini. Ini adalah sebuah paradigma dengan potensi melekat yang melampaui teori belaka sehingga menjadi alat praktis dan alat yang efektif untuk membuat perbedaan dalam cara kita mengajar dan cara siswa kita belajar (hal. 10).

Belum cukup banyak penelitian yang telah dilakukan di Indonesia terkait Penerapan Pedagogi Ignasian dalam dunia pendidikan. Dari telusuran penulis *google scholar* ditemukan 327 hasil ketika diketik pedagogi ignasian atau 5,45% dari total 6000 hasil ketika dituliskan *Ignatian Pedagogy*. Meskipun persentasenya cukup kecil, paling tidak hal ini menunjukkan potensi Pedagogi Ignasian sebagai alternatif bahkan pengaya pedagogi maupun teori belajar populer yang ada dewasa ini, seperti yang dikemukakan Hayes (2006). Interpretasi lain adalah belum banyaknya penulis yang mempublikasikan karyanya terkait Pedagogi Ignasiaian dalam Bahasa Indonesia atau belum banyak yang melakukan publikasi dalam jurnal nasional terkait pedagogi ini, atau mungkin mereka menerbitkan dalam jurnal-jurnal berbahasa Inggris baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri.

Meskipun demikian menarik kiranya kita mereviu beberapa hasil penelitian dalam Bahasa Indonesia terkait pedagogi ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartana dkk (2016) pada SD Kanisius ditemukan bahwa Paradigma Pedagogi Ignasian yang dikombinasikan dengan Penelitian Tindakan Kelas dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SD yang diteliti. Penelitian oleh Wahana pada sebuah jurusan di Perguruan Tinggi (2016) mengungkapkan model pembelajaran

kontekstual reflektif berbasis Pedagogi Ignasian pada mata kuliah filsafat ilmu mampu secara bertahap menarik minat mahasiswa terhadap perkuliahan, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap fungsi perkuliahan, dan pemahaman terhadap materi inti perkuliahan, yang berkaitan dengan kegiatan penalaran, pengetahuan dan keilmuan. Penelitian yang dilakukan Kristanto (2017) terkait penerapan Pedagogi Ignasian dalam Pembelajaran Mata Kuliah Aljabar dan Trigonometri Berbasis Computer-Based Math menunjukkan peningkatan mahasiswa dalam berkolaborasi, berbelarasa, bertindak sesuai suara hati dan berkomunikasi, selain dapat meningkatkan nilai tes formatif mahasiswa. Selain berdampak pada peningkatan prestasi pembelajar yang terjadi di dalam kelas, ditemukan bahwa penerapan pedagogi Ignasian yang terdiri dari konteks, pengalaman, refleksi, aksi dan evaluasi dapat meningkatkan karakter siswa kearah yang lebih termasuk dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler (Hutagaol, 2015).

#### 4.3.4 Pesan Reflektif

Karya pelayanan pendidikan Yesuit di seluruh dunia telah berumur hampir 500 tahun. Pendidikan Yesuit mengusung nilai-nilai keunggulan dan kemanusiaan dengan merangkul setiap orang dari berbagai latar belakang termasuk agama. Salah satu paradigma pendidikan Yesuit adalah Paradigma Pedagogi Ignasian yang terdiri dari konteks, pengalaman, refleksi, aksi dan evaluasi. Semua dilakukan dalam tahap tidak terputus dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*Competence*), dan sikap bela rasa dan suara hati (*compassion dan conscience*). Meskipun pedagogi Ignasian telah banyak diterapkan dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia, masih banyak orang di luar lingkaran pendidikan Yesuti yang belum mengenal apalagi menerapkan paradigma ini dalam pendidikan yang lebih luas. Mengingat kekayaan Paradigma Ignasian dalam konteks berbagai pendekatan *whole person education* dan teori-teori belajar utama maka sudah selayaknya Pedagogi Ignasian dieksplorasi secara bersama seperti yang lainnya.

## **4.4 Universitas Sanata Dharma dan Perannya dalam Pendidikan Indonesia ke Depan**

### **4.4.1 Sekilas Universitas Sanata Dharma**

Seperti dilansir dari laman resmi kampus (Humas USD, n.d.), Universitas Sanata Dharma pertama kali didirikan pada tahun 1955 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) atas hasil diskusi dengan Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI) dengan Dekan pertamanya Pater Prof. Nicolaus Driyarkara, S.J. menjadi Dekannya (baca: Rektor). Tahun 1958 – 1965, PTPG berubah menjadi FKIP Sanata Dharma, sesuai permintaan pemerintah. Tahun 1965 – 1993, FKIP berubah menjadi IKIP Sanata Dharma, dan sejak tahun 1993 menjadi Universitas Sanata Dharma dengan 8 Fakultas, 25 Program Studi Program Sarjana, 1 Program Studi Program Profesi, 8 Program Studi Program Magister, dan 1 Program Program Studi Program Doktor.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari sistem administrasi terpadu USD (Pejabat, n.d), untuk tahun 2020 terdapat 450 dosen dan 360 karyawan serta 2660 mahasiswa. Pada tahun 2021, USD menampung 3384 mahasiswa dari 32 provinsi, kecuali Provinsi Aceh dan Gorontalo dengan keterwakilan dari semua agama dan aliran kepercayaan. Tahun 2022, terdapat 3362 mahasiswa baru yang berasal dari 33 provinsi dengan latar belakang etnis, bahasa daerah, agama maupun status sosial ekonomi yang majemuk sehingga jumlah mahasiswa USD keseluruhan mencapai 15.259. Selain itu, Universitas Sanata Dharma juga memiliki dosen dan karyawan dengan latar belakang multikultural. Dengan keragaman ini, setiap pribadi di USD menyadari pluralisme dan melalui interaksi tanpa sekat maka terjalinlah pengertian lintas budaya dan solidaritas.

Berikut disajikan Agama mahasiswa tahun 2021 yang sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar yang ada di USD.

**Tabel 7:** Agama Mahasiswa Tahun 2021

Agama	Jumlah	%
Katolik	1911	56,44
Protestan	736	21,74
Islam	619	18,28
Hindu	54	1,59
Budha	42	1,24
Tidak menyebutkan	17	0,50
Konghu Cu	4	0,12
lain	2	0,06
Aliran kepercayaan	1	0,03
Total	3386	100

Sumber: SIA Pejabat USD, 2021

Terlihat dari Tabel ini bahwa meskipun USD adalah Universitas Katolik dan dikelola oleh Romo Yesuit, jumlah mahasiswa Katolik dan non-Katolik hampir berimbang yaitu 56,44 % berbanding 43,56%. Artinya jumlah mahasiswa Katolik di USD tahun 2021 hanya unggul 12,8%.

#### 4.4.2 Nilai-nilai Dasar Pendidikan di USD

Seperti halnya perguruan tinggi Yesuit di dunia, Universitas Sanata Dharma berkomitmen untuk menerapkan tujuh (7) ciri berikut: 1) mempromosikan dialog dan rekonsiliasi yang otentik; 2) mempromosikan keunggulan manusia dalam setiap aspek kehidupan manusia; 3) mempromosikan eksplorasi dan penemuan yang berfokus pada dan di antara disiplin ilmu; 4) mempromosikan eksplorasi dan apresiasi antar budaya; 5) memberikan kontribusi baik dalam teori maupun praktik untuk mempromosikan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan dan dalam berbagai institusi masyarakat; 6) mempromosikan pembangunan visi global pada mahasiswa dan dosen; dan 7) mempromosikan pertumbuhan spiritual yang otentik dan pengembangan iman.

Statuta Universitas Sanata Dharma (2009) merumuskan secara jelas nilai-nilai dasar USD, antar lain:

Dengan diilhami oleh nilai-nilai dasar Kristiani dan tradisi pendidikan Serikat Yesus, Universitas Sanata Dharma mengembangkan diri dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan cita-cita kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Sanata Dharma menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan peserta didik memadukan pengembangan berbagai dimensi kemanusiaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga memiliki kepribadian yang matang, integritas moral yang tinggi, kemampuan berpikir yang kritis, dan wawasan kebangsaan dalam kerangka kemanusiaan yang luas. (2009, hal. 2).

Salah satu poin penting dapat kita tarik dari rumusan di atas yaitu USD dalam menjalan misi pendidikannya diinspirasi oleh nilai-nilai dasar Kristiani dan tradisi pendidikan Yesuit yang seperti penulis kemukakan pada topik bahasan pendidikan Yesuit, telah berumur hampir 500 tahun. Menarik kiranya untuk dimengerti bahwa nilai-nilai dasar Kristiani tidaklah sama dengan ritual keagamaan Kristiani. Nilai-nilai dasar Kristiani antara lain adalah Cinta Kasih kepada sesama manusia tanpa mengenal sekat-sekat primordialisme. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti ritual keagamaan di USD. Bahkan para mahasiswa Katolik pun tidak diwajibkan mengikuti Ibadah seperti Misa Awal dan Akhir Semester.

Secara lebih ringkas terdapat empat nilai dasar di USD yaitu: (1) mencintai kebenaran; (2) memperjuangkan keadilan; (3) menghargai keberagaman; dan (4) menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia (Humas USD, n.d). Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan Yesuit memiliki beberapa ciri lain selain ciri Kristiani yaitu utilitas, keadilan, dan humanisme. Selain itu dalam menjalankan pendidikannya, Institusi Pendidikan seperti halnya USD sangat

menekankan pemeriksaan batin dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan persaudaraan, melakukan dialog, meningkatkan hubungan antar budaya dan antar generasi, menjadi laki-laki dan perempuan “untuk dan bersama orang lain, mencegah otokrasi dalam pemerintahan, dan merawat lingkungan.

Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh ciri pendidikan Yesuit adalah (IJACE, 2019, hal. 18) seperti yang telah dijelaskan pada poin 5.1.2.3. Bahkan dijelaskan bahwa meski bernilai Kristiani, pendidikan Yesuit berkomitmen untuk pembentukan iman yang mendalam dalam dialog dengan agama dan pandangan dunia lain (ciri pertama).

#### 5.4.3 Visi dan Misi USD

Rencana strategis USD 2018-2022 (Priyatma, n.d.) secara lengkap menjelaskan Rencana USD dalam lima tahun terakhir. Visi pendidikan di USD bersumber pada Statuta (2009) dan dituangkan dalam Renstra USD yaitu “Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat”. Selanjutnya dijelaskan dalam Renstra USD 2018-2022 (Priyatma, n.d.) bahwa Penggalan Kebenaran mencakup tiga sifat yaitu obyektif, intersubjektif, dan transenden yang bersifat integratif dalam proses transformasi untuk menemukan diri demi pencapaian kepenuhan hidup atau hidup yang bermakna:

Penggali kebenaran” dimaksudkan sebagai usaha yang serius dan berkelanjutan untuk mampu mengungkap kebenaran pada tingkat obyektif, intersubjektif, dan transenden. Pengungkapan kebenaran pada tingkat obyektif dan intersubjektif diusahakan melalui studi atau kajian ilmu-ilmu pengetahuan positif; sedangkan pengungkapan kebenaran pada tingkat transenden diusahakan melalui studi atau kajian filsafat dan teologi. Asumsi yang perlu dijadikan dasar adalah keyakinan iman bahwa segala pengetahuan yang dapat dibedakan dari segi jenis disiplin ilmu, bahan kajian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah pada hakikatnya merupakan suatu usaha terpadu yang mengarah ke

pengungkapan misteri Illahi yakni pewahyuan diri Allah sendiri. Kebenaran dalam perspektif iman ini adalah kebenaran menyeluruh yang membawa manusia kepada proses transformasi diri menuju kepenuhan hidup serta penemuan diri yang sesungguhnya.

Karakteristik unggul dari pendidikan di USD dijelaskan sebagai berikut (Priyatma, n.d.):

Unggul” merupakan terjemahan dari kata bahasa Latin magis yang berarti ‘lebih’. “Lebih” dimaknai bukan dalam suatu kerangka kompetisi atau perbandingan antara individu satu dengan individu lain atau lembaga satu dengan lembaga lain tetapi dalam kerangka pengembangan diri secara terus-menerus. Setiap individu yang terlibat di USD diharapkan mampu mengembangkan bakat serta kemampuan pribadinya dari tahapan satu ke tahapan lain yang lebih jauh atau lebih tinggi. Setiap individu diharapkan tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Pengembangan diri secara terus-menerus ini dilakukan USD dalam usaha membantu sesama warga khususnya para mahasiswa agar dapat berkembang lebih jauh atau lebih tinggi lagi (hal. 18).

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa ketika USD berbicara tentang keunggulan maka yang pertama-tama dan utama bukanlah dalam semangat kompetisi dengan orang lain tetapi bagaimana seseorang dapat dibantu oleh lingkungan pendidikan di USD yang ramah terhadap keunikan, bakat dan potensi setiap individu, Di sini terlihat bahwa penekanan pendidikan diutamakan pada pengembangan manusia seutuhnya (*whole person education*). Inilah satu hakikat dari pendekatan berbasis pembelajar (*student centred approach*) yang juga menjadi penekanan dalam Kurikulum Merdeka dan juga berbagai pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa dan berlangsung sepanjang hayat (lht. Hayes, 2006). Maka tidaklah mengherankan kalau refleksi berbasis Pedagogi Ignasian yaitu *context, experience, reflection, action* dan *evaluation* (CERAE) dengan pemfokusan pada

4C yaitu *competence* (ketajaman akal dan pemikiran), *conscience* (kejernihan nurani), *compassion* (bela rasa) dan *commitment* (komitmen) menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran.

Dengan kata lain, visi kebenaran dan keunggulan menunjukkan bahwa USD sebagai Universitas Yesuit senantiasa berkomitmen untuk terus menerus belajar sebagai penggali kebenaran yang unggul baik kebenaran ilmu, iman maupun kemanusiaan. Dalam hal ini USD berorientasi pada *Magis* yaitu selalu ingin lebih baik, lebih berprestasi, tahu lebih banyak, bukan untuk kepentingan ilmu belaka apalagi untuk kompetisi yang tidak sehat tetapi untuk kemanusiaan yang semakin bermartabat.

Selanjutnya dalam Renstra tersebut juga dijelaskan makna humanis yaitu:

Setiap pribadi bersedia mendidik diri secara terus-menerus agar semakin mampu mewujudkan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kemanusiaan di tengah masyarakat. Kesiediaan mendidik diri secara terus-menerus ditujukan demi kesempurnaan penciptaan dirinya sebagai pribadi yang diciptakan sesuai dengan citra Sang Pencipta. Nilai-nilai beserta aspirasi-aspirasi kemanusiaan dituangkan dalam sikap dan perilaku seperti menghormati sesama; menghargai pluralisme; cinta perdamaian; cinta tanah air; mendahulukan kepentingan bangsa dan negara; menjunjung tinggi hukum, peraturan-peraturan, dan sistem pemerintahan, atau tata kelembagaan yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama; mau bekerja keras; ulet atau pantang menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang bernilai tinggi; serta berani menghadapi tantangan-tantangan demi perubahan. Dalam kerangka USD, menjadi pribadi humanis berarti bersedia ikut mengembangkan nilai-nilai yang diunggulkan, yakni kedalaman dan keutuhan, refleksi, kerja sama transformatif, serta semangat unggul dalam sistem pendidikan Ignasian yang dikembangkan di USD (hal. 13).

Beberapa pesan utama dapat kita petik dari pernyataan di atas terkait makna humanisme yaitu penghargaan terhadap sesama, termasuk berbagai produk hukum, dan bersifat pluralis, bekerja keras, pantang menyerah, mengutamakan keutuhan dan kedalaman untuk mencapai transformasi diri baik sebagai pendidik maupun para mahasiswa demi menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Dengan kata lain pendidikan di USD bersifat holistik.

Sementara itu terkait frasa masyarakat yang semakin bermartabat dijelaskan:

Menggarisbawahi dimensi sosial filosofi pendidikan Yesuit, humanisme Ignasian didasarkan pada keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya selalu berusaha membangun komunitas. Tidak ada manusia yang bisa hidup di luar komunitas. Kesadaran bahwa manusia selalu berakar dan tumbuh di dalam komunitas menjadi dasar bagi tanggungjawab dan kepedulian. Lewat tridharma, USD ingin menegaskan komitmennya untuk terlibat menanggapi masalah mendasar yang sedang digulati baik komunitas lokal, komunitas nasional maupun sebagai warga dunia. Sebagai komunitas akademik, kontribusi khas USD adalah membantu masyarakat untuk melihat secara komprehensif permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat mengusahakan solusi yang menyeluruh. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, USD telah dan akan menekuni aneka praktek-praktek baik maupun menggodok munculnya inisiatif-inisiatif baru dalam kerjasama dengan banyak pihak yang memiliki kehendak baik untuk mengusahakan terbentuknya masyarakat yang semakin bermartabat (hal. 18).

Dalam kutipan di atas dijelaskan bahwa masyarakat bermartabat adalah sebuah masyarakat yang dibangun dalam semangat komunitas karena adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian baik pada tingkat lokal, nasional maupun global untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Konsep martabat manusia sebetulnya bersumber dari ajaran sosial Katolik yaitu sebuah pemahaman bahwa kita masing-

masing diciptakan menurut gambar Allah, yang berarti setiap orang memiliki martabat manusia bawaan yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun (Caritas New Zealand, 2022).

Visi USD tertuang secara lebih praktis dalam empat misi berikut, yaitu:

1) Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, pluralistik, dan transformatif. 2) Menciptakan masyarakat akademik Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja sama lintas-ilmu, dan mampu mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3) Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki visi dan kepedulian sama, serta pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat (hal. 15).

Beberapa kata kunci dapat kita petik dari ketiga visi di atas terkait hakikat relasi manusia yang coba di bangun di USD yaitu bersifat *cura personalis*, dialogis, kolaboratif, pluralistik, dan transformatif sambil menghargai kebebasan berpendapat demi kedalaman ilmu yang digeluti atau disingkat dengan motto “Cerdas dan Humanis”. Motto ini diterjemahkan dalam rancangan pembelajaran, proses pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang berbasis yaitu *competence (ketajaman akal dan pemikiran)*, *conscience (kejernihan nurani)*, *compassion (bela rasa)* dan *commitment (komitmen)*.

Dari tinjauan sekilas terkait sejarah, nilai-nilai dasar dan visi misi pendidikan di USD dapat kita simpulkan bahwa USD merupakan universitas yang inklusif, non-diskriminatif, pluralis, transformatif,

dialogis dan berkomitmen untuk berkolaborasi, dan bersinergi dengan siapa saja yang berkehendak baik demi mempertahankan martabat kemanusiaan seperti yang secara ringkas dan padat pada Judul Renstra USD 2018-2022 (Priyatma, n.d) yaitu kolaborasi, sinergi dan integrasi. Dengan kata lain USD bertekad menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan yang tidak *fragmentalis*, tidak *superfisial*, dan tidak *instrumentalis* (Sosa, 2022).

#### 4.4.4 Posisi USD dalam Dinamika Pengembangan Pendidikan di Indonesia

##### 4.4.4.1 Mitra Pemerintah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendirian Universitas Sanata Dharma berawal dari permintaan permintaan dari Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI) pada tahun 1950-an (Sejarah - Universitas Sanata Dharma, n.d.). Sejak itu (1955) Universitas Sanata Dharma mulai berperan secara aktif dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia melalui jalur pendidikan khususnya dengan menyediakan tenaga guru ke sekolah menengah. Sejak saat itu hingga kini, USD senantiasa menjadi mitra pemerintah khususnya dalam upaya pemberdayaan guru baik melalui Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan maupun Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Selain itu, kontribusi USD semakin melebar ke penyediaan lulusan non-keguruan dengan dengan diubahnya IKIP Sanata Dharma menjadi Universitas Sanata Dharma pada tahun 1993 dengan adanya 8 fakultas lain yaitu Fakultas Teologi Teologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Mesin, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, dan Pascasarjana. Dengan demikian USD telah dan akan terus mengirimkan lulusannya ke seluruh negeri untuk berkarya dalam berbagai bidang pekerjaan.

#### 4.4.4.2 Mitra APTIK dan APTISI

Selain menjadi Mitra pemerintah, USD juga terlibat aktif baik sebagai pengurus maupun anggota APTIK yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik dan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia. Melalui kedua organisasi ini, USD menyumbangkan pemikiran dan gagasan untuk kemajuan pendidikan maupun pembangunan Indonesia

#### 4.4.4.3 Mitra Pendidikan Jesuit Sedunia

Selain menjadi mitra pemerintah, APTIK dan APTISI, USD juga merupakan mitra pendidikan sedunia Yesuit di Indonesia karena berperan aktif baik sebagai anggota maupun pengurus IAJCU yaitu Asosiasi Internasional Universitas Yesuit sedunia dan Asia Pasifik. Keterlibatan USD dalam Asosiasi berskala global seperti ini tentu akan berdampak positif bagi pengembangan pendidikan di USD dan secara tidak langsung pendidikan di Indonesia melalui pertukaran informasi terkait berbagai isu global kontemporer baik terkait pendidikan maupun kemanusiaan termasuk isu lingkungan, keagamaan dll.

#### 4.4.4.4 Mitra Sekolah

Sesuai awal berdirinya, meskipun telah menjadi Universitas, USD selalu terlibat dan berkomitmen penuh dalam pengembangan profesionalitas guru, antar lain melalui berbagai kegiatan yang pihak sekolah.

#### 4.4.4.5 Mitra Masyarakat

USD senantiasa terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan termasuk saat terjadi berbagai peristiwa bencana alam di wilayah DIY dan atau wabah seperti halnya pemberian Vaksin *Covid-19* secara gratis.

#### 4.4.5 Pesan Reflektif

Meskipun merupakan Universitas swasta, sejak didirikan tahun 1955, Universitas Sanata Dharma merupakan mitra pemerintah dalam upaya membangun, bangsa khususnya melalui jalur pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di USD tidaklah bisa dipisahkan dari pemikiran-pemikiran Driyarkara, yang merupakan tokoh pendidikan nasional sekaligus Rektor pertamanya. Selain itu, sebagai bagian dari pendidikan Yesuit sedunia, USD juga menerapkan nilai-nilai dasar, dan visi misi pendidikannya baik yang bersifat global maupun nasional dengan penekanan pada pengembangan manusia seutuhnya baik secara intelektual, emosional, maupun sosial dan spiritual dengan menggunakan Paradigma Pedagogi Ignasian.

USD merupakan universitas yang pluralis yang berfokus pada penghargaan terhadap keberagaman, keadilan, kebenaran, dan martabat manusia melalui pendidikan yang humanis, dialogis, kolaboratif dan integratif. Dengan kata lain, USD merupakan elemen penting dari upaya mengembangkan sumber daya manusia Indonesia masa lalu, masa kini dan masa depan seperti tercermin dari pluralisme Indonesia di kampusnya.

USD menghadapi tantangan dan peluang untuk memasuki wilayah-wilayah atau medan baru. Wilayah atau medan yang dimaksud di sini mencakup wilayah geografis, bidang ilmu, dan metode.

- Wilayah geografis. USD ditantang untuk semakin menjangkau wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Selama ini sudah menjangkau beberapa wilayah namun hal ini perlu semakin ditingkatkan.
- Bidang ilmu USD ditantang untuk mengembangkan kajian-kajian baru, yang relevan dan dibutuhkan bagi pengembangan masyarakat, misalnya terkait perekonomian, kebudayaan, dan pendidikan.

- Metode. USD ditantang untuk menemukan cara-cara baru dalam pembelajaran, termasuk cara-cara baru dalam mempersiapkan guru untuk generasi mendatang. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cara-cara baru dalam mendampingi kaum muda secara umum, misalnya dengan menerjemahkan Paradigma Pedagogi Ignasian dan berbagai pemikiran pendidikan Yesuit yang begitu kaya ke dalam dokumen kurikulum dan praksis pendidikan baik di lingkungan USD maupun di luar USD.

#### 4.4.5 Agenda-Agenda Kreatif Pendidikan ke Depan Baik di Lingkungan USD Maupun Jaringan-Jaringan yang Ada

##### 4.4.5.1 Menjadi Kolaborator Rancangan Arah Pendidikan Indonesia ke Depan

Pengembangan sumber daya manusia Indonesia ke depan, termasuk melalui lembaga pendidikan, membutuhkan kolaborasi baik dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan kurikulum pendidikan, maupun dengan semua penyelenggara pendidikan tinggi. Karena itu, sebagai pengejawantahan filosofi pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, USD siap berdialog dan berkolaborasi dengan semua pihak demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang inklusif, non-diskriminatif, pluralis, dan berkeadilan.

##### 4.4.5.2 Mendirikan Pusat Studi Driyarkara

Mengingat kontribusi Driyarkara dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, dan di USD, dan masih minimnya implementasi pemikiran-pemikiran Beliau dalam literatur pendidikan di Indonesia, terlebih dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, maka diperlukan pusat studi studi Driyarkara. Pusat studi ini hendaklah bersifat umum

dan lintas agama karena pemikiran Beliau, meskipun sebagai seorang Romo Katolik, bersifat universal dan nasional.

Pusat studi ini tidak saja menggali nilai-nilai pendidikan dan kebangsaan yang ditawarkan Driyarkara tetapi juga mencoba mengintegrasikannya dengan pendidikan Yesuit dan nilai-nilai pendidikan lainnya di Indonesia serta teori-teori belajar dan pemberdayaan manusia *mainstream* termasuk Paradigma Pedagogi Ignasian (pedagogi transformatif) dengan CERAEnya. CERAE sangat mirip dengan siklus penelitian *Action Research* yang tentunya sangat bermanfaat untuk penelitian berorientasi perubahan atau peningkatan. Selain itu keempat C (Competence, Conscience, Compassion dan Commitment) juga sangat relevan bila dikaitkan dengan OBE. Model-model penelitian dan pembelajaran seperti ini tentu sangat menarik dan bermanfaat bila digunakan oleh semakin banyak institusi pendidikan dan peneliti, dan luaran penelitiannya, bila dipublikasikan akan berdampak bagi semakin banyak orang, tidak saja di lingkungan USD. Atau dengan kata lain, Pusat Studi Driyarkara, bila diintegrasikan dengan Paradigma Pedagogi Ignasian, akan memperkaya pemikiran-pemikiran dan berbagai teori belajar lain (Iht Hayes, 2006).

#### 4.4.5.3 Mengkaji *Standing* USD terkait Tri Dharma PT

Meskipun kini telah redup, RUU Sisdiknas antara lain menyuarakan kemungkinan pemberian wewenang kepada PT untuk menentukan pilihan apakah akan berfokus pada ketiga aspek Tri Dharma atau memberi penekanan pada salah satunya yaitu *teaching* atau *researching*:

“RUU ini mengatur bahwa setiap perguruan tinggi dapat menentukan proporsi penerapan tiap dharma dalam tridharma perguruan tinggi sesuai visi, misi, serta hasil evaluasi diri masing-masing. Bagi perguruan tinggi baru, untuk berkembang menjadi unggulan kelas dunia membutuhkan sumber daya yang amat besar dan pentahapan untuk mencapai kematangan organisasi.” (Naskah Akademik RUU Sisdiknas, hal. 117).

Untuk itu USD dan PT serupa perlu mengkaji apakah akan berfokus menjadi *teaching university*, *research university* atau keduanya? Menyikapi dunia *D-Vucad*, USD sebagai bagian dari APTIK, dan APTISI hendaknya mengambil langkah-langkah strategis terkait Tri Dharma. Kebijakan pendidikan ke depan, baik pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah, dasar dan usia dini, harus mencegah fragmentalisme, superfisialitas dan instrumentalisme seperti yang telah dibahas pada pengantar di atas. Penulis berpendapat bahwa pilihan USD, Aptik, maupun APTISI hendaklah menghindari disintegrasi terkait Tri Dharma. Kegiatan mengajar dan mengabdikan hendaklah berbasis data atau pembuktian, bersifat interpretif, berorientasi pada profesionalisme, berdampak global dan lokal, serta bersemangat eksistensial (Iht. Shirley, 2016). Untuk itu keduanya tidak bisa dilepaskan dari aspek penelitian dan hasil-hasil penelitian.

Penelitian-penelitian ke depan, hendaknya juga merangkul pendekatan yang lebih holistik, seperti yang coba ditawarkan oleh Paradigma Pedagogi Ignatian, yang menekankan pentingnya *konteks*, *pengalaman*, *refleksi*, *aksi* dan *evaluasi* sebagai siklus yang tidak terputus. Paradigma ini, seperti halnya penelitian tindakan (*action research*), hendaklah tidak bersifat instrumental, apalagi memaksa peningkatan hasil intervensi sebagai bukti keberhasilan, seperti yang disinyalir terjadi dalam penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dewasa ini. Ia harus lebih lintas metodologi dengan triangulasi sebagai salah satu alat validitas dan pemerikayaan data.

Dengan kata lain, dalam dunia yang ditandai *D-Vucad*, USD dan berbagai PT lain di Indonesia perlu mencermati dengan bijak berbagai keharusan lama dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu keharusan ideologis, imperialis, preskriptif, sempit, dan instrumental (Iht. Shirley, 2016). Kebijakan-kebijakan pendidikan seperti ini, bila tidak dicermati dengan kehati-hatian, akan menjebak kita dalam tekanan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas eksternal, tanpa membuka ruang untuk menggali, mendorong dan mengapresiasi akuntabilitas internal.

# BAB V

## PENUTUP: MENAWARKAN SEBUAH MODEL PEMBELAJARAN HOLISTIK

### 5.1 Sebuah Model Metakognitif untuk Mengembangkan Regulasi Diri Pembelajar

Pada bagian akhir buku ini, penulis menawarkan sebuah model pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, tentunya dengan adaptasi, agar sesuai dengan konteks ilmu yang dipelajari maupun peserta dan budaya lokal. Model pembelajaran ini disebut “*A metacognitive model for developing self-regulated learners*” (Sebuah model metakognitif untuk mengembangkan regulasi diri pembelajar, Mbato, 2013).

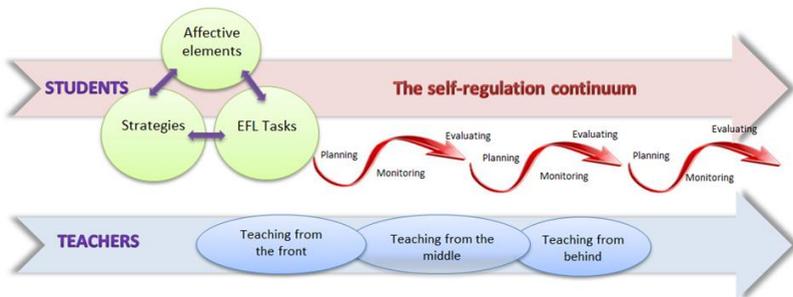


Diagram: A metacognitive model for developing self-regulated learners” (Sebuah model metakognitif untuk mengembangkan regulasi diri pembelajar, Mbato, 2013, hal. 173).

Model visual ini dikembangkan oleh Mbato (2013) dengan menggabungkan pendekatan metakognitif dan peran guru yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara yaitu (1) *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi teladan); (2) *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah memberi bimbingan); dan 3) *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan) dalam mendampingi pembelajar untuk bisa berkembang dalam kemampuan meregulasi diri (Wardani, 2010). Model ini menggambarkan peran yang perlu dimainkan guru/pendidik dan siswa, baik dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris maupun bidang studi/mata pelajaran lainnya.

Seperti yang dijelaskan Mbato (2013) bahwa guru dan siswa memiliki peran yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menumbuhkan kesadaran metakognitif siswa agar dia dapat bertumbuh dalam perjalanannya untuk semakin mampu meregulasi dirinya. Kesadaran metakognitif, seperti yang dijelaskan pada bagian depan buku ini, terdiri atas pengetahuan deklaratif, yaitu tahu apa (*the what*), pengetahuan prosedural (*the how*), dan pengetahuan kondisional/kontekstual (*the when, the where, the why, and with whom*). Dalam hal ini, pembelajar perlu mengembangkan kesadaran terkait ketiga pengetahuan ini melalui kemampuannya untuk mengenal dirinya (*person knowledge*), tugas-tugas belajarnya (*task knowledge*) dan juga strategi-strategi belajar (*strategy knowledge*) (Iht. Brown, 1987).

Pengenalan diri (*person knowledge*) menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi pendekatan (*strategy knowledge*) yang dilakukan terhadap berbagai tugas (*task knowledge*) belajar termasuk penyelesaian tugas-tugas. Untuk itu pembelajar perlu dibantu untuk semakin mengenal dirinya. Misalnya, apakah dia merupakan tipe pribadi yang mudah pesimis atau optimis? Apakah dia orang yang memiliki manajemen waktu yang baik atau bekerja secara impulsif? Apakah dia tipe pembelajar yang secara intrinsik termotivasi atau hanya bekerja dengan stimulus eksternal? Apakah dia tipe pembelajar yang ekstrovert atau introvert? Apakah dia secara umum orang yang memiliki efikasi diri yang tinggi dalam mengerjakan berbagai

aktivitas belajar? Apakah dia seorang siswa yang memiliki determinasi tinggi atau gampang putus asa bila menghadapi kesulitan? Apakah dia senang bekerja pada lingkungan yang ramai atau sepi? Apakah dia tipe yang gampang terpengaruh oleh adanya teknologi sehingga teknologi merupakan sumber disrupsi dan bukan sumber belajar dan transformasi? Dan masih banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan agar pembelajar semakin mengenal dirinya sehingga Ia bisa secara efektif dan efisien mengorganisasi tugas-tugas belajarnya beserta strategi-strategi untuk menyelesaikannya.

Pertanyaan-pertanyaan serupa bisa diajukan oleh pembimbing, dosen, guru dan sebagainya dengan tepat bila yang mengajukan pertanyaan tersebut memiliki pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional yang memadai terkait berbagai teori belajar. Dalam hal inilah guru, dosen atau pendidik perlu memiliki *LOTS* dan *HOTS* yang tinggi yang dipadu dengan keterampilan metakognisi yang tinggi. Dengan kata lain, guru juga perlu memiliki kesadaran metakognisi yang tinggi terhadap dirinya (*person knowledge*), berbagai tugas mengajar (*task knowledge*), dan strategi mengajar maupun belajar (*strategy knowledge*). Tanpa berbekal pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan ini, mereka tidak akan mampu memainkan perannya secara tepat yaitu kapan mengajar dari depan (dengan memberi teladan), kapan mengajar dari tengah dengan mendampingi, dan kapan mengajar dari belakang dengan menyemangati seperti yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara. Pergeseran peran seperti ini membutuhkan latihan yang terus menerus dan terarah sehingga mereka menjadi guru terampil, yang oleh Ireson (2008) disebut memiliki tiga unsur yaitu ketepatan, kelancaran dan kecepatan (*skilled*). Seni memainkan peran ini akan menghindarkan guru/pendidik dari kecenderungan menggurui (baca Driyarkara) melainkan memampukannya untuk menciptakan budaya berpikir kritis, yang salah satunya dilakukan dengan keterampilan bertanya.

Dalam penerapan pendekatan metakognitif untuk pengembangan regulasi diri diperlukan pemahaman bersama bahwa baik guru

maupun murid tidak pernah akan mencapai level sudah menjadi pembelajar yang berregulasi diri tinggi atau dengan kata lain pembelajaran berorientasi regulasi diri bersifat kontinum atau sepanjang hayat. Untuk itu siswa perlu terus didampingi dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pembelajaran (regulasi kognisi), termasuk strategi-strategi yang digunakan.

Dari hasil penelitian Mbato (2013) ditemukan bahwa kemampuan untuk meregulasi diri pada siswa mungkin akan sangat terbatas di tahap awal namun seiring berjalannya waktu dan dengan semakin terampilnya guru memainkan peran di depan, di tengah dan di belakang, murid akan semakin mampu meregulasi diri. Misalnya, ketika di depan guru dapat menjadi model pembelajar (lht. Bandura, 1977) dengan memberikan penjelasan secukupnya dan memberikan contoh-contoh konkrit (lht. konteks dalam paradigma pedagogi Ignasian dan kontekstual/pengetahuan kondisional dalam teori metakognisi). Driyarkara, melalui pendekatan femomenologisnya, cenderung menjelaskan sebuah persoalan secara perlahan-lahan disertai banyak contoh. Hal ini dikarenakan Driyarkara “menggunakan gaya seorang guru tanpa harus menggurui” (Sudiarja dkk, 2006, hal. xv). Ketika di tengah, ia dapat menjadi fasilitator yang mendampingi siswa dalam proses pembelajaran, termasuk dalam memantau pemahaman mereka, mendeteksi kesulitan yang dihadapi dan mencari strategi sebagai solusi terhadap kesulitan belajar yang dihadapi. Ketika di belakang, ia menjaga jarak dengan memberi kebebasan lebih kepada siswa untuk mengeksplorasi materi termasuk melalui *problem-based learning*, *project based learning*, *discovery learning* dan *inquiry based learning*. Di sini guru bisa berperan sebagai motivator eksternal yang hanya akan masuk dalam proses belajar siswa apabila diperlukan. Dari hasil penelitian oleh Mbato (2013) ditemukan bahwa semakin banyak guru membiarkan siswa mengendalikan pembelajaran mereka sendiri, semakin mereka menjadi lebih mandiri. Tetapi perlu juga dipahami bahwa kemampuan meregulasi diri setiap siswa mungkin akan

berbeda-beda. Dengan demikian, guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang dibedakan (*differentiated teaching*).

Mbato (2013) menemukan bahwa pembelajar akan semakin mandiri untuk belajar apabila didampingi guru untuk mengembangkan kapasitas untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi tugas pembelajaran, strategi, dan aspek afektif mereka sendiri. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam perkembangan *self-regulated learning* peserta didik.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam menghadapi berbagai disrupsi digital dewasa ini, kemampuan meregulasi afeksi, pikiran dan tingkah laku sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan belajar. Aspek afektif hendaklah dipahami secara luas yaitu emosi (perasaan), termasuk pengalaman belajar yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, pengalaman gagal maupun berhasil, dukungan, penguatan, sikap, motivasi, determinasi untuk mencapai tujuan belajar (*volition/self-determined learning*), efikasi diri, dan atribusi (lht. Mbato, 2013). Kemampuan meregulasi pikiran sangatlah perlu dilatihkan karena tanpa pikiran yang fokus pada tujuan belajar maka seseorang tidak akan mungkin menyelesaikan tugas belajarnya. Pembelajar juga perlu meregulasi tindakannya, dan lingkungan belajarnya. Misalnya, kalau dia merupakan seseorang yang tidak bisa belajar dalam keramaian, hendaklah dia meregulasi lingkungan yang memungkinkannya untuk fokus pada tujuan belajarnya, seperti mengambil tindakan untuk ke perpustakaan atau menutup pintu kamar dll. Perlu dipahami juga bahwa lingkungan yang perlu diregulasi tidaklah terbatas pada lingkungan fisik tetapi juga lingkungan digital dan media sosial yang seringkali bukan menjadi sumber belajar, informasi dan transformasi tetapi menjadi sumber distraksi dan disrupsi dari berbagai upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini, pembelajar akan mampu merencanakan, memantau dan mengevaluasi pembelajaran dengan efektif apabila didampingi pendidik khususnya untuk memampukannya bergerak dari tahap dependensi, interdependensi ke independensi. Untuk itu

guru/pendidik juga perlu mengembangkan kapasitas perencanaan, pemantauan dan evaluasinya dalam konteks seluas-luasnya yaitu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran maupun dalam pengembangan profesionalitasnya di luar konteks kelas baik secara pribadi maupun bersama orang lain.

Dengan kata lain, guru/dosen perlu memiliki kesadaran metakognitif yang tinggi yaitu pengetahuan deklaratif (tahu apa yang dilakukan), pengetahuan prosedural (tahu bagaimana melakukan), dan pengetahuan kondisional/kontekstual (tahu mengapa dan kapan melakukan) dalam menjalankan peran sebagai guru/dosen. Ia juga perlu meregulasi kognisinya terkait perannya dalam mengajar melalui perencanaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran serta keefektifan peran yang dimainkan untuk membantu siswanya menjadi pembelajar yang semakin mampu meregulasi diri (lht. Mbato, 2013; Mbato & Triprihatmini, 2022).

Selain itu, perlu kiranya dipahami bahwa pembelajaran berorientasi regulasi diri tidaklah bermaksud meniadakan segala bentuk kegiatan pembelajaran kooperatif maupun kolaboratif. Justru sebaliknya. Seseorang yang mampu meregulasi diri dengan baik akan mampu berkontribusi secara lebih maksimal dalam berbagai kegiatan kooperatif maupun kolaboratif. Dalam banyak kesempatan, kita mengetahui dengan pasti bahwa proyek kelompok menjadi tidak efektif dan efisien karena ketidakmampuan anggotanya untuk berkontribusi. Seringkali banyak waktu terbuang karena berbagai kegiatan kolaboratif tidak memiliki tujuan atau memiliki tujuan tetapi banyak anggotanya yang tidak fokus pada pencapaian tujuan karena masih disibukkan dengan tantangan meregulasi emosi, pikiran maupun tindakannya sendiri. Hadwin dkk. (2017) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis regulasi diri menjadi landasan untuk mengeksplorasi lebih banyak bentuk regulasi sosial seperti regulasi bersama (*co-regulation*) dan regulasi yang *disharingkan*. Ko-regulasi terjadi ketika kemampuan atau kendala disesuaikan oleh individu (regulasi mandiri) atau kelompok (regulasi bersama) untuk secara

mendasar mendorong pemantauan strategi, evaluasi, atau adaptasi produk motivasi, perilaku, kognitif, dan/atau afektif di dalam dan di seluruh fase regulasi. Regulasi bersama dapat berhasil dipromosikan dengan menyusun perencanaan dan refleksi untuk meningkatkan kesadaran akan proses pembelajaran, mengeksternalisasi proses pembelajaran secara sosial, dan mengaktifkan proses regulasi utama.

Hal serupa dijelaskan oleh Allal (2019) yaitu bahwa di dalam kelas dapat terjadi regulasi pembelajaran secara bersama-sama sebagai hasil dari regulasi diri setiap pembelajar dan sumber belajar yang ada dalam lingkungan belajar: yaitu struktur situasi belajar/mengajar, intervensi dan interaksi guru dengan siswa, interaksi antara siswa, dan alat yang digunakan untuk instruksi dan untuk penilaian formatif.

Paradigma Pedagogi Ignasian yang terdiri dari *Konteks, Pengalaman, Refleksi, Aksi* dan *Evaluation* merupakan salah satu paradigma yang dapat digunakan dalam penerapan model metakognitif dalam mengembangkan regulasi diri pembelajar. Penciptaan konteks dalam memulai sebuah aktivitas pembelajaran memungkinkan peserta membangun pengetahuan kondisional yaitu kapan dan dimana dia berada dan dalam konteks apa pengetahuan baru dipelajari. Dalam konteks (*context*), ia akan didorong untuk mengaktifkan pengetahuan latar belakang (*skemata*) yang akan memudahkannya untuk menghubungkannya dengan pengetahuan baru. Pembelajaran yang dimulai dengan konteks ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang dipelajari dan ini juga berkaitan erat dengan teori belajar konektivisme. Seorang pendidik harus mampu dan terampil mengajukan pertanyaan baik *LOTS, HOTS* maupun metakognitif.

Tahapan kedua yaitu pengalaman (*experience*) mendorong pembelajar untuk mengalami langsung apa yang dipelajari melalui *experiential learning* atau *learning by doing*. Selanjutnya Ia akan merefleksikan apa yang dialami karena pengalaman akan bermakna bila direfleksikan melalui kegiatan *reflection*. Bersama guru/pendidik,

pembelajar akan menyusun *action* sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi yang dilakukan. Aksi ini bisa berupa kegiatan *discovery learning*, *problem based learning*, *inquiry learning*, *cooperative learning*, *project based learning* dsbnya. Tahapan ‘akhir’ dari siklus adalah evaluasi yaitu mengevaluasi pemahaman dan strategi yang digunakan. Siklus ini akan terus berlangsung dan tidak terputus. Melalui Paradigma Pedagogi Ignasian, pembelajar diharapkan dapat membangun kesadaran metakognitif yang tinggi dalam meregulasi diri terkait berbagai kegiatan kognitif maupun kegiatan non-kognitif yang dilakukan.

## **5.2 Relevansi Metakognisi dan Regulasi Diri dalam Dunia Pekerjaan**

Beberapa manfaat metakognisi dan regulasi diri dalam dunia pekerjaan, penulis sarikan pada bagian akhir buku ini. Regulasi diri dipercaya memiliki hubungan positif yang kuat dengan belajar siswa, prestasi akademik, dan kehidupan selanjutnya (Schunk & Greene, 2018; De Corte, 2019). Selanjutnya dijelaskan bahwa upaya untuk mereformasi pendidikan mengharuskan semua pihak untuk mempersiapkan generasi masa depan untuk hidup dalam dunia yang kompleks secara teknologi dan kompetitif secara ekonomi melalui perolehan pemikiran kritis, pemecahan masalah yang kompleks, kreativitas dan kemampuan meregulasi pembelajarannya sendiri (De Corte, 2019).

Menghadapi lingkungan *D-Vucad*, para manajer dihimbau untuk memikirkan kembali keterampilan mereka (D'Amato, 2022). Sementara itu, Law dan Zentner (2012) menekankan perlunya fleksibilitas model dan strategi yang digunakan dalam merespons disrupsi pasar. Dalam hal ini, teknologi baru perlu dilihat bukan sebagai disrupsi melainkan sebagai kesempatan untuk menciptakan ekonomi baru serta pendekatan dan prinsip industri digital baru (Shvidanenko dkk, 2020). Era disrupsi seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk mempelajari strategi dan inovasi baru seperti

halnya blended learning pendidikan (Wintarti dkk, 2019). Teknologi pembelajaran yang maju tidak akan menjamin hasil belajar yang baik bagi siswa jika tidak memiliki strategi pembelajaran yang efektif. Diyakini bahwa ketika pembelajaran berbasis regulasi diri dipadukan dengan teknologi pembelajaran yang baru dan maju akan menghasilkan dampak yang sangat baik bagi siswa itu sendiri (Sahdan & Abidin, 2017).

Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa kemampuan meregulasi diri mencakup kesadaran metakognisi. Dalam penelitian tentang kapan dan mengapa manajer tidak konsisten dalam pengambilan keputusan strategis (Mitchell dkk, 2010) ditemukan bahwa manajer dengan pengalaman metakognitif yang lebih besar membuat lebih sedikit keputusan strategis yang salah. Pada bagian awal buku ini disajikan bahwa Facebook (Pertwi, 11 November, 2022) melakukan PHK terbesar dalam sejarah perusahaan yaitu sebanyak 11.000 karyawan atau 13% di seluruh dunia dan pendapatan Meta, sang pemilik Facebook menurun sebanyak 4,5% atau (Rp 430,1 triliun). Salah satu alasan terjadinya peristiwa ini adalah kesalahan strategi di awal pandemic ketika Mark Zuckerberg, sang pemilik Meta, memprediksi bahwa orang akan berbondong-bondong bekerja online dan bukan offline setelah pandemi berakhir sebagai akibat dari kebiasaan kerja yang terbentuk selama pandemi. Ternyata prediksi ini salah karena perlahan-lahan baik individu maupun perusahaan mulai kembali bekerja offline.

Penelitian yang dilakukan oleh Bastian dan Zucchella (2022) terhadap pengusaha baru menunjukkan bahwa metakognisi dapat digunakan sebagai alat praktis yang dapat diajarkan dan dipelajari, dengan potensi nilai pendidikan bagi pengusaha dan manajer. Pendidikan kewirausahaan mungkin mendapat manfaat metakognisi, mengingat fakta bahwa pelatihan di kelas dapat mengarah kemampuan seseorang untuk merefleksikan diri dan meregulasi diri sendiri dalam konteks kewirausahaan. Dengan demikian, pelatihan metakognitif

dapat diimplementasikan dalam pelatihan kewirausahaan, program akselerator, dan inkubator.

Metakognisi juga berkaitan dengan *mindfulness* yaitu kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, sadar di mana dia berada dan apa yang dia lakukan yang membuatnya tidak terlalu terlalu reaktif atau kewalahan, dan ini disinyalir berkaitan erat dengan tingkat kebahagiaan (Mindful, 2022). Pelatihan kesadaran membutuhkan metakognisi yang memungkinkan orang mengembangkan kemampuan untuk memilih lebih besar (*agency*) dalam cara mereka merespons situasi. Ini penting bagi organisasi, karena ketika orang menghubungkan tindakan individu mereka ke dalam respons kolektif, praktik metakognitif dapat tertanam dalam proses penguatan yang mengubah organisasi—atau dalam proses fragmentasi yang mengancamnya (Kudesia, 2019).

Penelitian serupa dilakukan oleh Urban (2012) di Afrika Selatan menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi kognitif yang dimungkinkan oleh metakognisi mungkin penting dalam konteks yang dapat dicirikan secara inheren sebagai kompleks, dinamis, dan tidak pasti, seperti kewirausahaan. Temuannya antara lain mengungkapkan bahwa dimensi pengetahuan metakognitif merupakan sebagai prediktor niat kewirausahaan. Karena itu, memahami pemrosesan metakognitif dapat membantu pembuat kebijakan nasional yang mencoba mendorong perilaku wirausaha yang lebih berfokus pada peluang. Pernyataan ini didukung oleh hasil revidi kepustakaan (Kontostavrou & Drigas, 2021) yang menemukan bahwa metakognisi mendukung bakat dalam kepemimpinan. Keterampilan metakognitif seperti pemantauan, regulasi diri, kesadaran adalah keterampilan yang lebih tinggi yang diproses secara maksimal oleh individu berbakat. Oleh karena itu, jika kepemimpinan didasarkan pada kesadaran dan bakat maka kita akan memiliki keterampilan kepemimpinan yang lebih tinggi. Dalam bidang kesehatan ditemukan bahwa (Kim, 2019) kepemimpinan diri memiliki korelasi positif yang signifikan dengan metakognisi dan kecerdasan emosional. Prediktor signifikan

kepemimpinan diri adalah kontrol metakognitif, pengatur emosi, penilaian emosi diri, pengetahuan metakognitif.

Deepika dan Chitranshi (2020) menegaskan kepada para pemimpin bahwa Gen Z dapat belajar bertahan dan menjalankan fungsinya dengan baik dalam lingkungan *VUCA [D-Vucad]* yang selalu berubah ini melalui pengembangan keterlibatan, empati dan metakognisi. Mereka harus mengembangkan cara berpikir dan berfungsi yang baru untuk berhasil di bawah kepemimpinan yang cerdas, yang akan membuka banyak peluang untuk mereka. Visi yang jelas, fokus yang tajam, tujuan yang jelas, strategi yang terencana dengan baik, di bawah kemampuan kepemimpinan, akan membawa Gen Z dan organisasinya menuju perjalanan keunggulan dalam hal ini lingkungan *VUCA*.

Pendekatan metakognisi dan regulasi diri yang coba penulis tawarkan pada Bab ini merupakan salah satu model pembelajaran dalam kurikulum ke depan dan tidak dimaksudkan untuk menegasi berbagai teori belajar yang lain. Penulis memandang bahwa berbagai teori belajar yang ada bisa diintegrasikan dalam semangat pendidikan berbasis pembelajar untuk menciptakan manusia yang utuh yang selalu ingin belajar sepanjang hayat guna mengarungi dunia *D-Vucad*. Dalam dunia *D-Vucad*, hendaklah kita menyikapi metakognisi dan regulasi diri bukan saja sebagai kebutuhan individu untuk bertahan, belajar, dan berprestasi tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang, apabila disatukan, maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang cemerlang dan berintegritas.

Dalam hal ini metakognisi dan regulasi diri (ko-regulasi) sangat dibutuhkan dalam membangun jejaring sosial yang efektif dan efisien khususnya dalam menghadapi dunia *D-Vucad*. Memang benar yang dikatakan Siemens (2004, dikutip oleh Darrow, 2009) dalam teori konektivisme bahwa tiga teori belajar utama yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, tetaplah valid dan bahwa tidak satu teori pun yang berlaku universal. Beliau berargumen bahwa konektivisme memungkinkan pendidikan masa yang lebih baik karena

individu secara bersama-sama menciptakan pengetahuan dalam sebuah jejaring. Meskipun demikian, dalam Bab ini juga telah diuraikan bahwa kesadaran metakognitif dan regulasi diri sangatlah dibutuhkan dalam menavigasi dunia yang dipenuhi *D-Vucad*, fragmentalisme, superfisialitas dan instrumentalisme termasuk pengetahuan dan keterampilan untuk memilih dan memilah kapan dan mengapa berkoneksi dengan orang lain dan berjejaring.

### 5.3 Tinjauan Reflektif

Buku ini telah mencoba mengurai secara gamblang berbagai tantangan pendidikan Indonesia masa depan, strategi untuk menyikapinya dan juga peran, yang mungkin dapat diberikan Universitas Sanata Dharma sebagai salah satu Universitas Swasta tertua di Indonesia, khususnya dalam konteks penyediaan tenaga guru sekolah menengah sejak didirikannya tahun 1955, dan sekaligus mitra pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan swasta lainnya.

Filosofi pendidikan di Universitas Sanata Dharma tidak dapat dipisahkan dari salah satu tokohnya, sekaligus tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara atau lebih dikenal dengan sebutan Driyarkara, dan juga pemikiran dan kebijakan pendidikan Yesuit Dunia. Selain itu perlu digarisbawahi bahwa berbagai penerapan kebijakan pendidikan dan kurikulum di USD dan juga lembaga pendidikan lainnya tidaklah bisa dilepaskan dari kelima teori belajar utama yaitu behaviorisme, teori belajar sosial, kognitivisme, humanisme, konstruktivisme (serta derivatifnya, sosial konstruktivisme) dan teori konektivisme.

Berbagai kebijakan pendidikan dan kurikulum di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan penekanan pada perubahan pribadi (*personal change*) seperti pedagogi tertindas Freire dan pedagogi kritis. Hal ini terlihat dengan jelas dalam penerapan pembelajaran kurikulum merdeka yang berbasis pembelajar (*student-centred*

*learning*) dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tingkat Universitas, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya terlihat dari diperbolehkannya seorang mahasiswa mengambil 20 sks di luar Prodi atau bahkan Universitasnya.

Untuk itu, kebijakan pendidikan Indonesia ke depan, meskipun masih bersifat sentralisasi, pelaksanaannya hendaklah bersifat desentralisasi dengan manajemen berbasis *trust* dan *responsibility* sembari memberi ruang yang luas untuk mengeksplorasi kearifan dan kekayaan lokal. Pengambil kebijakan dan juga pengawas pelaksanaan pendidikan hendaklah mengusahakan keseimbangan antara akuntabilitas eksternal dan akuntabilitas internal. Penekanan yang terlalu berlebihan pada akuntabilitas eksternal justru bisa mematikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis para pelaku pendidikan di lapangan. Kedua keterampilan abad 21 ini sangat berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang bersentuhan langsung dengan anak didik sebagai subjek utama pendidikan. Maka perlu adanya kolaborasi dan komunikasi yang saling percaya serta dialogis antara pengawas dan pelaksana pendidikan di tingkat bawah untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan sesuai konteks setempat dan bukan untuk mencari kesalahan atau memberikan penghakiman.

Dari berbagai literatur yang dikutip dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan penulis yang tersaji dalam buku ini, baik secara individu maupun bersama rekan, ditemukan bahwa pengembangan manusia seutuhnya hanya akan terjadi bila seseorang mampu menyadari, mengelola dan meregulasi cara berpikirnya, emosinya, tingkah lakunya, dan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi (metakognisi) dan meregulasi diri beserta lingkungan, termasuk lingkungan digital, hanya akan mungkin berkembang dan berbuah bila seseorang memiliki kemerdekaan dalam menggali potensi dan minatnya, dan mengembangkannya secara maksimal. Dengan kata lain, seorang pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan hendaklah rela melepaskan kontrol yang ketat. Dia hendaknya menjadi model bagi

yang dapat diteladani oleh yang diawasi dan yang dididik (lht. teori belajar sosial Bandura, 1977) dan menjadi *significant others* (lht. ZPD-nya Vygotsky, dalam Cherry, 2022; Langford, 2004) dan bukan sebagai pemicu emosi negatif pada siapapun yang diawasi, diberikan tanggung jawab atau dididik.

Pengawas maupun pendidik hendaklah lebih bertindak sebagai fasilitator daripada supervisor dan instruktur apalagi memberi kesan mencari-cari kesalahan. Model pendidikan dari berbagai teori yang berpusat pada manusia atau peserta didik seperti yang ada di berbagai literatur, sudah dengan tegas dikatakan oleh para pemikir pendidikan bangsa kita. Misalnya, Ki Hadjar Dewantara telah mengajarkan kita untuk melaksanakan tiga peran mendidik dengan seimbang yaitu: (1) *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi teladan); (2) *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah memberi bimbingan); (3) *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan). Driyarkara mengatakan bahwa mengajar terbaik itu bukan dengan menggurui tetapi dengan memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk bertanya kepada anak didik atau siapapun yang menjadi tanggung jawab kita yaitu menjadi guru dengan tidak menggurui. Dalam tulisannya tentang sosialitas, Driyarkara mengatakan bahwa Beliau akan bahagia kalau ada orang yang bertanya tentang tulisannya. Penulis telah menekankan dalam buku ini bahwa kemampuan bertanya sangat erat kaitannya dengan pengembangan *LOTS* dan *HOTS* dan terlebih lagi pengembangan metakognisi dan regulasi diri.

Dalam buku ini juga telah dijelaskan bahwa guru menghadapi banyak tantangan dalam kesehariannya melaksanakan tugas-tugas pelayanannya, yang sering kali belum tersentuh dalam berbagai kurikulum pendidikan guru dan juga dalam berbagai program pengembangan guru di lapangan. Tantangan-tantangan tersebut bukan pertama-tama terkait penggunaan teknologi. Memang betul bahwa akses terhadap teknologi dan sekaligus keterampilan untuk menggunakannya masih menjadi *PR* bagi kita semua terutama pemerintah. Meskipun demikian, yang tidak kalah penting adalah

adalah kesempatan yang adil dan merata bagi semua pendidik, terlebih guru, dimanapun mereka berada, untuk belajar secara bersama-sama termasuk dalam hal penggunaan teknologi agar kita menjadi tuan atas teknologi dan bukan pelayan bagi teknologi (Harari, 2018).

Untuk itu pemerintah daerah atau persatuan guru di daerah hendaknya memastikan bahwa sarana belajar bersama dalam bentuk *learning community* tersedia bagi semua guru, tanpa dikotomi antara negeri dan swasta, dan dikelola secara efektif dan efisien. Dalam komunitas belajar, guru-guru diharapkan belajar bersama, termasuk melalui refleksi, untuk menjadi guru yang resilien (tangguh) dan memiliki efikasi diri dan motivasi yang tinggi, yang tumbuh dan berkembang dari kemampuan mereka dalam mengelola emosi untuk mencegah terjadinya *burn out* (kelelahan). Dengan kata lain, mereka diharapkan mampu mengelola pikiran dan diri serta lingkungan untuk mencapai transformasi diri menjadi pendidik yang profesional dalam segala aspeknya. Guru yang telah bertransformasi akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang transformatif dan berdampak positif dalam menciptakan anak didik yang fleksibel dan adaptif serta tangguh dalam menstrategisasi dunia *D-Vucad* yang cenderung fragmentalis, superfisial dan instrumentalis. Dan ini akan tercipta, antara lain, bila terjadi keberimbangan antara tuntutan akuntabilitas eksternal dan internal melalui semangat kolaboratif, dialogis, sinergis dan integratif.

Pada bagian akhir buku ini, penulis menyajikan model metakognitif dalam mengembangkan regulasi diri pembelajar yang dikombinasikan dengan tiga peran guru oleh Ki Hadjar Dewantara dan berbagai teori belajar utama serta beberapa pemikiran penting Driyarkara tentang peran pendidik. Selain itu, penulis juga telah menjelaskan bahwa Paradigma Pedagogi Ignasian bisa dijadikan salah satu pedagogi dalam pengembangan model metakognitif karena berpusat pada pengembangan pembelajar seutuhnya dan berorientasi pada semangat belajar sepanjang hayat. Penulis juga telah mencoba menyajikan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan relevansi

pendekatan metakognisi dan regulasi diri dalam mengarungi dunia nyata, kini dan ke depan, yaitu dunia *D-Vucad* yang cenderung fragmentalis, superfisial dan instrumental.

Akhirnya, siapa pun yang berada pada posisi mengajar, hendaknya mencermati pesan Driyarkara agar menjadi ‘guru’ dengan tidak menggurui. Dalam konteks ini, guru tidaklah terbatas pada konteks sekolah tetapi termasuk berbagai pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan baik tingkat pusat maupun daerah bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air.

Sebagai pengambil kebijakan pendidikan, dan pendidik, kita selayaknya menggunakan pendekatan eklektik dan integratif terhadap berbagai teori belajar dan teori perubahan pribadi (*personal change*) dalam mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu *critical thinking*, *creative thinking*, *collaboration* dan *communication* dengan semangat inklusif, non-diskriminatif, dan multikultural demi menciptakan bangsa Indonesia yang berbudaya, berkeadilan, bermartabat, sejahtera dan bahagia sesuai nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk mencapainya, nampaknya pendekatan metakognitif dan regulasi diri serta Paradigma Pedagogi Ignasian bisa menjadi *driving force*-nya.

## REFERENSI

- Abelmann, C., & Elmore, R. (1999). When accountability knocks, will anyone answer? *CPRE Research Reports*. <https://bit.ly/3GS2exz>
- Allal, L. (2019). Assessment and the co-regulation of learning in the classroom. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 27(4), 332-349. <https://doi.org/10.1080/0969594x.2019.1609411>
- Anderson, N. (2002). The role of metacognition in second language teaching and learning. <https://bit.ly/3Exam3y>
- Andriani, E., & Mbato, C. L. (2021). Male and female Indonesian EFL undergraduate students' metacognitive strategies in academic reading: planning, monitoring and evaluation strategies. *Journal on English as a Foreign Language*, 11(2), 275-296.
- Arnove, R. F. (2020). Imagining what education can be post-COVID-19. *Prospects*, 49(1-2), 43-46. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09474-1>
- Arslan, F. Y. (2019). Reflection in pre-service teacher education: Exploring the nature of four EFL pre-service teachers' reflections. *Reflective Practice*, 20(1), 111-124. <https://doi.org/10.1080/14623943.2018.1564652>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Battersby, S. L., & Verdi, B. (2014). The culture of professional learning communities and connections to improve teacher

- efficacy and support student learning. *Arts Education Policy Review*, 116(1), 22–29. <https://doi.org/10.1080/10632913.2015.970096>
- Bastian, B., & Zucchella, A. (2022). Entrepreneurial metacognition: a study on nascent Entrepreneurs. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 18,1775–1805. <https://doi.org/10.1007/s11365-022-00799-1>
- Borkowski, J., & Thorpe, P. (1994). Self-regulation and motivation: Life span perspective on underachievement. In D. Schunk & B. Zimmerman (Eds.), *Self-regulation of Learning and Performance: Issues and Educational Application* (pp. 45-73). Lawrence Erlbaum.
- Brookfield, S. D. (2005). *The power of critical theory for adult learning and teaching*. New York: Open University Press. <https://doi.org/9780335224388>
- Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation and other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, Motivation and Understanding* (pp. 65-116). Erlbaum.
- Bruning, R. H., Schraw, G. J., Norby, M. M., & Ronning, R. R. (2004). *Cognitive psychology and instruction (4th ed.)*. Pearson Education.
- Campbell, L., & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: success stories from six schools. *Association for Supervision and Curriculum Development*.
- Charbit, C. (2011). Governance of public policies in decentralised contexts: The multi-level approach. *OECD Regional Development Working Papers*. <http://dx.doi.org/10.1787/5kg883pkxkhc-en>

- Chubbuck, S. M. (2007). Socially just teaching and the complementarity of ignatian pedagogy and critical pedagogy. *Christian Higher Education*, 6(3), 239-265. <https://doi.org/10.1080/15363750701268145>
- Damanik, D. A. (2019). Kekerasan dalam dunia pendidikan: Tinjauan sosiologi pendidikan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 77-90. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.77-90>
- D'Amato, V. (2022). HR Challenges & competencies: during and "after" COVID-19 Dataset. *Università Carlo Cattaneo - LIUC*. <https://ar1.liuc.it/esploro/outputs/dataset/HR-Challenges--Competencies-during-and/991000917613905126>
- Darrow, S. (2009). *Connectivism Learning Theory: Instructional Tools for College Courses* [Masters' Degree in Education Thesis]. Western Connecticut State University, Danbury, CT. <https://westcollections.wcsu.edu/handle/20.500.12945/2959>
- Davis, A., & McDonald, D. (2019). Teachers' reflections of instructional effectiveness: Self-assessment through a standards-based appraisal process. *Reflective Practice*, 20(1), 125-141. <https://doi.org/10.1080/14623943.2019.1569508>
- De Corte, E. (2018). Learning design: Creating powerful learning environments for self-regulation skills. *Theoretical and Applied Research*, 4(1), 30-46. <https://ideas.repec.org/a/nos/voprob/2019i4p30-46.html>
- Defeo, J. A. (2009). Old wine in new skin: Ignatian pedagogy, compatible with and contributing to Jesuit higher education [A doctor of philosophy thesis]. Fordham University, New York. <https://research.library.fordham.edu/dissertations/AAI3361350/>
- Deepika, & Chitranshi, J. (2020). *Leader readiness of Gen Z in VUCA business environment*. *Foresight*, 23(2), 154-171. <https://doi.org/10.1108/fs-05-2020-0048>

- Ena, T. D. (2016). Religion Representation in Indonesian e-Textbooks: A Visual Content Analysis. In Harris Hermansyah Setiajid (Ed.), *Language Literature & Society* (pp. 142-149). Department of English Letters, Faculty of Letters, Universitas Sanata Dharma. <https://bit.ly/3VNgA6L>
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, *100*(3), 363–406. <https://doi.org/10.1037/0033-295x.100.3.363>
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, *34*(10), 906-911.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Garanzini SJ, M. J., & Baur, M. (2022). The ignatian pedagogical paradigm and its relevance for the Jesuit University. *DIDAC*, (79 ENE-JUN), 73-82. [https://doi.org/10.48102/didac.2022..79\\_ene-jun.93](https://doi.org/10.48102/didac.2022..79_ene-jun.93)
- Ginting, A. A., & Kuswando, P. (2020). Challenges faced by English teachers: Implementation of higher order thinking skills (HOTS) in designing assignments in East Indonesia. *Pedagogy : Journal of English Language Teaching*, *8*(1), 13. <https://doi.org/10.32332/pedagogy.v8i1.1688>
- González-Aller, Á., & Hernández, K. (2017). The Ignatian pedagogical paradigm: a means to discernment of faith and values in a Spanish language and literature curriculum. *Jesuit Higher Education: A Journal*, *6*(2), 141-150. <https://epublications.regis.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1249&context=jhe>
- Hadwin, A., Järvelä, S., & Miller, M. (2017). Self-regulation, co-regulation, and shared regulation in collaborative learning

environments in D. H. Schunk and J. A. Greene (Eds.), *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance* (2nd. ed.). Routledge.

- Harari, Y. N. (2018). *21 lessons for the 21st century*. Random House
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2015). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Hartana, A., Setyosari, P., & Kuswandi, D. (2016). Penerapan strategi pembelajaran paradigma pedagogi ignatian (reflektif) terhadap peningkatan hasil belajar dan motivasi berprestasi belajar ilmu pengetahuan alam (IPA) siswa Kelas V sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, penelitian, dan Pengembangan*, 1(4), 765-779. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6555/2794>
- Hayes, C. X. (2006). paradoxes, parallels and pedagogy: A case study of ignatian pedagogy and teachers' perceptions of its implementation in Australian Jesuit Schools [A Doctoral Thesis]. Australian Catholic University, Melbourne, Australia. <https://bit.ly/3U6L1U8>
- Hill, J., & Lundquist, A. (2008). Using leadership teams to elevate English learning. *School Administrator*, 65, 30-34. <https://aasa.org/schooladministratorarticle.aspx?id=4094>
- Hooghe, L., & Marks, G. (2016). Measuring regional authority. *Community, Scale, and Regional Governance*, 24-43. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198766971.003.0003>
- Hutagaol, S. (2015). Pengelolaan pedagogi Ignasian dalam pembentukan karakter siswa di smp kanisius jakarta pusat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 88-100. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jmp/article/view/180>
- Ireson, J. (2008). *Learners, learning and educational activity*. Routledge.

- Florida, N.M., dan Mbato. C.L. (2020). Novice versus experienced teachers: How they transform their vulnerability into professional identity in an Indonesian junior high school. *Journal of Education Research and Evaluation*, 4(1), 8-16. <https://doi.org/10.23887/jere.v4i1.23959>
- Jennifer, J., & Mbato, C. L. (2020). Critical incidents in pre-service teachers' beliefs and motivation to become English teachers: A study of teacher professional identity construction. *Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature*, 7(1), 112-127.
- Jennifer, J., & Ena, O. T. (2020). Cultural diversity in the use of action verbs in Indonesian senior high school English E-TEXTbooks: A qualitative content analysis. *Language Circle: Journal of Language and Literature*, 14(2), 211-221. <https://doi.org/10.15294/lc.v14i2.23336>
- Jones, L. L., & Estes, Z. (2015). Convergent and divergent thinking in verbal analogy. *Thinking and Reasoning*, 21(4), 473–500. <https://doi.org/10.1080/13546783.2015.1036120>
- Kazemi, S., Ashraf, H., Motallebzadeh, K., & Zeraatpishe, M. (2020). Development and validation of a null curriculum questionnaire focusing on 21st century skills using the Rasch model. *Cogent Education*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/2331186x.2020.1736849>
- Kharismawan, P., dan Mbato, C.L. (2019). Teachers attrition in influencing teachers 'decision making: the view of seven early career English teachers. *ICSTI*. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.20-9-2019.2292099>
- Kim, M. S. (2019). Influence of metacognition and emotional intelligence on self-leadership in nursing students. *Journal of Korean Academy of Nursing Administration*, 25(2), 146. <https://doi.org/10.1111/jkana.2019.25.2.146>

- Kontostavlou, E. Z., & Drigas, A. (2021). How metacognition supports giftedness in leadership. *International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)*, 14(2), 4-16. <https://doi.org/10.3991/ijac.v14i2.23237>
- Kristanto, Y. D. (2017). Implementasi pedagogi ignasian dalam pembelajaran mata kuliah aljabar dan trigonometri berbasis computer-based math untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antarmahasiswa. In M. Budiraharjo & L. R. P. Dewi (Eds.), *Risalah Implementasi Model-Model Pembelajaran Berbasis Pedagogi Ignasian (3rd ed., pp. 6–13)*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press
- Kudesia, R. S. (2019). Mindfulness as metacognitive practice. *Academy of Management Review*, 44(2), 405-423. <https://doi.org/10.5465/amr.2015.0333>
- Langford, P. E. (2004). *Vygotsky's developmental and educational psychology*. Psychology Press.
- Law, L. N., & Zentner, M. (2012). Assessing musical abilities objectively: Construction and validation of the profile of music perception skills. *PLoS ONE*, 7(12), e52508. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052508>
- Lomi, A. N. K., dan Mbato, C.L. (2020). Struggles and strategies in constructing professional identity: The first-year teaching experiences of Indonesian EFL novice teachers. *Journal of English Education and Teaching*, 3(3), 1-13.
- Lomi, A. N. K., & Mbato, C. L. (2021). Investigating Indonesian pre-service English teachers: Perceptions and motivations to enter the teaching profession. *Journal on English as a Foreign Language 11*(1), 125-151
- Long, M. (2002). *The psychology of education*. Routledge.

- Madhakomala., Aisyah, L., Rizqiqa, F. N., Putri, F. D., dan Nulhaq, S. (2022). Kurikulum merdeka dalam perspektif pemikiran pendidikan Paulo Freire. *At-Ta`lim: Jurnal Pendidikan*, 8(2),162-172. <https://doi.org/10.36835/attalim.v8i2.819>
- Matthew, P., Mathew, P., Prince, & Peechattu, P. J. (2017). Reflective practices: A means to teacher development. *Asia Pacific Journal of Contemporary Education and Communication Technology*, 3(1), 126-131. <https://bit.ly/3EtPM5T>
- Mbato, C.L. (2013). Facilitating EFL's learners' self-regulation in reading: Implementing a metacognitive approach in an Indonesian higher education setting [A doctoral thesis]. Southern Cross University, NSW.
- Mbato, C. L., & Triprihatmini, V. (2022). Empowering pre-service english teachers' metacognitive awareness in teaching through reflections. *European Journal of Educational Research*.11(4), 2165-8714.
- Mbato, C. L. (2019). Indonesian EFL learners' critical thinking in reading: Bridging the gap between declarative, procedural and conditional knowledge. *Jurnal Humaniora*, 31(1), 92-101. <https://doi.org/10.22146/jh.v31i1.37295>
- Mbato, C. L. (2021). Empowering Indonesian students' regulation of feelings and attitudes in EFL learning through action-oriented reflections. *Educational Action Research*, 1-20.
- Mitra, D. L. (2022). Educational change and the political process. Taylor & Francis.
- Mitchell, J. R., Shepherd, D. A., Sharfman, M. P. (2010). Erratic strategic decisions: When and why managers are inconsistent in strategic decision making. *Decision Making in Entrepreneurship*, 266-287. <https://doi.org/10.4337/9781784716042.00023>

- Mukminin, A., Habibi, A., Prasajo, L. D., Idi, A., & Hamidah, A. (2019). Curriculum reform in Indonesia: Moving from an exclusive to inclusive curriculum. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 9(2), 53-72. <https://doi.org/10.26529/cepsj.543>
- Nabila, A. P. (2022). Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHk) sebagai representasi pendidikan modern etnis Tionghoa di Batavia tahun 1901-1942. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2). <https://doi.org/10.21831/moz.v12i2.45621>
- Nugroho, A. A., & Mbato, C. L. (2021). Scrutinizing EFL teachers' emotions in the Indonesian context of Bandung. *Journal of English Education and Teaching*, 5(3), 330-348. <https://doi.org/10.33369/jeet.5.3.330-348>
- Nurimanar, Y. (2011). Pancasila yang mulai terlupakan. *Humanis*, 1(7), 5-7. *change as social movement*. Routledge.
- Ozamiz-Etxebarria, N., Berasategi Santxo, N., Idoiaga Mondragon, N., & Dosil Santamaría, M. (2021). The psychological state of teachers during the COVID-19 crisis: The challenge of returning to face-to-face teaching. *Frontiers in Psychology*, 11(January), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.620718>
- Priyatma, E. J. (2022). *Menggugat Ekosistem Pendidikan Kita*. Sanata Dharma University Presss.
- Perry, J., Lundie, D., & Golder, G. (2018). Metacognition in schools: what does the literature suggest about the effectiveness of teaching metacognition in schools? *Educational Review*, 71(4), 483–500. <https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1441127>
- Reaves, J. (2019). 21st-century skills and the fourth industrial revolution: A critical future role for online education. *International*

*Journal on Innovations in Online Education*, 3(1).  
<https://doi.org/10.1615/intjinnovonlineedu.2019029705>

- Rincón-Gallardo, S. (2019). *Liberating learning: Educational*
- Romrome, A. Y., & Ena, O. T. (2022). Incorporating local culture in English language teaching for Papuan junior high school students. *Journal of English Education and Teaching*, 6(2), 207-221. <https://doi.org/10.33369/jeet.6.2.207-221>
- Rubin, J. (1975). What the 'good language learner' can teach us. *TESOL Quarterly*, 9(1), 41-51.
- Rubin, J. (2008). Reflections. In C. Griffiths (Ed.), *Lessons from good language learners* (pp. 10-18). Cambridge University Press.
- Runco, M. (2011). Divergent thinking. *Encyclopedia of Creativity*, 400-403. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-375038-9.00077-7>
- Ryke, P; Yahya, B. D., & Mat Rahimi, B. Y. (2021). Determining the influence of teacher quality toward teacher readiness in implementing Indonesian education policy. *Eurasian Journal of Educational Research*, 93, 373-390.
- Sahdan, S. B., & Abidin, N. A. (2017). Self-regulated learning: A literature review for 21st century learning technology. *Advanced Science Letters*, 23(2), 912-915. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7435>
- Sambo, B, dan Yasunari, O. (2010). Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan tantangan implementasinya di Indonesia dewasa ini. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan*: Bandung.
- Sasmito, A. P., Kustono, D., Purnomo, P., & Elmunsyah, H. (2020). Conceptual model for improving quality of teacher in Indonesian vocational school. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i1.20390>

- Schunk, D. H., & Greene, J. A. (2018). *Handbook of self-regulation of learning and performance*. Routledge.
- Shaffer, L. S., & Zalewski, J. M. (2011). Career advising in a VUCA environment. *NACADA Journal*, 31(1), 64–74. <https://doi.org/10.12930/0271-9517-31.1.64>
- Shary, L. C. (2022). Relevansi konsep pendidikan Driyarkara dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(1) 1-6.
- Shirley, D. (2016). *The new imperatives of educational change: Achievement with integrity*. Routledge.
- Sholeha., & Setiawati, E. (2019). Pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. *Jurnal Swarnadwipa*, 5(3), 130-141.
- Shvidanenko, G., Shvidanenko, O., Sica, E., & Busarieva, T. (2020). The role of disruptive technologies in the formation of the world competitive leaders. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 42(2), 128-132. <https://doi.org/10.15544/mts.2020.13>
- Sigarlaky, S. L. A. (2020). Pemikiran Driyarkara tentang pendidikan: Analisa pemikiran Driyarkara dalam konteks pendidikan di Indonesia [Skripsi]: UKDW, Yogyakarta.In-text
- Slattey, P. (2006). *Curriculum development in the post-modern era* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1017/9781316822548.004>
- Sudiarja, A., Subanar, B., Sunardi, St. & Sarkim, T. (2006). Karya lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya. Gramedia Pustaka Utama.
- Suminto, E. A, dan Mbato, C. L. (2020). The implementation of metacognition in teaching character education in primary

- education. IDEAS: *Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*. 8(1), 130-146.
- Suryani, A. (2020). "I chose teacher education because...": A look into Indonesian future teachers. *Asia Pacific Journal of Education*, 41(1), 70-88. <https://doi.org/10.1080/02188791.2020.1783202>
- Susanto. R. & Pangesti (Juni 2019). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 340-350.
- Taubman, P. M. (2010). *Teaching by numbers: Deconstructing the discourse of standards and accountability in education*. Routledge.
- Triutami, C. S., & Mbato, C. L. (2021). EFL undergraduate students' professional identity construction: A sociocultural perspective. *Journal of English Education and Teaching* 5(1), 1-15.
- Tyack, D., & Cuban, L. (1995). *Tinkering toward utopia: A century of public school reform*. Harvard University Press.
- Uddin, M. S. (2019). Critical pedagogy and its implication in the classroom. *Journal of Underrepresented & Minority Progress*, 3(2), 109-119. <https://doi.org/10.32674/jump.v3i2.1788>
- Upa, Y., & Mbato, C. L. (2020). English teacher identity construction: Indonesian teachers' motivation and strategies in teaching English for special needs students. *Professional Journal of English Education*, 3(2), 311-321.
- Upa, Y., & Mbato, C. L. (2020). Non-permanent english teachers' resilience in constructing professional identity in the remote areas of South Sulawesi. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 5(4), 173-184

- Urban, B. (2012). A metacognitive approach to explaining entrepreneurial intentions. *Management Dynamics: Journal of the Southern African Institute for Management Scientists*, 21(2). <https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC124757>
- Voogt, J., & McKenney, S. (2016). TPACK in teacher education: are we preparing teachers to use technology for early literacy? *Technology, Pedagogy and Education*, 26(1), 69–83. <https://doi.org/10.1080/1475939x.2016.1174730>
- Wahana, P. (2016). Persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan dengan pembelajaran kontekstual-reflektif berbasis Pedagogi Ignasian. *Jurnal Penelitian*, 20(2), 132-143. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/JP/article/view/870>
- Walker, T.D. (2017). Teach like Finland (mengajar seperti Finlandia): 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Grasindo.
- Wardani, K. (2010). Peran guru dalam pendidikan karakter menurut konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara (The role of the teacher in building the character of the students according to Ki Hadjar Dewantara). *Paper presented at the The 4th International Conference on Teacher Education UPI & UPSI Bandung*. <https://bit.ly/3VgTTb1>
- Waryold, J. M., Holliday, K., & Rodriguez, E. (2021). Metacognition in nurse practitioner students: How nurse educators can best serve their students. *Journal of Applied Social Psychology*, 51(12), 1170-1175. <https://doi.org/10.1111/jasp.12770>
- Wea, T. N., & Budiraharjo, M. (2022). Investigating the NTT teachers in facing the online teaching challenges. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 5(1), 93-100. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jish/article/view/19727/7959>

- Wea, T. N., & Mbato, C. L. (2022). The Importance of school working conditions for teachers' job satisfaction. *IJOTL-TL: Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics*, 7(1), 43-57.
- Wenden, A. (1987). Metacognition: An expanded view in the cognitive abilities of L2 learners. *Language Learning*, 37(4), 573-597.
- Wintarti, A., Masriyah, Ekawati, R., & Fiangga, S. (2019). Blended learning as a learning strategy in the disruptive era. *Journal of Physics: Conference Series*, 1387(1), 012127. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1387/1/012127>
- Wong, R.S. (2002) Cultural and social capital in educational research. In B. Fuller dan E. Hannum (Ed.), *Schooling and social capital in diverse cultures*, 13, 1-12.
- Yasik, F. (2015). Budaya kekerasan Di dunia pendidikan: Evaluasi peran pendidik dalam program pendidikan ramah anak. *Mozaic: Islam Nusantara*, 1(1), 33-48. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v1i1.75>
- Yu, T. X., & Wan Mohammad, W. M. R. (2019). Integration of 21st century learning skills (4c elements) in interventions to improve English writing skill among 3k class students. *International Journal of Contemporary Education*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.11114/ijce.v2i2.4498>
- Zimmerman, B. (1986). Development of self-regulated learning. *Contemporary Educational Psychology*, 16, 307-313.
- Zimmerman, B.J., Bonner, S., and Kovach, R. 1996. *Developing self-regulated learners: beyond Achievement to self-efficacy*. The Graduate American Psychological Association.

## Referensi Elektronik

- Adryamarthanino, V. (18 Agustus, 2021). *Sistem pendidikan di era Belanda*. <https://bit.ly/3GSKOAS>

- Álvarez, P. S. J. (2014). *The promotion of justice in the universities of the Society*. <https://bit.ly/3ALhXuC>
- Andre, J. (22 September, 2022). *Tawuran geng pelajar di Bekasi, satu orang tewas kena bacok*. <https://bit.ly/3GM20YM>
- Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi. (2022). <https://bit.ly/3VreV6n>
- Anjani, A. (21 April, 2022). *Mengenal sekolah yang didirikan Kartini, berawal dari surat-suratnya*. <https://bit.ly/3XEGxHi>
- Anwar, R. (17 Desember, 2002). Sejarah perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia. <https://bit.ly/3okvwx9>
- ArapahoeTim. (September 9, 2020). “*The only constant in life is change.*”- *Heraclitus*. <https://bit.ly/3VqTm6a>
- Arieza, U. (6 April, 2022). *Apa itu klitih di Yogyakarta? Berikut asal-usulnya*. <https://bit.ly/3gFspNk>
- Asal Usul Berdirinya Pesantren di Indonesia. (17 Januari, 2018). <https://bit.ly/3V8WX9b>
- Aufi, A. U. (1 Juni 2019). *Pesantren abad 19 sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan*. <https://bit.ly/3OEucPb>
- Badan Pusat Statistik (2022). *Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persen), 2019-2021*. <https://bit.ly/3XxIzJ0>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. (2022). <https://bit.ly/3AQmWtU>
- Badan Pusat Statistik Perguruan Tinggi. (2022). <https://bit.ly/3VdcmoK>
- Bennett, N., & Lemoine, G. J. (January–February 2014). Strategic planning: What VUCA really means for you. *Harvard Business Review*. <https://bit.ly/3tZdHnt>

- Boler College of Business. (n.d.). *Association of Jesuit Colleges and Universities*. <https://bit.ly/3Vrfhdd>
- Caritas New Zealand. (2022). *Catholic social teaching: Te mana ote tangata*. <https://bit.ly/3V8X8Bn>
- Cherry, K. (2022, April 3). *Lev Vygotsky's Life and Theories: Verywell Mind*. <https://bit.ly/2MKhxxh>
- CNN Indonesia. (22 September, 2022). *Kemendikbud Akui 1,6 Juta Guru Belum Terima Penghasilan Layak*. <https://bit.ly/3EBJ7F7>
- Department of History. (n.d.). *Why should you study history?* <https://bit.ly/3ALESWi>
- Destalino, T. (5 Juli). *Guru Daerah Khusus Antara Pengabdian Dan Pengorbanan*. <https://bit.ly/3VcsNlv>
- Duminuco, V. J. S. J. (November 5, 2019). *Ignatian pedagogy: A practical approach* <https://bit.ly/3tZekgP>
- Dyah, E. (18 November, 2021). *Alami digital gap, pelaku ekraf indonesia baru 20,45% yang go digital*. <https://bit.ly/3GR2eho>
- IEEE Digital Reality. (2022). *Digital transformation and disruption*. <https://bit.ly/3VvpTb3>
- Tantangan UMKM dalam Digitalisasi. (17 November, 2022). <https://bit.ly/3U6YLxX>
- Firmansyah, M.J. (14 Februari, 2022). *Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim*, (Eko Ari Wibowo, Ed.). <https://bit.ly/3VaE1GX>
- Gerry, N. (12 September, 2021). *Kesenjangan kesejahteraan guru. The Columnist*. <https://bit.ly/3ED5V7p>
- Gitiyarko, V. (2021, 20 Juni). *Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan yang Memerdekakan*. <https://bit.ly/3F2OEFW>

- JDIH (2017). Guru dan Dosen. <https://bit.ly/3Ve54Bm>
- Harun, M. O. F. M. (2016). *Laudato Si' terpujilah Engkau*. <https://bit.ly/3F70ajP>
- Hidayatulloh. (2 Mei, 2020). *Peran K.H. AHMAD DAHLAN dalam pendidikan*. <https://bit.ly/3F7sZwF>
- Humas USD. (n.d.). Sejarah. <https://bit.ly/3EyUMVg>
- Hutchings, M. (2015). *Exam factories? The impact of accountability measures on children and young people*. <https://bit.ly/3FcOkER>
- IJACE. (2019). *Jesuit schools: A living tradition in the 21 century*. <https://bit.ly/3OI7DJ>
- Ihsan, D. (7 September, 2022). *5 perubahan penting yang ada di RUU Sisdiknas*. <https://bit.ly/3OFEdvm>
- Indeks Pembangunan Manusia. (2022). <https://bit.ly/3VaGy3X>
- JDIH BPK. (2017). *Data Base Peraturan*. <https://bit.ly/3gzRBEO>
- JDIH BPK. (2017). *Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat*. <https://bit.ly/3VrObCI>
- Jesemann, P. (14 November, 2022). *How Indonesia can overcome its own digitalization challenges*. <https://bit.ly/3ODJrb7>
- Jesuit Conference. (2002). *Communal reflection on the Jesuit mission in higher education: A way of proceeding*.
- Juliawan, B. H. (2022). *Apakah itu preferensi kerasulan universal?* <https://uap.jesuits.id/uap/>
- Karnadi, A. (4 Mei, 2022). Jumlah Guru Layak Mengajar Capai 2,91 Juta pada 2020/2021. <https://bit.ly/3VdEdW6>
- Kemendesa. (n.d.). *Sangat tertinggal*. <https://bit.ly/3Vqw5Ry>

- Kemenkeu. (8 November, 2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2022 Tumbuh Impresif 5,72%*. <https://bit.ly/3ANQfgu>
- Kemendikbudristek Ungkap Rata-Rata Skor Kompetensi Guru 50,64 Poin. (2 Desember, 2022). <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/11/2021/kemendikbudristek-ungkap-rata-rata-skor-kompetensi-guru-5064-poin/>
- Kemlu. (12 Februari, 2020). *Langkah dan upaya pemerintah indonesia dalam menangani dan menghadapi virus novel corona 2019 (n-cov)*. <https://bit.ly/3U7HeG3>
- Khalila, A. (7 Oktober, 2022). *3 Dampak Perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia*. <https://bit.ly/3EZYGYF>
- Killgore, W. D. S. (2010). *Convergent thinking and logical deduction*. <https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/convergent-thinking/pdf>
- Kurikulum Merdeka Beri Kebebasan Siswa Memilih Materi Pembelajaran. (8 Agustus, 2022). <https://bit.ly/3Vvn5j>
- Lampiran ToR Dies USD ke 67. (2022).
- Lord, R. (7 October, 2021). What can we learn from Finland's education system? *Tatler Asia*. <https://bit.ly/3icf3bF>
- Loyola Press. (n.d). *Finding God in all things*. <https://bit.ly/3OCmpRP>
- Mahdi, M. I. (8 Desember, 2021). *Rasio guru dan murid di indonesia sudah ideal?* <https://bit.ly/3F7yX0u>
- Mardianto, A. (2022). Pendidikan bagi anak di daerah 3t. *Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*. <https://bit.ly/3XBVWrV>
- Mbato, C. L. (21 Juli, 2018). *Promising investment for education*. <https://bit.ly/3AQ1sNw>

- Mcleod, S. (5 February 2016,). *Social learning theory*. <https://bit.ly/3OC14dM>
- Mindfulness. (2022). *Getting Started with Mindfulness*. <https://bit.ly/2AyqQZ8>
- Muwaffaq, M.M. (4 April, 2020). *Pondok pesantren an-nawawi berjan purworejo; berdiri sejak tahun 1870 m*. <https://bit.ly/3ARPeUJ>
- Murtiningsih, S (2022, 9 September). Bahaya Liberalisasi Pendidikan. <https://bit.ly/3VqtdV1>
- Naikpangkat. (15 Maret, 2022). Penetapan daerah tertinggal dan kriteria guru yang berhak menerima tunjangan khusus di tahun 2022. <https://bit.ly/3F36tF2>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2022). *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://bit.ly/3EHfbHQ>
- Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Agustus 2022). *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://bit.ly/3U7XMh2>
- Pertiwi, W. K. (11 November, 2022). *5 Fakta PHK Massal Induk Facebook, dari Salah Strategi hingga Pesangon Karyawan Terdampak*. <https://bit.ly/3AOPYKu>
- Priyatma, J. E. (n.d.). *Rencana strategis Universitas Sanata Dharma 2018-2022*.
- Purba, H. (6 Agustus, 2022). *Problematika penerapan kurikulum merdeka*. <https://bit.ly/3F5r8Zo>
- Pusiknas. (n.d). *Jangan anggap enteng! Dampak kekerasan pada anak berbekas hingga dewasa*. <https://bit.ly/3ii7d0h>

- Raharja, S. (n.d.) *Pendidikan berwawasan ekologi: Pemberdayaan lingkungan Sekitar untuk Pembelajaran* <https://bit.ly/3gP3MOB>
- Rizaty, M. A. (25 Agustus, 2022). *Ada 3.975 perguruan tinggi di Indonesia per 2021, cek sebarannya.* <https://bit.ly/3u72T6O>
- Robinson, S. K. (2018). *Do schools kill creativity.* <https://bit.ly/3U9jIs7>
- Rodrigues, Z. B. (February 1, 2202). *Education: A study based on the UNESCO report on the four pillars of knowledge.* <https://bit.ly/3F5ELI1>
- Ruma, Y. (n.d.) *Kesenjangan pendidikan di Indonesia.* <https://bit.ly/3gzA4wD>
- Saint Louis University. (2022). *Ignatian Pedagogical Paradigm.* <https://bit.ly/2tRl29y>
- Saputra, M. G. (22 Maret, 2022). <https://bit.ly/3GMFILT>
- Sejarah Berdirinya Budi Utomo pada 1908. (n.d.). *CNN Indonesia.* <https://bit.ly/3EARCFi>
- Sejarah Universitas Sanata Dharma. (n.d.). <https://www.usd.ac.id/sejarah.php>
- Sejarah Yayasan Kanisius. (2019). <https://bit.ly/3Ubd98E>
- Serikat Yesus. (n.d.). *Karya & Pelayanan Pendidikan.* <https://bit.ly/3V9h8no>
- Setiawan, I., Pape, U. Beschorner, N. (13 Mei, 2022). *Bagaimana mengatasi ketidakmerataan akses internet di Indonesia.* <https://bit.ly/3UaRVHV>
- SIA Pejabat USD. (n.d.). *Demografi mahasiswa.* <https://bit.ly/3gzAfrN>
- SMA Kanisius Kudus. (2022). *Sejarah.* <https://bit.ly/3AOVtc1>

- Sosa, A., S. J. (August, 2022). Discerning the present to prepare the future of the university education of the society of Jesus. <https://bit.ly/3igISId>
- Sosa, A. S. J. (27 September 2017). On *discernment in common*. <https://bit.ly/3OLbDci>
- Statuta. (2009). Univeritas Sanata Dharma.
- Strategi Kebudayaan Indonesia. (2018). Kongres kebuayaan Indonesia. <https://bit.ly/3VfwS8y>
- Suprijadi, D. (31 Oktober, 2018). *Tanggungjawab sama, kesenjangan pendapatan guru PNS, dan non PNS harus diakhiri*. <https://bit.ly/3OEcd1R>
- The World Bank. (October 4, 2022). *Russian invasion of Ukraine impedes post-pandemic economic recovery in emerging europe and central asia*. <https://bit.ly/3UgpHvk>
- Tifada, D. A., & Winardi, A. D. (8 Juli, 2022). Pesantren era kolonial di nusantara: rumah ideal belajar dan melawan penjajah belanda. <https://bit.ly/3XAdnJl>
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). (2020). <https://bit.ly/3XElinV>
- Tim Redaksi CNBC Indonesia. (21 October, 2022). *Pengakuan Sri Mulyani: Krisis 2023 sangat berat!* <https://bit.ly/3EHQGdq>
- UNESCO. (9 June 2022). *What you need to know about inclusion in education*. <https://bit.ly/3gHJFRS>
- Universal Apostolic Preferences. (2019). *Universal apostolic preferences of the Society of Jesus, 2019-2029*. <https://bit.ly/3V9Lbve>
- Warta Sejarah. (n.d.). <https://bit.ly/3EFRnzz>
- Welianto, A. (12 Juni, 2020). *STOVIA, sekolah kedokteran yang melahirkan tokoh pergerakan*. <https://bit.ly/3OIeWRd>

- Widya, L. (n.d.) Filsafat pendidikan. *Academia.edu - Share research*.  
<https://bit.ly/3V8k7wt>
- Widyaputranto, A. (2011). *Lima ciri pendidikan Yesuit*. <https://bit.ly/3U7ySyb>
- Wirachmi, A. (11 Juli 2022). Jejak Sejarah Pendidikan di Indonesia, Berawal dari Sekolah Katolik di Maluku. <https://bit.ly/3ALuGx6>
- Worldometer. (2022). *Indonesian population*. <https://bit.ly/2NsBQQG>
- Woodward, I. C. (2 November, 2017). Leadership is a journey, not a destination. *INSEAD Knowledge*. <https://bit.ly/3EDQGeF>
- Wulandari, T. (2022, 12 Agustus). *Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka SD, SMP, SMA & SMK*. <https://bit.ly/3idWZhr>
- Xavier Edu. (n.d.). *What is Jesuit education?* <https://bit.ly/3OEaenx>
- Yanuar. (30 Agustus, 2021). *Terkait TKG, mendikbudristek tetapkan 9 ribuan daerah khusus*. <https://bit.ly/3VKGecj>
- Yilmaz, H. (9 Februari 2022). No, Russia will not invade Ukraine: A large-scale military operation does not fit into Moscow's cost-benefit calculus. <https://bit.ly/3EFJ3V6>
- Young, J. R. (2022, March 24). *Researcher behind '10,000-hour rule' says good teaching matters, not just practice*. EdSurge. <https://bit.ly/3AYbrR7>

## BIODATA PENULIS



Conciliaus Laos Mbato lahir di Kampung Terong, Riung, Ngada, Flores, NTT pada tanggal 9 Juli 1967. Penulis mengenyam pendidikan menengah atas di SMA Seminari St. Yohanes Berchmans, Mataloko dan menyelesaikannya di SMA Syuradikhara, Ende, Flores, pada tahun 1988. Penulis menyelesaikan S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari IKIP Makassar, tahun 1992. Ia menjadi Guru di SMA Katolik Rajawali, Makassar hingga tahun 1996

dan mendapatkan beasiswa Ausaid untuk melanjutkan pendidikan S2 bidang Applied Linguistics di Griffith University, Australia tahun 1997-1998. Ia menjadi dosen Pendidikan Bahasa Inggris di Prodi PBI, Universitas Sanata Dharma tahun 1998-hingga sekarang. Tahun 2009-2013, penulis mendapatkan beasiswa DIKTI untuk menempuh pendidikan Doctor of Education di Southern Cross University, Lismore, Australia. Penulis aktif dalam berbagai skema penelitian dan publikasi khususnya bidang strategi belajar yaitu metakognisi dan regulasi diri, dan pengembangan guru profesional serta terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan guru, termasuk Program PPG. Karya tulis beliau dapat diakses melalui google scholar ([https://scholar.google.com/citations?user=gTe-\\_XsAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=gTe-_XsAAAAJ&hl=en)).

# PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN:

## TANTANGAN, STRATEGI, DAN PERAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Concilianus Laos Mbato

Dunia dewasa ini dan ke depan menghadapi situasi D-Vucad. Selain itu ia juga ditandai fragmentalisme, superfisialitas dan instrumentalisme. Dalam situasi seperti ini, pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dalam konteks nasional maupun global. Tantangan internal yang dihadapi antara lain pemerataan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia yang belum begitu tinggi, Angka Partisipasi Kasar yang masih rendah untuk level perguruan tinggi, dan berbagai kesenjangan termasuk kesenjangan guru, budaya dan digital. Sementara itu, bangsa kita juga dihadapkan pada berbagai dampak globalisasi seperti isu liberalisasi pendidikan dan daya saing. Karena itu, kita perlu menyusun berbagai strategi yang jitu untuk menyikapinya antara lain melalui keberimbangan sentralisasi dan desentralisasi, pendidikan antarbudaya dan ekologis, pendidikan inklusif dan non-diskriminatif serta kurikulum holistik berbasis metakognisi dan regulasi diri yang dikombinasikan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Driyarkara dan Paradigma Pedagogi Ignasian.

Selain itu, Sanata Dharma sebagai salah satu Universitas Yesuit dan swasta di Indonesia, yang didirikan tahun 1955 sebagai hasil diskusi dengan Menteri Pendidikan kala itu, ikut berperan dan harus semakin berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa, khususnya melalui pendidikan. Karena itu, untuk memahami strategi Sanata Dharma ke depan, kita perlu mengenal falsafah pendidikan Yesuit serta salah satu Tokoh Pendidikan Nasional dan sekaligus Rektor pertamanya yaitu Driyarkara, yang, meski karya-karyanya telah diakui Pemerintah melalui penghargaan oleh Presiden Habibie, pemikiran-pemikirannya dalam dunia pendidikan belum begitu dikenal, apalagi digunakan. Beberapa gagasan Beliau yang belum banyak didalami adalah hominisasi dan humanisasi, memanusiaikan manusia muda, dan menjadi guru dengan tidak menggurui.



ISBN 978-623-6103-93-7 (PDF)



9 786236 1103937

Pendidikan